

MPR TINJAU PEMBANGUNAN DI PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

EDISI NO.01/TH.XIII/JANUARI 2019



Proyeksi Ekonomi Tahun 2019

Ekonomi Indonesia Masih Tetap Tumbuh



28 Nasional
MPR Terima
Indonesia Award 2018

39 Selingan
Terinspirasi Perjalanan
dari New York ke Washington

53 Sosialisasi
Bijak Bermedia Sosial
Sesuai Pancasila

ISSN 0854-6371

9 770854 637158



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



INDONESIA
INI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS



INDONESIA
INI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.01/TH.XIII/JANUARI 2019



10 BERITA UTAMA

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019

Perekonomian Indonesia pada 2019 diprediksi akan tetap tumbuh meskipun diterjang ketidakpastian kondisi ekonomi global. Ekonomi Indonesia masih dianggap rentan terhadap sentimen eksternal.



24 Nasional
MPR Terima Indonesia Award 2018



50 Sosialisasi
MPR Tinjau Pembangunan di Perbatasan Indonesia-Filipina



39 SELINGAN
Sejarah Jalan Tol di Indonesia



78 Profil
Andi Akmal Pasluddin

Pengantar Redaksi	04
Opini	06
Kolom	08
Proyeksi Politik Indonesia 2019	18
Diskusi Majelis	36
Aspirasi Masyarakat	47
Varia MPR	71
Wawancara	72
Figur	74
Ragam	76
Catatan Tepi	82



COVER

Edisi No.01/TH.XIII/Januari 2019
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Koordinator Reportase

Pengantar Redaksi

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019

BAGAIMANA wajah ekonomi Indonesia pada 2019? Salah satu indikator untuk melihat wajah ekonomi Indonesia adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Sejumlah pengamat dan ekonom memprediksi perekonomian Indonesia pada 2019 ini akan tetap tumbuh atau masih akan sama dengan 2018. Sejak kuartal pertama 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka sekitar 5%. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibilang cukup tinggi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Sesuai asumsi makroekonomi APBN 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan berada di rentang 5,2-5,4%. Proyeksi itu tak jauh berbeda dengan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019. Bank Indonesia (BI) juga memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2019 akan membaik. BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap meningkat berada di kisaran 5% hingga 5,4%.

Namun, banyak faktor yang ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu. Tantangan itu tidak hanya dari internal, tapi juga eksternal. Dari sisi eksternal, misalnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia terkena dampak perang dagang itu. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cenderung menurun juga akan memengaruhi perilaku pebisnis, khususnya ekspor di Indonesia. Ekspor bahan baku Indonesia ke negeri tirai bambu itu bakal turun.

Di lingkup internal, tantangan ekonomi

domestik ditandai dengan persoalan depresiasi rupiah seiring defisitnya neraca transaksi berjalan (Badan Pusat Statistik/BPS) mencatat neraca perdagangan defisit US\$ 2,05 miliar). Pada 2019 nilai tukar rupiah diperkirakan masih melemah. Indef memproyeksikan, rata-rata nilai tukar rupiah pada 2019 sebesar Rp15.250 per USD. Indef juga menyebutkan sejumlah indikator. Misalnya, harga minyak dunia pada 2019 diproyeksikan sebesar US\$ 75 per barel, sedikit lebih tinggi dari asumsi makro APBN 2019 sebesar US\$ 70 per barel.

Inflasi pada 2019 diperkirakan sebesar 3,5% seiring laju daya beli yang juga rendah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 5,3%. Angka kemiskinan pada 2019 diprediksi mencapai 10%. Sektor industri masih menjadi penyumbang utama dalam perekonomian Indonesia, walaupun peranannya semakin menurun.

Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan tarif listrik juga menghantui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019. Meski memberatkan APBN karena membengkaknya subsidi BBM, pemerintah masih bertahan untuk tidak menaikkan harga BBM dan listrik karena menghadapi Pemilu dan Pilpres. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik ini bisa mendorong laju inflasi. Terkait utang pemerintah, utang juga memberatkan beban yang ditanggung negara.

Ke depan, kebijakan ekonomi nasional 2019 perlu diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Pengelolaan ekonomi harus merujuk pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 agar kesejahteraan rakyat meningkat. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

Selfi Zaini

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, M. Rizal,

Suryani, Tugiyana, Heri Herawan,

Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Muhamad Jaya

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Sucipto, Supriyanto,

Euis Karmilah

REPORTER

Ana Suzana, Mery S. Magdalena,

Yenita Revi, Sugeng Cahyono

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatni

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Kiki Tri Murjono,

Armansyah, Dhita Fitasari

Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



ILUSTRASI: SUSTHANTO





ISTIMEWA

Masalah Kewenangan Penanganan Tsunami Banten

SABTU malam (22/12/2018), tepat pukul 21.33 WIB, gelombang secara tiba-tiba tanpa peringatan dini, tsunami menerjang seluruh pantai Barat Provinsi Banten dan wilayah Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dahsyatnya gelombang tsunami disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau itu telah meluluhlantakkan bangunan rumah, hotel, lokasi wisata di seputar pantai Banten dan Lampung Selatan.

Tidak sedikit koban jiwa disebabkan oleh tsunami di malam libur akhir pekan, Sabtu malam Minggu itu. Data terakhir per 31 Desember 2018, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, jumlah korban meninggal 437 orang, 16 orang dilaporkan masih hilang, 14.059 orang luka-luka, dan 33.721 orang mengungsi di sejumlah lokasi.

Bencana tsunami yang terjadi membuat seluruh rakyat Indonesia tertegun, sebab belum lama wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, juga luluh lantak oleh gempa yang disusul kemudian serangan tsunami yang menyebabkan korban dan harta yang luar biasa besarnya. Pasca tsunami Banten mereda, dari informasi korban selamat terungkap bahwa tsunami datang dengan sangat tiba-tiba, dan sama sekali tidak ada peringatan dini.

Minusnya peringatan tsunami dari pihak berwenang, dalam hal ini

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kemudian menjadi viral dan menjadi perdebatan panas di tengah-tengah masyarakat. BMKG, melalui ketuanya Dwikorita Karnawati, melakukan klarifikasi bahwa sejak 21 Desember, BMKG selalu memantau gunung anak Krakatau dan sekitarnya. Bahkan pada tanggal tersebut, pukul 13.51 WIB, BMKG mengumumkan peringatan erupsi gunung dengan status level waspada.

Dan, pada 22 Desember pagi, sekitar pukul 07.00 WIB, BMKG mengeluarkan pengumuman peringatan dini potensi gelombang tinggi di sekitar perairan selat Sunda. Dwikorita juga mengungkapkan bahwa tsunami Banten tidak dipicu akibat gempa bumi, tapi disebabkan kombinasi dari longsor bawah laut yang diakibatkan pengaruh aktivitas gunung Anak Krakatau, dan gelombang pasang. Sedangkan seluruh alat pendeteksi tsunami yang dimiliki BMKG untuk mendeteksi potensi tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi.

Bencana memang kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak bisa dihindari, namun deteksi dini potensi bencana bisa diupayakan untuk menghindari korban nyawa lebih besar. Untuk itu, sinergitas, komunikasi, serta koordinasi antara pihak-pihak yang memang ahli di bidang bencana alam harus lebih baik, ditambah *upgrading* peralatan pendeteksi bencana alam. □

DER

Sinergitas TNI dan Polri dalam Penanganan KKB Papua

KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang melakukan aksi separatisme terhadap kedaulatan NKRI sudah seperti duri dalam daging. Aksi yang dilakukan KKB bukan hanya merongrong kedaulatan negara, tapi juga mengancam keselamatan rakyat Indonesia. Mereka melakukan berbagai tindakan biadab, berupa kekerasan dan pembunuhan.

Belum lama ini, Sabtu (2/12/2018), KKB Papua yang dipimpin Egianus Kogoya yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) melakukan aksi pembunuhan terhadap 31 pekerja BUMN, PT. Istaka Karya, di wilayah Nduga yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan jalan di

Papua.

Aksi kekerasan yang dilakukan gerombolan sparatis Papua ini menambah panjang daftar korban di kalangan warga sipil dan apatur keamanan Indonesia. Ini tak bisa dibiarkan, apatur keamanan harus bertindak tegas dan terukur. Karena salah cara untuk menghentikan aksi mereka ini alaha dengan cara melakukan penumpasan sampai ke akar-akarnya.

Karena korbannya bukan hanya di kalangan militer dan kepolisian, namun juga kalangan sipil yang sedang pembangunan jalan di Papua, maka tindakan ini termasuk biadab. Wajar kalau peristiwa itu menimbulkan kutukan dan kemarahan seluruh elemen masyarakat



ISTIMEWA

Indonesia. Ketua MPR Zulkifli Hasan termasuk yang mengutuk aksi tersebut. Ia minta agar TNI dan Polri menindak tegas para pelakunya.

Negara pun bertindak cepat. Tim gabungan TNI dan Polri dibentuk dan langsung menggelar operasi pengejaran terhadap KKB tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah tak akan memberi ampun bagi mereka (KKB) yang tak mau menyerah.

“Terus dikejar, habisi mereka, jangan sampai mengganggu kepentingan negara yang besar ini. Tindakan tegas ini sah secara Undang-undang. Ada pembenaran bagaimana Polisi dan TNI untuk menghabsi dan mengejar mereka, KKB Papua,” katanya, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Di saat pemerintah gencar-gencarnya melakukan pengejaran terhadap gerombolan KKB tersebut, muncul wacana tentang kewenangan aparat hukum dalam penanganan KKB, apakah TNI atau Polri. Hal tersebut sempat menjadi polemik di berbagai ranah

diskusi. Apalagi sempat terdengar isu bahwa Indonesia menggelar operasi militer di Papua yang kemudian dibantah Kepolisian Daerah Papua melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal.

Menyikapi hal tersebut, TNI dan Polri seyogyanya tidak terpengaruh. Isu operasi militer bisa saja dihembuskan oleh afiliasi kelompok separatis Papua di luar negeri untuk menciptakan imej dan isu baru yang memojokkan Indonesia di mata dunia. Mungkin saja, aksi KKB Papua yang membunuh 31 pekerja tersebut sebagian kecil dari rangkaian besar kelompok separatis Papua dan para afiliasinya untuk menjelekkan Indonesia di mata dunia.

Untuk itu, TNI dan Polri mesti waspada menghadapi isu seperti itu. Konsentrasi dan fokus menjalankan tugas memberantas separatis di NKRI, selain melakukan evakuasi korban pembantaian KKB Papua, dan menjaga masyarakat Papua serta menciptakan rasa aman. □

DER

Misteri Jelang Pemilu 2019, Ribuan e-KTP Tercecer

PEMILU 2019 semakin mendekati titik kulminasinya, yakni hari H penyelenggaraan. Berbagai fenomena dan misteri muncul mengiringi proses pemilu hingga menuju puncaknya. Salah satunya yang menggelitik adalah misteri tercecernya ribuan e-KTP di berbagai wilayah Indonesia. Luar biasa, jumlah yang tercecer tidak sedikit, mencapai ribuan keping.

Tersiarnya kabar dan berita melalui media massa nasional dan di media sosial tentang tercecernya ribuan e-KTP menimbulkan rasa khawatir untuk sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi berita itu diikuti oleh berbagai spekulasi yang menyeruak bahwa sebagian e-KTP itu milik WNA yang akan diangkut ke wilayah tertentu, dan tujuan tertentu pula.

Tidak sedikit pula netizen, yang juga meramalkan peristiwa ini, mengaitkan tercecernya e-KTP itu ada kaitannya dengan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Dan, banyak lagi dugaan negatif lainnya yang berkembang liar, dan tak terkendali. Agar tak semakin blunder dan bias, serta meresahkan masyarakat, pihak Dukcapil Kementerian Dalam Negeri segera memberi klarifikasi.

Dalam penjelasannya, Dukcapil Kemendagri menyatakan bahwa isu-isu tercecernya ribuan e-KTP tersebut adalah tidak benar. “Ribuan e-KTP itu terjatuh dari truk pengangkut, dan semuanya milik WNI. Keping-keping e-KTP itu sudah kadaluarsa dan rusak, diangkut dari Dukcapil Kemendagri di Pasar Minggu ke gudang penyimpanan sementara di Semplak Bogor,” jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri



ISTIMEWA

Zudan Arif Fakrulloh.

Tak dijelaskan kenapa dokumen negara itu sampai tercecer begitu saja. Itu akibat kecerobohan atau memang ada unsur kesengajaan. Entahlah. Yang jelas, peristiwa itu telah memantik api sehingga membuat suasana di tahun politik ini bertambah panas. Lebih aneh lagi, peristiwa tercecernya e-KTP itu tidak hanya sekali terjadi, tapi berulang-ulang dan di berbagai tempat.

Seperti diketahui bahwa Sabtu, 8 Desember 2018, diketahui telah tercecer sekitar 2.158 keping e-KTP di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan, dalam waktu yang hampir bersamaan, peristiwa serupa juga terjadi di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dan sebelumnya, pada Mei tahun lalu, kasus tercecernya e-KTP juga menghebohkan. Waktu dikejutkan oleh temuan ribuan e-KTP yang dalam kondisi bagus tercecer di Jalan Raya Semplak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Karena kasus ini terjadi menjelang Pemilu 2019, tak heran kalau muncul dugaan bahwa ini ada keterkaitannya dengan pemilu. Kecurigaan masyarakat beralasan, ditambah lagi terkuaknya kasus penjualan blanko e-KTP secara online, serta jasa duplikat e-KTP di Pasar Pramuka, Jakarta, oleh Polri. Untuk meredam kekekhawatiran masyarakat, pihak berkompeten – dalam hal ini Dukcapil dan Kepolisian – perlu memberi klarifikasi secara jelas dan terang berderang. □

DER



Baharuddin Aritonang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Perekonomian Nasional

DI DALAM kehidupan ini, faktor ekonomi selalulah menjadi perhatian penting. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Juga di dalam pengelolaan negara. Tidak jarang tolok ukur keberhasilan mengelola negara dilihat dari kehidupan perekonomian. Naik turunnya pemerintahan, akan terpengaruh pada faktor ekonomi.

Cuma perhatian terhadap bidang ekonomi memiliki aspek yang luas. Bisa dilihat dari berbagai sudut, sejak rumusan umum atas kegiatan ekonomi sampai kepada kehidupan nyata sehari-hari, khususnya yang dirasakan oleh rakyat. Tak heran di dalam menyusun anggaran secara nasional selalu disertakan tolok ukur yang umum digunakan. Misalnya, target tingkat pertumbuhan, inflasi, atau nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Sedang di sisi lain, rakyat melihatnya di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Khususnya di dalam penerimaan dan pengeluaran. Gaji dan pendapatan lain yang diterima dan harga-harga kebutuhan pokok. Di kampung saya, akhir tahun 2018 ini tetap terasa getir. Pasalnya, harga karet berada pada tingkat yang amat rendah. Hanya Rp 2000 sekilo (pernah mencapai Rp 12.000 per kilogram). Sedang harga kelapa sawit, komoditi yang semakin populer pun berada pada harga yang rendah. Hanya Rp 500 sekilo. Upah memetikinya saja tidak tertutupi, tambah petani.

Sedang perekonomian nasional tidak akan berdiri sendiri. Selalu terkait dengan faktor politik, hukum, dan bidang-bidang lainnya. Ketika nilai ekspor tidak menunjukkan perubahan yang mendasar, tentulah akibat sektor ekonomi yang tidak mengalami perubahan. Sementara negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah menghasilkan barang-barang industri, negeri kita masih mengandalkan bahan-bahan alamiah, seperti karet, coklat, minyak

sawit, batu bara, dan sejenisnya. Tentulah semua ini karena ketidakmampuan kita menstransfer bidang pertanian ke bidang industri. Dan, ini juga akan terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia, yang banyak dipengaruhi bidang pendidikan.

Begitulah kira-kira gambaran kasarnya. Makanya perekonomian nasional akan terkait dengan bidang-bidang lainnya. Apalagi di dalam penyelenggaraan negara. Memang negara hanya mengelola anggaran yang tidak terlalu besar (konon sekitar 11%) dari perekonomian nasional. Tapi negara sesungguhnya akan mengatur perekonomian secara keseluruhan. Tidak mengherankan bila perekonomian acapkali dikaitkan dengan hukum dasar atau konstitusi bernegara.

Di kala perekonomian kian menjurus ke arah liberalisme dan kapitalisme, semakin bebas dan mengandalkan kekuatan modal, dan semakin banyaknya para konglomerat memegang kendali perekonomian (termasuk bidang politik dan lainnya), tidak sedikit yang menoleh ke UUD NRI Tahun 1945. Khususnya, akibat Perubahan UUD 1945. Mulai dari ahli, setengah ahli, maupun yang ahli-ahliannya menuding bila perkembangan arah ekonomi demikian itu disebabkan oleh Perubahan UUD 1945. Tudingan itu khususnya di arahkan pada munculnya ayat 4 dan ayat 5 pada Pasal 33 Perubahan UUD 1945. Khususnya lagi masuknya kata efisiensi. Kata inilah yang menyebabkan ekonomi berkembang ke arah yang efisien, yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan. Merujuk pada KBBI, efisien artinya tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu. Arti lainnya adalah tidak membuang-buang waktu, sangkil, dan beberapa pengertian lain.

Di kala dilakukan pengkajian, sesungguhnya tak ada yang salah akan kata efisien tersebut. Lagi pula,

di ayat 4 Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 kata efisiensi itu juga dibarengi kata berkeadilan. Menjadi efisiensi berkeadilan. Di kala pembahasannya dulu kata ini banyak menyita waktu. Contoh nyata akan hal itu, jikalau sebuah industri ingin melakukan efisiensi misalnya menggantikan tenaga manusia dengan robot, maka tenaga kerja manusia yang digantikan itu juga harus diperhatikan. Jangan hanya sekedar efisien.

Lebih daripada itu, rumusan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar dari penyusunan perekonomian nasional. Masih perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya (sesuai dengan bunyi ayat 5). Dalam hal inilah perlu dipelihara arah atau dasar yang dirumuskan di UUD NRI Tahun 1945. Jangan sampai semangat Pancasila di Pembukaan dan dituangkan di dalam Pasal Pasal UUD NRI Tahun 1945 tidak dipelihara dan dijaga melalui peraturan perundangundangan. Demikian juga di dalam pelaksanaannya.

Dalam hal inilah fungsinya pemerintah (Presiden RI) bersama DPR (dan DPD). Khususnya di dalam menyusun Undang Undang. Sementara itu, DPR (dan DPD) sekaligus menyusun penganggaran negara serta mengawasi jalannya pemerintahan negara. Tidak bisa dilupakan kehadiran BPK dalam memeriksa penganggaran negara (sekaligus juga arah penyelenggaraan negara). DPR, DPD, dan BPK memiliki posisi penting dalam mengawasi penyelenggaraan negara, khususnya dalam memelihara perekonomian nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Artinya Ekonomi Pancasila itu tidak sekedar jargon. Akan tetapi perekonomian yang selalu memelihara keseluruhan sila-sila dari Pancasila.

Di kala banyak yang mempersoalkan ketiadaan GBHN sebagai penuntun arah pembangunan nasional (di mana di dalamnya tercakup perekonomian nasional), maka sesungguhnya bisa berpaling ke perencanaan pembangunan nasional serta arah pembangunan jangka panjang, sebagaimana yang tercermin melalui UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Jika materi kedua UU ini dianggap tidak memadai, maka tugas Presiden (dan DPR) lah yang menyempurnakannya. Sekaligus pula

memasukkan materi yang disampaikan pada masa kampanye. Presiden memiliki peran dan posisi strategis dalam memberi arah dan mengembangkan perekonomian nasional. Bukan hanya menjaga arahnya agar tetap dalam kerangka perekonomian yang berlandaskan Pancasila, akan tetapi juga mengisi dan melaksanakannya. Presiden RI setiap tahun menyusun dan menjalankan APBN, yang sering disebut sebagai pemacu perekonomian nasional. Betapapun APBN itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan perekonomian nasional.

Melalui APBN tiba saatnya melaksanakan perekonomian nasional dalam setahun yang sedang berjalan. Di tahun mendatang ini (tahun 2019) misalnya, akan banyak tantangan bidang perekonomian yang dihadapi. Apakah karena faktor internasional, misalnya perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dengan China, serta interaksi perekonomian dunia lainnya. Juga naik turunnya harga minyak bumi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai persoalan nyata lainnya. Sementara persoalan di dalam negeri juga tak kurang kompleksnya. Wajah perekonomian nasional belum mengalami banyak perubahan, termasuk banyak kebutuhan yang diimpor dan terjadinya defisit anggaran, dan sejenisnya. Sejalan dengan itu masuk pula tahun politik dengan Pemilu yang sulit diperkirakan. Akibatnya tidak sedikit ahli ekonomi yang membuat perkiraan yang pesimistis.

Bagaimanapun membangun dan mengembangkan perekonomian nasional itu merupakan kerja bersama. Bahkan mencakup keseluruhan unsur bangsa. Mulai dari lembaga lembaga negara, pemerintah (pusat maupun daerah), pelaku ekonomi (baik BUMN, swasta, maupun koperasi), organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui kerjasama yang baik di antara sesama unsur bangsa inilah yang dapat menjaga perkembangan perekonomian nasional kearah yang diharapkan. Yakni sumbangan perekonomian nasional bagi tujuan bernegara, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. □

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019

Ekonomi Indonesia Masih Tetap Tumbuh



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Perekonomian Indonesia pada 2019 diprediksi akan tetap tumbuh meskipun diterjang ketidakpastian kondisi ekonomi global. Ekonomi Indonesia masih dianggap rentan terhadap sentimen eksternal.

PEMERINTAH memandang optimistis ekonomi Indonesia pada 2019. Ini terlihat dalam asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bisa lebih tinggi dari angka yang dipatok dalam ABPN. Pada 2018, Darmin memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,2%. Angka ini meleset dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2018 yang ditetapkan sebesar 5,4%.

“Tahun depan (2019-*red*) bisa tinggi sedikit dari tahun ini, mencapai 5,3% - 5,4%,” kata Darmin di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (28/12/2018). Apa yang mendorong keyakinan Menko Perekonomian? Menurut Darmin, konsumsi masih menjadi motor penggerak utama perekonomian. Tahun politik (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) secara serentak akan meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Ini akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019.

Namun, sejumlah lembaga keuangan dan pengamat ekonomi justru berbeda perkiraan dengan pemerintah Indonesia. Bila pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi 2019 lebih baik dari 2018, sejumlah



lembaga lokal dan internasional serta pengamat ekonomi justru menilai pemerintah tak akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Sebut saja, Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Kedua lembaga internasional ini menilai, pemerintah sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3%. Lembaga pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P, juga memprediksi perekonomian Indonesia 2019 hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan Moody's hanya memperkirakan 4,8% lebih rendah dari 2018. Di mata lembaga



internasional itu Indonesia masih dianggap rentan terhadap sentimen eksternal.

Dari dalam negeri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 hanya akan mencapai 5,2%. Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga tidak yakin pertumbuhan ekonomi 2019 akan sesuai target pemerintah. Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,2%.

Ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dan penurunan atau pelambatan ekonomi kedua negara, menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejumlah hal lain masih akan membayangi kondisi perekonomian dalam negeri.

Dari kalangan anggota dewan, anggota DPR yang juga anggota MPR dari Fraksi PDI

Perjuangan Eva Kusuma Sundari meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai target sesuai asumsi makro dalam APBN 2019. Bahkan, anggota Komisi XI DPR membidangi masalah keuangan ini yakin, pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. "Insya Allah ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Malah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 5,4%," katanya kepada *Majelis*.

Apa yang mendasari keyakinan Eva sehingga ekonomi Indonesia tetap tumbuh adalah adanya reformasi fiskal dan upaya Bank Indonesia menstabilkan nilai rupiah, serta inflasi dapat dikendalikan. Selain itu, *investment grade* ikut membaik karena adanya terobosan-terobosan dalam perizinan. Apalagi untuk pertama kali Kementerian Keuangan berhasil mencapai 100% penerimaan pajak. Indikator ekonomi

Indonesia masih baik.

Di sisi lain, pemerintah bisa mengelola peluang dari perkembangan ekonomi global. Dari eksternal, ekonomi dunia saat ini masih didominasi Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Meski terjadi pelambatan ekonomi, seperti dialami AS dan Tiongkok, ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh sebesar 5,4%. Indonesia tetap menjalankan perbaikan ekonomi. "Ini bisa dilihat dari indeks kerapuhan perekonomian dunia," ujar mantan aktivis, LSM Asia Foundation dan Steering Committee untuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA).

Eva mengungkapkan, sektor industri, khususnya ekonomi kreatif, menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Sektor pariwisata memberi kontribusi sebesar 5% dalam PDB Indonesia. Ini menjadi tanda-tanda



Eva Kusuma Sundari

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bagus. Kita juga mengantisipasi peluang revolusi industri 4.0,” ujar dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Airlangga ini.

Selain itu, Eva menambahkan, konsumsi tumbuh di atas 5% dan *government spending* di atas 51%. Ini menunjukkan daya beli masyarakat masih baik. Apalagi kredit bermasalah (NPL – non performing loan) masih di bawah 5%. “Artinya, masih ada kemampuan untuk membayar kredit (utang),” kata mantan staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas pada 2015 ini.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, juga memiliki optimisme yang sama. Misbakhun berkeyakinan ekonomi Indonesia pada 2019 masih mengalami pertumbuhan. “Saat ini kisarannya 5,1 hingga 5,2%,” katanya kepada *Majelis*. Berbeda dengan Eva Kusuma Sundari yang meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN, Misbakhun justru menyebutkan angka yang lebih moderat (5,2%), sama seperti prediksi lembaga keuangan internasional.

Misbakhun mengharapkan, *spending* pemerintah pada 2019 ini lebih besar untuk memperkuat struktur ekonomi di tingkat bawah. “Kita harapkan pemerintah memberikan alokasi yang sangat besar untuk mengatasi kemiskinan dan mengalokasikan dana pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, program pemerintah pada 2019 bisa mengatasi isu kesenjangan yang sangat kuat sekarang ini,” harap pria kelahiran

Pasuruan ini.

Menurut anggota Komisi XI ini, pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pilihan pemerintah untuk membangun infrastruktur adalah pilihan terbaik yang nanti menjadi basis dan pondasi ekonomi Indonesia ke depan. Pemerintah juga memperkuat sektor perpajakan, cukai, pabean, dan penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

“Saya yakin ekonomi Indonesia akan tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pemerintah harus mengatur strategi untuk meningkatkan *tax ratio* dan mereformasi bidang pajak, serta membuat tarif pajak lebih kompetitif sehingga bisa menarik investasi asing dengan fasilitas perpajakan yang lebih

akomodatif,” jelasnya.

Berbeda dengan Eva Kusuma Sundari dan Misbakhun, anggota MPR yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini justru melihat kondisi perekonomian Indonesia masih memprihatinkan. Dalam catatan akhir tahun Fraksi PKS, Ketua Fraksi PKS DPR ini memberi sejumlah catatan kinerja pemerintah sepanjang 2018, khususnya di bidang ekonomi. “Fraksi PKS DPR mencatat, kondisi perekonomian sepanjang 2018 hingga tutup tahun, bahkan selama empat tahun belakangan ini, stagnan di angka 5%,” kata Jazuli dalam keterangannya pada Rabu (2/1/2019).

Menurut Jazuli, saat ini beban utang negara semakin besar. Pada Oktober 2018, utang negara sudah mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun. Janji-janji pemerintah mengangkat perekonomian juga belum terlihat realisasinya. “APBN kita belum cukup sehat. Keseimbangan primer masih negatif. Beban utang kita besar dan memberatkan keuangan negara. Pun untuk membayar bunga utang kita harus gunakan utang. Istilahnya gali lubang tutup lubang. Beratnya perekonomian ini berkelindan dengan tingginya angka pengangguran,” katanya.

Namun, Eva Kusuma dan Misbakhun berpendapat, posisi utang Indonesia belum memberatkan keuangan negara. Eva menyebutkan, sesuai UU Keuangan Negara *debt service ratio* (DSR) tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Saat ini, DSR Indonesia masih di sekitar 30% dari PDB. Di sisi lain, FDI (For-



Jazuli Juwaini

eign Direct Investment) memperlihatkan tren positif. Begitu pula, devisa yang dimiliki Indonesia masih cukup besar. “Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi BPK memberi status opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada pemerintah pusat. Tapi, kita tetap waspada (dengan posisi utang Indonesia),” pesannya.

Misbakhun juga mengatakan, utang pemerintah tidak memberatkan APBN. “Sampai saat ini kita masih bisa mengelola risiko utang secara fiskal. Ratio utang masih sangat aman. Pemerintah bisa mengelola utang dengan cukup baik. *Balancing primer* kita menuju ke arah positif. Artinya, pemerintah bisa mengurangi gali lubang tutup lubang,” katanya.

Tantangan

Jazuli mengungkapkan catatan lainnya yang menjadi tantangan ekonomi Indonesia pada 2019. Catatan itu, antara lain angka kemiskinan, lapangan pekerjaan, kondisi pertanian, persoalan BPJS Kesehatan. Menurut Jazuli, angka kemiskinan Indonesia belum bergeser jauh. Begitu juga janji presiden untuk membuka 10 juta lapangan kerja belum terwujud.

“Angka kemiskinan juga tidak bergeser jauh. Janji presiden membuka 10 juta lapangan kerja baru nyatanya jauh dari tercapai. Tidak hanya itu, kondisi pertanian Indonesia selama empat tahun terakhir juga semakin miris. Setiap tahun terjadi penyusutan lahan rata-rata 150 – 200 ribu hektare,” paparnya.

Jika kondisi pertanian Indonesia ini dibiarkan, sambung Jazuli, maka 38 tahun lagi lahan pertanian Indonesia akan habis. Akibat penyusutan lahan ini, setiap tahun produksi beras berkurang 3 juta ton. Dengan realitas tersebut, kecenderungan impor beras akan semakin tinggi. Kecenderungan impor ini merambah ke komoditas pertanian lain, seperti gula, garam, bawang merah, juga gandum.

Belum lagi jaminan negara atas kesehatan rakyat. Tunggakan pembayaran iuran BPJS hingga kini masih menjadi persoalan. “Tunggakan pembayaran iuran BPJS kepada rumah sakit membawa dampak ikutan yang menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan masyarakat. Padahal, tiap tahun subsidi APBN terus meningkat

karena BPJS selalu defisit,” imbuhnya.

Selain persoalan ekonomi yang disampaikan Fraksi PKS, masih ada juga persoalan lainnya. Misalnya, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik masih menghantui ekonomi Indonesia. Pemerintah tampaknya bertahan untuk tidak menaikkan harga BBM terkait dengan tahun politik. Hajatan demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi ekonomi.

Soal kenaikan harga BBM, Eva Kusuma Sundari mengatakan kenaikan harga BBM dan tarif listrik tidak akan mengganggu

“Bicara BBM tidak hanya bicara kenaikan harga minyak. Tidak hanya tentang kerugian tapi juga keuntungan bagi kita, karena kenaikan harga minyak dunia bisa meningkatkan penerimaan negara. Nilai (minyak mentah) yang kita jual lebih besar dibandingkan nilai yang kita impor. Ini menjadi penerimaan bukan pajak kita,” sambungnya.

Lalu bagaimana dengan situasi politik di tahun 2019? Eva Kusuma Sundari melihat, situasi politik menjelang Pileg dan Pilpres tidak akan memengaruhi ekonomi Indonesia pada 2019. “Insya Allah tidak akan berpengaruh. Masyarakat Indonesia sudah cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi.



Muhammad Misbakhun

ekonomi Indonesia. Sebab, pemerintah sudah melaksanakan reformasi subsidi secara bertahap sejak 2014. Artinya, penerima subsidi BBM dan tarif listrik tetap diproteksi. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik dikompensasi dengan skema perlindungan sosial kepada masyarakat bawah.

Menurut pendapat Misbakhun, pemerintah telah melakukan langkah terbaik dengan tidak menaikkan harga BBM dan tarif listrik. Harga minyak dunia masih tidak stabil. Harga BBM dan tarif listrik tidak naik merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah. Tapi risiko kenaikan harga BBM itu sudah diperhitungkan dari sisi fiskal dalam APBN. “Sehingga berapapun harga minyak dunia, pemerintah masih bisa melakukan exercise di bidang fiskal, sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM,” jelasnya.

Demokrasi malah menguatkan ekonomi Indonesia. Pileg dan Pilpres adalah hajatan lima tahunan. Ini bukan segala-galanya,” ujarnya.

Sebaliknya, Misbakhun melihat, kondisi politik menjelang Pileg dan Pilpres secara serentak akan memberi dampak bagi ekonomi Indonesia. Ada dampak ketidakpastian dari sisi politik. Faktor ketidakpastian ini menjadi pertimbangan para investor, pemilik modal, dan pelaku ekonomi. Pasalnya, mereka tidak ingin investasi berisiko besar.

Ketidakpastian ini hanya pada saat menjelang Pemilu. Setelah mengetahui hasil Pemilu, saya yakin para investor, pemilik modal, dan pelaku usaha bisa kembali menyesuaikan dengan perubahan politik yang terjadi. Mereka bisa menyesuaikan secara ekonomi dan politik setelah melihat pemenang Pemilu,” katanya. □

Tim Majelis

Pertumbuhan Ekonomi dari Masa ke Masa

Setiap pemerintahan (presiden) tentu masing-masing mempunyai kebijakan berbeda terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

BICARA tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah bicara tentang proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara. Perubahan itu dilakukan secara berkesinambungan dalam satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian, seperti dalam wujud kenaikan pendapatan nasional, gross national product (GNP), atau produk domestik bruto (PDB). Artinya, laju pertumbuhan ekonomi itu

tersendiri, yaitu terjadinya kekacauan ekonomi di Indonesia. Dia mengabaikan ekonomi negara. Pengeluaran besar-besaran bukan untuk pembangunan, melainkan untuk kebutuhan militer, proyek mercusuar, dan dana politik lainnya. Pada masa itu inflasi mencapai 600% per tahun (pada 1966). APBN mengalami defisit yang sangat besar dibanding penerimaan negara. Begitu juga neraca pembayaran mengalami defisit dan nilai tukar rupiah tidak stabil.

perekonomian dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, tahap penyelamatan untuk mencegah agar kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan Orde Lama tidak menjadi lebih buruk lagi. *Kedua*, menstabilkan dan merehabilitasi ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan infrastruktur ekonomi. *Ketiga*, melakukan pembangunan ekonomi.

Awal pemerintahan Orde Baru disebut juga sebagai titik balik perekonomian Indonesia. Pemerintah di bawah Soeharto benar-



Soekarno

ditunjukkan melalui kenaikan PDB. Bila pertumbuhan ekonomi baik maka dapat dikatakan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi setiap periode presiden yang berkuasa di Indonesia? Setiap presiden tentu mempunyai kebijakan berbeda terkait pertumbuhan ekonomi. Kita mulai dari pertumbuhan pada masa Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno. Presiden Soekarno atau Bung Karno bersikap anti bantuan asing. Dia menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri atau yang disebut "Berdikari". Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia.

Sikap Soekarno yang anti bantuan asing pada akhirnya membawa konsekuensi



Soeharto

BPS mencatat pada 1965 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 1,08%. Selama kurun waktu 1960 – 1965 ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 2%. Kepercayaan masyarakat pada Orde Lama pun menurun karena rakyat tidak mendapat kesejahteraan dalam ekonomi.

Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto mulai dengan keterpurukan ekonomi yang ditinggalkan Orde Lama. Soeharto kemudian mengubah slogan "Politik sebagai Panglima" menjadi "Ekonomi sebagai Panglima," karena Soeharto mengutamakan pembangunan ekonomi. Jika Soekarno menolak dan menutup diri dari dunia Barat, maka Soeharto malah menarik modal dari negara-negara barat. Soeharto banyak mengirim delegasi untuk mendapatkan pinjaman dari negara-negara Barat, termasuk IMF.

Langkah Soeharto dalam menyelamatkan



BJ Habibie

benar berusaha keras untuk mengangkat perekonomian Indonesia dari keterpurukan. Tahun 1966 – 1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi, mulai dari menurunkan inflasi hingga menstabilkan harga. Periode 1966 – 1973 menjadi tahun transisi ekonomi. Langkah awal, Soeharto mengambil kebijakan mengatasi hiperinflasi. Laju pertumbuhan ekonomi mulai tampak.

Usaha perbaikan ekonomi itu terlihat sejak 1968. Pertumbuhan ekonomi melambung ke level 10,91% pada 1968. Pengendalian inflasi pun terlihat berjalan baik. BPS mencatat inflasi turun drastis menjadi 9,86% pada awal Pelita I pada 1969. Sejak 1960, PDB didominasi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Perkembangan berikutnya, pertumbuhan ekonomi era Presiden Soeharto konsisten di kisaran 5 hingga 9%. Pertumbuhan di bawah



KH Abdurrahman Wahid

5% hanya terjadi pada 1982 dan 1983, yaitu 2,2% dan 4,2%. Sementara itu, krisis minyak dunia (oil boom) yang mulai terjadi pada 1973 sangat menguntungkan Indonesia. Harga minyak dunia membuat ekspor migas Indonesia meningkat dari US\$ 1,61 miliar pada 1973 menjadi US\$ 7,44 miliar pada 1978. Puncaknya pada 1983, nilai ekspor migas mencapai US\$ 16,14 miliar.

Era Reformasi

Krisis ekonomi global yang bermula pada 1997 dan karut marutnya politik dalam negeri membuat Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. BJ Habibie yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden kemudian naik menggantikan Soeharto. Pada tahun pertama BJ Habibie menjadi presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun bebas menjadi minus 13,31%. Kondisi tersebut turut dipengaruhi krisis nilai tukar yang membuat rupiah terdepresiasi dari Rp 3.633 pada Juli 1997 menjadi Rp 15.100 pada Mei 1998.

Pada tahun kedua, Habibie mengambil berbagai langkah perbaikan regulasi. Dari pertumbuhan ekonomi minus, Habibie mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,79% pada 1999. BJ Habibie pun menyelenggarakan Pemilu pertama di era reformasi. Melalui Pemilu, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur naik menjadi presiden pada 1999.

Pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Gus Dur mulai kembali positif. Pada tahun pertama, Gus Dur mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92% pada tahun 2000. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi turun menjadi 3,64%. Sayangnya, di bawah kepemimpinan Gus Dur, Tim Ekonomi tidak berjalan dengan baik dan kompak. Selain itu, pada masa itu, Indonesia memiliki hubungan buruk dengan IMF.

Pada pertengahan 2001, Gus Dur di-*impeachment* atau dimakzulkan. Wakil Presiden



Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri naik menggantikan Gus Dur.

Pemerintahan era Megawati cukup berhasil melakukan stabilisasi ekonomi. Ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren naik. Secara berturut-turut, pertumbuhan ekonomi dari 4,5% pada tahun 2002 naik menjadi 4,78% pada 2003, dan naik lagi menjadi 5,03% pada 2004. Industri pengolahan semakin berkembang di era Megawati. Selama tiga tahun, PDB industri tersebut selalu mencapai kisaran Rp 400 triliun sehingga menjadi sektor usaha penyumbang terbesar PDB Indonesia.

Megawati kemudian digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung pada 2004. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi sebelumnya. SBY cukup baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5 hingga 6%. Pencapaian terendah terjadi pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,63%.

Kondisi pada 2009 tersebut dipengaruhi



Joko Widodo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Susilo Bambang Yudhoyono

tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah. Tetapi seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global sepanjang 2008 – 2009, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5% - 6% pada 2010 dan meningkat menjadi 6% - 6,5% pada 2011.

Salah satu sebab utama ekonomi Indonesia sukses pada masa pemerintahan SBY adalah adanya kebijakan pemerintah yang efektif dan fokus pada disiplin fiskal dan pengurangan utang negara. Namun, pertumbuhan makro ekonomi Indonesia yang pesat pada masa itu belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Setelah pemerintahan SBY selama dua periode (2004 – 2009 dan 2009 – 2014) selesai, Joko Widodo yang sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, terpilih menjadi presiden untuk periode 2014 – 2019. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi berkisar di angka 5%. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,9%. Tahun-tahun berikutnya, angka pertumbuhan ekonomi tidak naik terlalu signifikan. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% dan pada 2017 sebesar 5,07%.

Ketika kampanye pemilihan presiden 2014, Joko Widodo menjanjikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7%. Bahkan target pertumbuhan ekonomi itu masuk dalam RPJMN tahun 2014 – 2019. Namun, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, belum satu kali pun pemerintah berhasil merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 7%. Pertumbuhan ekonomi mentok di level 5%. Mimpi pemerintahan kabinet kerja untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 7% berujung pada kritikan. □

BSC



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Arif Budimanta Wakil Ketua KEIN

Ekonomi Indonesia Akan Tetap Tumbuh

BAGAIMANA wajah ekonomi Indonesia pada tahun 2019? Salah satu indikator untuk melihat wajah ekonomi Indonesia adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Sejumlah pengamat dan ekonom memprediksi perekonomian Indonesia pada 2019 ini akan tetap tumbuh atau masih akan sama dengan tahun 2018. Namun, banyak faktor yang ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu, misalnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Di lingkup internal, tantangan ekonomi domestik ditandai dengan persoalan depresiasi rupiah seiring defisitnya neraca transaksi berjalan. Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan tarif listrik juga menghantui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019. Untuk menjawab persoalan ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Dr. Ir. Arif Budimanta. Berikut wawancara dengan Arif Budimanta yang juga anggota Lembaga Pengkajian MPR RI.

Menurut Bapak bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2019? Apakah ekonomi Indonesia tetap tumbuh atau menurun?

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 dari beberapa lembaga internasional,

seperti IMF, World Bank, Fitch dan S&P telah sampai pada konsensus bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5%. Sementara itu, pemerintah sendiri melalui APBN 2019 telah mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Artinya, dapat ditarik kesimpulan jika perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh. Pemerintah optimistis untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Terlebih jika kondisi global mulai membaik sehingga akan memberikan kepastian negara-negara dalam menetapkan kebijakan, sekaligus akan menurunkan resiko dari ketidakpastian global. Namun demikian, kualitas pembangunan nasional akan menjadi fokus yang utama pemerintahan Joko Widodo. Sehingga, yang dituju bukan semata-mata pertumbuhan yang tinggi saja, melainkan juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi dan merata.

Apa yang mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh, padahal ekonomi global dalam ketidakpastian dan masih terjadi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga, yaitu berkontribusi besar sekitar 55% terhadap PDB. Komponen ini juga tercatat tumbuh paling besar selama

beberapa kuartal di 2018. Akan tetapi, struktur yang demikian ini sedang dibenahi dan diupayakan agar berubah, sehingga penopang kegiatan ekonomi Indonesia ke depan adalah kegiatan ekonomi yang berbasis produksi. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembenahan masalah investasi. Hasilnya, saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan predikat "layak investasi" dari beberapa institusi internasional yang kredibel, seperti Moody's, Fitch, dan Standard & Poor's.

Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah terus melakukan perbaikan iklim investasi seperti relaksasi daftar negatif investasi sebagai upaya mendorong kegiatan ekonomi nasional. Di samping itu, untuk mendorong kegiatan industri nasional, KEIN juga telah merekomendasikan 4 industri utama sebagai *roadmap* industrialisasi ke depan, terdiri dari industri agrikultur, maritim, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak berhenti di situ, saat ini pemerintah juga telah memiliki peta jalan bagi industrialisasi 4.0 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memajukan industri nasional.

Untuk ekonomi Indonesia, sektor apa yang menyumbang pertumbuhan ekonomi? Padahal daya beli masyarakat masih lemah?

Sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini mampu tumbuh 4,33% dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,91% pada kuartal III tahun 2018. Selanjutnya, pada periode yang sama, sektor perdagangan dan pertanian memberikan kontribusi yang besar pula terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,69% dan 0,49%. Bagaimanapun, lapangan usaha jasa lainnya mampu tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 9,19%, yang diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 8,98% dan jasa perusahaan sebesar 8,67%. Diharapkan lapangan usaha ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan hasil pembangunan infrastruktur yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah.

Depresiasi rupiah (kurs rupiah terhadap dolar AS) akan memengaruhi ekonomi Indonesia, apalagi Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Bagaimana menurut Bapak?

Pelemahan nilai mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara sebagai dampak dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Pelemahan ini akan menjadi peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian suatu Negara, jika suatu negara mampu memaksimalkan kondisi ini, seperti peningkatan ekspor dalam perdagangan. Akan tetapi, hal ini akan menjadi problematika tersendiri jika suatu negara tidak bisa memaksimalkan kondisi pelemahan ini, dan mengatur kondisi perekonomian baik fiskal maupun moneter.

Sementara itu untuk menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan likuiditas, serta efisiensi di pasar valuta asing. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan restrukturisasi anggaran, khususnya menahan pengeluaran belanja pada pos-pos tertentu. Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus mendorong konektivitas produk manufaktur kepada pasar, seperti mencari pasar baru agar Indonesia tidak terpaku hanya pada negara-negara utama dan *established*. Dengan ini diharapkan persoalan defisit neraca perdagangan dapat terselesaikan.

Pada tahun 2018 ini pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Bagaimana pengaruhnya pada ekonomi Indonesia pada 2019 jika terjadi kenaikan harga BBM dan tarif listrik?

Harga BBM dan tarif listrik mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam proses produksi. Kenaikan harga pada komoditas ini akan berdampak langsung terhadap daya saing produk. Maraknya produk impor murah menjadi tantangan besar lainnya bagi pemerintah. Terlebih, konsumsi BBM yang tinggi akan mendorong kegiatan impor dan berdampak pada neraca perdagangan. Berdasar pada APBN 2019, pemerintah mengansumsikan harga minyak (ICP)



sebesar US\$ 70 per barel. Dengan mengacu tahun sebelumnya, rata-rata harga minyak mentah dunia 2017 tercatat sebesar US\$ 55 per barel, lebih tinggi dibandingkan 2016, sebesar US\$ 45 per barel. Artinya, dinamika harga minyak dunia telah disesuaikan dengan asumsi APBN kita, sehingga kenaikan harga yang mungkin terjadi dapat diantisipasi terlebih dahulu. Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan upaya untuk mengelola keuangan Negara, seperti upaya mengurangi impor BBM melalui kebijakan B20 sebagai upaya sekaligus mengurangi defisit. Akan tetapi, pelaksanaan mandatori B20 ini masih mengalami hambatan, salah satunya pemenuhan pasokan bahan baku biodiesel.

Apakah situasi politik menjelang

pemilu legislatif dan pemilu presiden juga memengaruhi ekonomi Indonesia pada 2019?

Berdasarkan pengalaman yang ada, event politik, terutama Pileg dan Pilpres, turut serta dalam mendorong geliat perekonomian nasional. Belanja pemerintah cenderung meningkat pada saat pesta demokrasi berlangsung, seperti yang terjadi pada Pilpres 2009 dan 2014. Hal tersebut akan mendorong perputaran uang, yang artinya akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kondisi ini juga mampu berpotensi menciptakan perilaku *wait and see* bagi pelaku usaha dan investor swasta selama masa pemilihan presiden dan legislatif ini. Sehingga, kestabilan tensi politik juga menjadi salah satu prasyarat agar event ini mampu memberikan pengaruh positif pada perekonomian.

Posisi utang Indonesia juga memberatkan APBN. Bagaimana dikaitkan dengan proyeksi ekonomi Indonesia 2019?

Permasalahan utang menjadi kendala bagi suatu negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bagaimanapun, pengelolaan utang negara telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 pasal 12 ayat 3 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Saat ini, pemerintah belum pernah melampaui kedua indikator tersebut. Berarti pengelolaan keuangan negara masih dan tetap konsisten terhadap konstitusi.

Adapun pemanfaatan utang yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah untuk kegiatan produktif. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, serta menghadirkan pelayanan yang prima di bidang kesehatan. Hal tersebut ditunjukkan alokasi anggaran yang meningkat signifikan pada pos-pos tersebut. Akan tetapi, kondisi ini memang mungkin tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya pada 2019, tapi akan bermanfaat di tahun-tahun akan datang. Dengan kata lain, pengelolaan utang telah sesuai dengan konstitusi dan pemanfaatan utang digunakan sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. □

Politik Tahun 2019

Pemilu Panas Karena Aturan Ketat

Pada 2019 konstalasi politik Indonesia masih dihangatkan oleh peristiwa pesta demokrasi, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Suasana panas mulai terasa, dengan munculnya berbagai isu lewat media sosial, seperti facebook, whatsapp, twitter, dan media sosial lainnya. Himbauan terus dilakukan agar situasi tidak mengarah ke perpecahan. Salah satu yang harus dilakukan, jangan menyebar isu-isu hoax. Dan, untuk meraih kemenangan harus dengan cara-cara yang bermartabat.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMILU Presiden (Pilpres) di 2019 merupakan gelaran pesta demokrasi yang paling dinamis dibanding Pemilu Legislatif, Pemilu memilih anggota DPD, dan Pemilu Kepala Daerah. Tak hanya dinamis, Pilpres di tahun 2019 ini sepertinya kembali mengulangi pemilu di tahun 2014, di mana calon presiden yang berkontestasi masih sama, yakni: Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Suasana Pemilu Presiden pada dua kesempatan kali ini sepertinya pemilih berada dalam tempurung yang sama, yakni dua kelompok masyarakat terbelah. Pestinya, dua kubu saling berhadapan. Kondisi yang demikianlah membuat posisi mereka saling unjuk muka. Ini yang membuat suasana panas terus merundung dunia politik bangsa ini, apalagi di saat tahun-tahun politik seperti sekarang ini, apalagi masa kampanye telah dimulai.

Apakah Pilpres 2019 sama dengan Pilpres 2014? Anggota MPR dari Fraksi PKB, Saiful Bahri Anshori, mengatakan: tidak. Ia mem-

bandingkan pada 2014, pasangan yang berkompetisi adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sedang dalam Pilpres tahun ini dua pasang calon yang saling berhadapan adalah Joko Widodo-Ma'ruf Amien dengan Prabowo



Saiful Bahri Anshori

Subianto-Sandiaga Uno.

Munculnya calon yang ada hanya itu-itulah saja, menurut mantan Ketua Umum PBPMII ini, disebabkan oleh *Presidential Threshold* yang sangat tinggi, yakni 20% suara di DPR dan atau 25% suara sah di nasional. "Sebenarnya kita tidak kekurangan kader bangsa", ujarnya. Ia pun menyebut beberapa nama, seperti Muhaimin Iskandar, Agus Harimurty Yudhoyono, atau lainnya sebagai kader potensial bisa maju dalam Pilpres, bila tidak ada aturan yang ketat.

Apa yang disampaikan oleh Saiful Bahri juga di-iya-kan oleh anggota MPR dari Kelompok DPD, Bambang Sadono. Menurut Bambang, bangsa ini memiliki banyak pemimpin, namun karena sistemnya yang demikian ketat sehingga tidak memungkinkan menyeleksi lebih banyak pemimpin yang ada. "Telah terjadi politisasi perundangan-undangan yang membatasi tampilnya calon pemimpin yang banyak", ujar pria asal Jawa Tengah itu.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi. Dia mengatakan, Indonesia tidak kekurangan kader bangsa. Calon pemimpin nasional banyak, namun karena sistem pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden inilah yang membatasi, membelenggu, menghalangi munculnya tunas-tunas bangsa. Berlakunya *Presidential Threshold* yang memberatkan memangkas lahirnya calon pemimpin nasional. Untuk itu, mantan Ketua PBHMI itu menegaskan, aturan yang ada harus diubah. "Misal, *Presidential Threshold* diturunkan menjadi 5%", ungkapnya. Kalau ini dilakukan maka partai politik akan semakin banyak memunculkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Alumni Universitas Udayana, Bali, itu lebih lanjut menuturkan, jika usaha untuk merevisi dan mengurangi aturan *Presidential Threshold* tidak berhasil maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk membuka calon perseorangan/ independen sebagai calon Presiden.

Menjelang Pemilu 2019, dinamika masyarakat dalam dunia politik sangat tinggi, bahkan melewati ambang batas nilai-nilai yang dianut bangsa ini, yakni penuh dengan tatakrama dan saling menghargai. Memanasnya situasi politik bisa jadi akibat dari dampak buruk penggunaan teknologi informasi yang saat ini populer di masyarakat, seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, dan media sosial. Agar situasi yang ada tidak mengarah pada perpecahan bangsa, Saiful Bahri mengharap agar kita tidak menyebarkan isu-isu *hoax*. "Jangan melembagakan *hoax*", tutur alumni UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, itu.

Menghadapi berbagai informasi yang berseliweran, Bambang Sadono menyebut, pemimpin boleh saja mengatur dan mereka-yasa rakyat dengan sistem komunikasi yang serba langsung, seperti sekarang ini. Namun, kemauan rakyat sulit ditebak. Untuk itu, dia berharap, masyarakat menghadapi berbagai isu yang ada tetap tenang dan memilih pemimpin sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Soal dampak media sosial, Viva Yoga berpendapat lain. Menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu mengubah pilihan politik akibat media sosial dampaknya kecil. Alasannya, karena kampanye melalui media



Viva Yoga Mauladi

ini efektivitasnya rendah. Media sosial hanya ramai di perkotaan. Menghadapi *hoax*, dia menyarankan validasi akun-akun media sosial harus menjadi pertimbangan dalam menilai akurasi informasi dan berita politik. "Sekarang banyak terjadi, memviralkan informasi melalui buzer dan hantu-hantu media sosial", tuturnya.

Pada Pemilu 2019, dia yakin migrasi pemilih tradisional atau pemilih ideologis ada, tetapi prosentasenya kecil. "Mereka bermigrasi karena ada faktor yang penting, sehingga mengubah pilihan para pemilih tradisional", ungkapnya. Justru migrasi akan terjadi di pemilih yang memiliki kategori pemilih transaksional. "Mereka ikut pergerakan uang. Di mana ada uang, di situ terjadi migrasi pilihan", tuturnya.

Ketatnya pemilu di 2019 tidak hanya pertarungan ulang calon Presiden, namun juga tingginya *Parliamentary Threshold*. Tingginya *Parliamentary Threshold* yang mencapai 4% muncul perkiraan hanya ada lima partai politik yang bisa lolos ke Senayan. Saiful Bahri mengakui, jumlah partai yang akan duduk di Senayan berkurang. Namun



Bambang Sadono

dia optimistis, PKB bisa melompati ambang batas yang telah ditentukan. Rahasia agar partai politik tak terdegradasi adalah bisa merawat konstituennya. "Bila anggota DPR bisa merawat konstituennya maka membuat citranya bagus dan menyebabkan lolos ke Senayan", ucapnya.

Viva Yoga pun juga optimistis PAN akan lolos ke Senayan di 2019. Dia mengungkapkan, meski sejak Pemilu 2004 hasil lembaga survei selalu menempatkan PAN di barisan parpol yang memiliki elektabilitas rendah, namun kenyataannya di Pemilu 2004, 2009, dan 2014, PAN tidak kurang dari 7%. Menurutnya, ada variabel yang tidak bisa difoto atau luput dari pengamatan para lembaga survei. *Pertama*, dinamika masyarakat satu minggu menjelang hari H. *Kedua*, gerakan para caleg. *Ketiga*, optimalisasi mesin parpol. *Keempat*, peta perubahan dukungan pemilih. "Biasanya dalam setiap pemilu akan ada partai politik yang tidak lolos ke Senayan", ungkapnya. Nanti, selepas Pemilu, lihat partai politik mana saja yang tidak lolos.

Bila partai politik pasang kuda-kuda menghadapi Pemilu Legislatif maka nasib DPD, menurut Bambang Sadono, tergantung pada kehendak rakyat di mana DPD akan diposisikan.

Dalam hajatan Pemilu 2019, Viva Yoga mengajak semua, untuk: *Pertama*, pemilu sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara rutin 5 tahun sekali harus diarahkan pada penguatan kelembagaan demokrasi. "Berbeda pilihan itu biasa saja, tanpa harus menyebabkan kita menjauh dan konflik", ucapnya. *Kedua*, pemilu serentak harus damai, sejuk, luber, dan jurdil. Hal itu bisa terwujud jika para kontestan pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat bisa saling menjaga diri untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat. *Ketiga*, hasil pemilu harus berdampak pada peningkatan kualitas pemerintahan, perbaikan mekanisme demokrasi, dan percepatan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. "Jika tidak, maka pemilu hanya menjadi ritual rutinitas 5 tahunan tanpa makna, tanpa nilai", ucap Wakil Ketua Umum DPP PAN itu. "Hanya sekedar melakukan sirkulasi dan perebutan kekuasaan *an sich*, tanpa roh", tambahnya. □

AWG

Forum Tematik Bakohumas

Ma'ruf Cahyono Humas Jembatan Komunikasi Negara dan Rakyat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Informasi adalah elemen yang sangat strategis dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, rakyat dengan pemerintah, dan rakyat dengan rakyat.

SEKRETARIS Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sesjen MPR RI) Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H. M.H., membuka secara resmi Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) MPR RI, Selasa (18/12/2018). Acara yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, itu mengambil tema: 'Peran Lembaga MPR di Tahun Politik.'

Acara ini diikuti 100 lebih peserta. Mereka adalah perwakilan bidang kehumasan instansi, lembaga-lembaga, serta beberapa kementerian Negara. Selain Sesjen MPR RI, hadir pula staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Bidang Komunikasi dan Media Massa, Gun Gun Siswadi; Kepala Biro Humas Setjen MPR RI

Siti Fauziah; dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Muhamad Jaya.

Kepada para peserta, Ma'ruf mengingatkan pentingnya peran kehumasan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian negara sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Kehumasan memiliki satu psikologi hubungan, antara negara dan masyarakat.

"Peran dan hubungan kehumasan tersebut tentu saja sangat penting terutama sebagai jembatan komunikasi kepada rakyat," ucapnya. Dia menunjuk contoh, saat ini sering terdengar isu bahwa bangsa Indonesia terancam tiga 'dis', yakni *disorientasi*, *distrust*, dan *disobedience*. "Ini sangat berbahaya jika terjadi dan meluas dalam tataran kenegaraan," ungkap Ma'ruf.

Maka, lanjut Ma'ruf, di sinilah pentingnya peran kehumasan, untuk membalik isu ancaman tiga 'dis' tersebut agar menjadi positif dan baik untuk masyarakat dan negara. Dalam hal isu disorientasi misalnya, bagaimana kehumasan berperan agar seluruh anak bangsa memiliki orientasi berbangsa dan bernegara sewajarnya, selayaknya, dan senormalnya sesuai harapan *the founding fathers* Indonesia.



Begitu pula soal *distrust*, bagaimana kehumasan mampu menghilangkan *distrust* masyarakat kepada negara agar menuju masyarakat yang sepenuhnya menaruh kepercayaan penuh terhadap bangsa dan negaranya. Jika, peran-peran tersebut diupayakan maksimal dan berhasil maka akan muncul satu kekuatan yang menghilangkan *disobedience* atau pembangkangan.

Ma'ruf menekankan, jika *disobedience* tidak terjadi, tentu negara dan masyarakat akan berada dalam hubungan yang selaras, baik, saling mendukung, dan pada akhirnya segala yang dicita-citakan bersama akan mudah untuk diwujudkan.

"Saya kira peran-peran kehumasan tersebut sangat luar biasa. Peran humas tidak hanya masuk dalam tataran rutin keseharian yang biasa dilakukan, tapi masuk

juga dalam tataran besar. Salah satunya bagaimana mewujudkan itu semua, membalik ancaman tiga 'dis' tadi," katanya.

Kehumasan, lanjut Ma'ruf, juga harus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Tapi, tidak hanya pesan di permukaan, namun juga pesan-pesan yang betul-betul bisa memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut, di tataran MPR sendiri sangat tinggi harapannya, yakni bagaimana sistem nilai yang ada juga sampai kepada masyarakat.

"Intinya, apapun yang akan kita lakukan dalam menjalankan peran kehumasan dan layanan informasi kepada masyarakat, tentu pada akhirnya yang menjadi harapan besar kita semua adalah: *Pertama*, bagaimana masyarakat mampu menciptakan satu kondisi bangsa yang berorientasi kepada

masa depan bangsanya; *kedua*, masyarakat yang percaya kepada bangsanya; dan *ketiga*, masyarakat yang patuh pada bangsa dan negaranya," tandasnya.

Berbicara soal tahun politik 2019, Ma'ruf mengungkapkan bahwa peran serta aktif seluruh masyarakat secara baik dan bijaksana akan membawa bangsa Indonesia menuju ke arah kebaikan demokrasi dan kebaikan secara keseluruhan.

"Menyongsong tahun politik 2019, kita sikapi dengan bijaksana dan dewasa. Proses tahapan-tahapan demokrasi yang sudah kita lalui sesungguhnya mematangkan kita dalam menyongsong demokrasi 2019, dengan cara-cara yang demokratis yakni cara-cara Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita," tandasnya. □

DER

Seminar Nasional

Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

MPR ingin melihat kembali sistem ketatanegaraan, melihat kembali konstitusi melalui kajian, dan melihat kembali pelaksanaan konstitusi.

UNDANG-UNDANG Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku saat ini merupakan UUD hasil amendemen (perubahan) sekali dalam empat tahap pada rentang 1999–2002. Pelaksanaan konstitusi Indonesia hasil perubahan itu dibahas dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Seminar nasional kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan IQRA (Indonesian

2019 melahirkan Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR dengan 60 anggota dari berbagai pakar dan akademisi.

“Semua itu terkait dengan tugas-tugas MPR. Salah satu tugas itu adalah melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, konstitusi dan pelaksanaannya. Kita ingin melihat kembali sistem ketatanegaraan, melihat kembali konstitusi melalui kajian, dan melihat kembali pelaksanaan konstitusi,” jelas Ma’ruf.

Itulah yang melatarbelakangi Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR untuk

kita harus membicarakan UU yang sudah dibentuk dan pasal-pasal yang ada. Pelaksanaan dari pasal-pasal dalam UUD maka dibentuk UU (turunannya). “Apakah UU yang dibentuk itu sudah menjiwai pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945,” tuturnya.

Rambe memberi contoh UU Pilkada yang sedang dibicarakan banyak kalangan, termasuk anggota DPR. Pemilu atau Pilkada yang berlangsung saat ini sangat melelahkan dan menghabiskan dana. Ada keinginan untuk mengembalikan agar kepala daerah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Qualitative Research Association) DPW DKI Jakarta menghadirkan narasumber: Prof Dr Syamsuddin Haris, Prof Dr Ujianto Singgih, dan Yudi Latif, Ph.D. Seminar dihadiri Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, Ketua Umum IQRADKI Jakarta Dr. Siti Sundari, dan diikuti sekitar 450 peserta dari kalangan peneliti, akademisi, dan mahasiswa. Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman menjadi pembicara kunci sekaligus membuka seminar nasional ini.

Dalam pengantarnya, Ma’ruf Cahyono menjelaskan bahwa evaluasi terhadap UUD NRI Tahun 1945 sudah dilakukan sejak selesai amendemen itu, seperti dibentuknya Komisi Konstitusi untuk melihat pelaksanaan UUD hasil amendemen. Evaluasi UUD ini berlanjut dengan pembentukan Tim Kerja Kajian Ketatanegaraan pada MPR periode 2009–2014. Kemudian MPR periode 2014–

terus-menerus melakukan diskusi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapat masukan dari berbagai kelompok masyarakat dan perguruan tinggi bagi penataan sistem ketatanegaraan. Penataan harus didekati dengan pendekatan aspirasi masyarakat dan konsep-konsep yang ideal.

“Kita ingin mendapat jawaban atas pertanyaan, apakah sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan jati diri bangsa (nilai-nilai Pancasila), dan apakah sudah sesuai dengan kehendak masyarakat, serta apakah secara historis sudah sesuai dengan amanat *founding fathers*. Pertanyaan-pertanyaan inilah perlu didalami dalam seminar ini,” ujarnya.

Sementara itu, Rambe Kamarulzaman mengatakan, jika kita ingin melakukan evaluasi terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka

tidak lagi dipilih secara langsung. “Inilah yang menjadi tugas MPR, khususnya Badan Pengkajian,” ucapnya.

Rambe juga memberi catatan sementara atas evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Dia menyebutkan, ada tiga kelompok atas evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Pertama, kelompok yang menginginkan kembali kepada UUD sesuai aslinya. Kedua, kelompok di masyarakat yang menginginkan amendemen kelima UUD. Ketiga, kelompok yang menginginkan evaluasi pasca amendemen UUD, dan melakukan pembenahan termasuk pembenahan sistem ketatanegaraan.

“Kami dari Badan Pengkajian MPR tidak menutup kemungkinan amendemen kelima UUD. Tetapi untuk melakukan amendemen sudah ada syarat dan aturan yang diatur dalam UUD,” katanya. □

BSC

Ketua MPR

Pemuda Muhammadiyah Agar Perkokoh Jati Diri

Di tahun politik ini, pemuda Muhammadiyah diharapkan menjadi pelopor untuk merekat kebersamaan dan persatuan Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



materi dalam temu tokoh/kebangsaan dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/11/2018).

Selain memperkokoh kebersamaan dan jati diri, Zulkifli juga berharap, pemuda Muhammadiyah menjadi model bagi pemuda lainnya untuk menguasai ilmu pengetahuan. "Pendek kata pemuda Muhammadiyah bisa meng-*up grade* dirinya. Meningkatkan kemampuan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kita bersaing dengan negara lain di era global ini," harapnya lagi.

Karena itu, Zulkifli meminta peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah bisa menghasilkan konsep dan gagasan yang *up to date* dan bisa diterapkan pada era ini dan tidak terjebak hanya memilih ketua. "Apalagi hindari betul soal-soal *money politics*, soal yang akan memecah-belah. Mari menjaga jati diri dan kebersamaan pemuda Muhammadiyah," pintanya.

Dalam paparan temu tokoh/kebangsaan di Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa era saat ini adalah era persaingan bebas. Pemuda Muhammadiyah harus mengetahui siapa yang akan menguasai dunia 10 sampai 20

tahun mendatang. Berdasarkan hasil riset, manusia hebat di abad ini nomor satu adalah pemuda Singapura. Nomor dua pemuda Jepang. Urutan ketiga Cina Taipei, kemudian Makao, Hongkong, Tiongkok, dan Korea Selatan. "Indonesia berada pada nomor 62," ungkapnya.

Indikator riset itu adalah kemampuan membaca (berapa banyak buku yang dibaca selama setahun), kemampuan matematika, dan penguasaan *science*. "Mohon maaf, mereka yang unggul tadi, urutan pertama sampai sepuluh, adalah bangsa asing. Pesan saya, itulah tantangan kita. Itulah tantangan pemuda Muhammadiyah," ucapnya.

Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XVII dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hadir dalam pembukaan ini Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhar Simanjuntak, Mendikbud Muhadjir Effendi, serta para peserta muktamar pemuda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. □

BSC

KETUA MPR Zulkifli Hasan menghadiri pembukaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XVII di Yogyakarta. Ketua MPR juga berkesempatan berbicara di depan peserta muktamar yang dikemas dalam agenda Temu Tokoh/Kebangsaan. Dalam temu tokoh itu, Zulkifli berharap, Muktamar Pemuda Muhammadiyah bisa memperkokoh kebersamaan dan jati diri pemuda Muhammadiyah agar pemuda Muhammadiyah mampu membawa dakwah yang menggembirakan dan memajukan Indonesia.

"Apalagi ini tahun politik, saya berharap pemuda Muhammadiyah menjadi pelopor untuk merekat kebersamaan dan persatuan Indonesia," kata Zulkifli usai menyampaikan

Pengganti Antar Waktu (PAW)

Masyarakat Harus Cerdas Hadapi Hoax

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Mahyudin, ST., MM., meminta masyarakat agar pintar-pintar menghadapi berita hoax.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Dr. H. Mahyudin, ST., MM., berharap, masyarakat tidak gampang terpancing dan selalu waspada dengan hoax. Karena, jelang Pilpres 2019 ini berita hoax bertebaran di dunia media sosial (medsos). Banyaknya berita hoax itu bertujuan mendiskreditkan kelompok tertentu dan memecah belah. Karena itu, masyarakat harus cerdas menghadapi hoax, dan tidak gampang

terhasut.

“Jaga persatuan, jangan gampang mempercayai berita-berita yang tak jelas, apalagi yang bersifat memfitnah”, kata Mahyudin usai memimpin prosesi pengucapan sumpah janji untuk dua anggota MPR RI periode 2014-2019 Pengganti Antar Waktu (PAW). Acara tersebut berlangsung di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (23/11).



Dua anggota MPR yang baru dilantik itu berasal dari Fraksi Partai Golkar. Keduanya adalah Imanuel Ekadianus Blegur dari daerah pemilihan (dapil) NTT II menggantikan Setya Novanto. Sedangkan Ir. Eddy Kuntadi berasal dari dapil Jatim X menggantikan Eni Maulani Saragih. Ikut hadir dalam acara tersebut pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, Hardisoesilo.

Mahyudin enggan berspekulasi, menyebut kelompok mana yang telah berperan menyebarkan hoax. Ia hanya berharap, berita hoax makin banyak jumlahnya itu bukan dari pasangan calon yang sedang berkontestasi dalam pilpres. Mahyudin menganggap, daripada berkampanye melalui hoax lebih baik mengajukan visi misi dan program kerja para pasangan calon.

“Yang penting bukan dari mana asalnya. Tapi, masyarakat harus waspada, jaga persatuan, jangan mau diadu domba”, kata Mahyudin.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Mahyudin menyampaikan selamat datang dan selamat bekerja kepada anggota yang baru dilantik. Mahyudin berharap, keduanya segera berlari menyongsong tugas dan tanggung jawab sebagai anggota MPR. Terutama untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Apalagi, kedua anggota MPR yang baru dilantik itu bukan sosok baru.

Untuk itu, Mahyudin berharap, baik Imanuel Ekadianus Blegur maupun Ir. Eddy Kuntadi bisa segera beradaptasi dan melaksanakan tugas-tugas anggota MPR, terutama memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI.

“Kita memiliki tantangan kebangsaan yang semakin berat. Ancaman perpecahan hanya salah satunya saja”, ujar Mahyudin.

Persoalan lain yang saat ini tak kalah mengkhawatirkan, menurut Mahyudin, adanya dugaan 20% mahasiswa sudah terpapar radikalisme. “Semua ini harus segera mendapatkan jalan keluarnya agar tidak menjadi ancaman yang lebih besar di kemudian hari,” katanya. □

MBO

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia

MPR dan Adkasi Siap Gelar Kampanye Pemilu Damai

DELEGASI Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang dipimpin Lukman Said, Senin (3/12/2018), menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kedatangan Lukman untuk mengundang Zulkifli Hasan pada acara Adkasi yang rencananya digelar Februari 2019.

Adkasi merupakan organisasi yang menghimpun anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan 28 Agustus 2001. Adkasi bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi.

Pada bulan dan tahun itu, Adkasi menggelar berbagai acara, seperti seminar dan jalan sehat. "Kami mengundang Bapak untuk menjadi pembicara dalam seminar Adkasi", papar Lukman. Sebagai politisi yang berada di daerah, asosiasi yang menghimpun DPRD dari 417 kabupaten se-Indonesia itu juga peduli terselenggaranya Pemilu yang damai, aman, dan berjalan lancar.

Untuk itu, DPRD mengajak MPR mengampanyekan Pemilu damai lewat kegiatan jalan pagi dan apel. "Rencananya star dari Parkir Timur Senayan dan finish di Kompleks Parlemen", ujarnya. Agar berjalan sukses, Adkasi meminta dukungan MPR dalam acara kampanye Pemilu Damai itu. "Pesertanya bisa mencapai 15.000 orang", ungkapnya.

Menanggapi keinginan itu, Zulkifli Hasan menanggapi. "Nanti dalam seminar akan kita sampaikan materi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika", ujarnya.

Mengenai rencana kampanye Pemilu Damai, pria asal Lampung itu mendukung penuh. "Saya sudah keliling Indonesia dan menyampaikan hal itu", ujarnya. Menurut Zulkifli Hasan, mengenai pemilu, entah itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu memilih anggota DPRD, semua harus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berlangsung dengan suasana yang mengembirakan. Pemilu, menurut Zulkifli Hasan, adalah konsekuensi dari demokrasi yang diselenggarakan secara rutin, sekali dalam lima tahun, sehingga hajatan ini dianggap sebagai hal yang biasa.

Zulkifli Hasan mengingatkan, dalam pemilu yang dihadapi adalah teman, sahabat, dan saudara sendiri. "Untuk itu jangan anggap pemilu sebagai arena perang", tegasnya. "Yang kita pilihkan teman sendiri", tuturnya. Komitmen inilah yang perlu dipegang sehingga tidak ada saling hujat dan saling

serang. Dalam pemilu yang perlu di kedepankan adalah *friendly competition*. "Kita sambut hangat pemilu", tambahnya. NKRI-lah yang menyatukan bangsa ini dalam pemilu.

Memilih wakil rakyat atau presiden, menurut mantan Menteri Kehutanan, itu sangat sederhana. Bila suka si A, si B, datang ke TPS dan tentukan di bilik suara. "Lima menit selesai kok", ucapnya. Nah, yang perlu dilakukan oleh calon wakil rakyat atau calon presiden, kata Zulkifli Hasan, adalah soal pendekatan saja pada masyarakat. □

AWG



Dewan Pengurus PPI

Indonesia Sangat Terbuka Bagi Lulusan Timur Tengah

Indonesia tidak menutup peluang lulusan dari Timur Tengah untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Semua warga negara Indonesia memiliki peluang yang sama.

Tengah dan Jawa Timur, banyak calon gubernur dan calon wakil gubernur dari golongan kiai. "Ini menandakan Indonesia sangat terbuka bagi lulusan dari Timur Tengah dan pesantren," ujarnya.

Menurut Hidayat, setiap warga negara Indonesia memiliki peluang untuk memberikan kontribusi dan sumbangsih terbaik bagi bangsa. "Sudah banyak lulusan dari Timur Tengah yang kembali ke Indonesia dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR menerima Dewan Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Timur Tengah dan Afrika (Timtengka) di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (15/11/2018). Dalam pertemuan itu, Hidayat mengatakan, Indonesia saat ini sangat terbuka bagi lulusan dari Timur Tengah dan pesantren.

Hidayat mengatakan, Indonesia tidak menutup peluang lulusan dari Timur Tengah untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Semua warga negara Indonesia memiliki peluang yang sama. Apalagi saat ini, peluang bagi lulusan Timur Tengah dan ilmu agama sangat terbuka. Contohnya, KH Ma'ruf Amin maju sebagai calon wakil presiden. Begitu juga di Jawa

menjadi pahlawan nasional," ucapnya.

Kontribusi dan sumbangsih yang diberikan lulusan Timur Tengah itu bisa dilakukan dengan menjadi da'i, guru, pimpinan lembaga, pimpinan pesantren, birokrat, anggota dewan, menteri, pimpinan MPR, dan bahkan presiden. "Saya bisa menjadi Ketua MPR (periode 2004 – 2009) dan Wakil Ketua MPR (periode 2014 – 2019). KH Abdurrahman



Wahid atau Gus Dur bisa jadi presiden. Kami berdua adalah lulusan pesantren dan Timur Tengah,” katanya.

Untuk itu, Hidayat berpesan kepada pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam PPI Timtengka untuk fokus dalam belajar, agar ketika kembali ke Indonesia menjadi ulama yang memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Sebab, Indonesia sekarang ini kekurangan ulama dengan kapasitas keilmuan yang tinggi dan pemahaman yang benar.

“Jadilah Anda pakar dan rujukan ilmu setelah menyelesaikan pendidikan di Timur Tengah nanti. Seperti ustad Abdul Somad. Keilmuannya tidak tiba-tiba, tetapi sudah dimulai dan dipersiapkan saat kuliah di Mesir dan Maroko,” tuturnya.

Dewan Pengurus PPI yang hadir, di antaranya Muhammad Ruhayat Haririe (PPI Sudan), Ikhwan Hakim Rangkuti (Kordinator PPI Timtengka 2017 – 2018), Tohirin (PPI Yaman), Rifqi Taquuddin Syarif (PPI Sudan), dan Ali Zulfikar.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu Koordinator PPI Timtengka 2018 – 2019 dan PPI Sudan, Muhamamd Ruhayat Haririe mengucapkan terima kasih atas perhatian Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid terhadap mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. “Bapak Hidayat Nur Wahid menjadi teladan dan rujukan bagi mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, karena kontribusinya pada umat, rakyat, dan negara Indonesia,” ujarnya. □

BSC

Kunjungan AMMIN

HNW Berharap, AMMIN Beri Solusi Keumatan

AMMIN hadir selain untuk menebar dakwah juga memperkuat ekonomi keumatan. Umat membutuhkan tuntunan, untuk itu AMMIN harus bisa memberi solusi.

DELEGASI Asosiasi Mubaligh dan Mubalighah Indonesia (AMMIN) yang dipimpin oleh Sulaeman Hayyun pada Jumat, 16 November 2018, bersilaturahmi kepada Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Kepada HNW, Sulaeman mengatakan, AMMIN pada 28 Desember 2018 berusia 1 tahun. “Kami berdiri setahun lalu”, ujarnya. Sebagai organisasi masyarakat, Sulaeman mengatakan, AMMIN sudah memiliki akta. Kehadiran mereka pada hari itu untuk mengundang HNW dalam Milad I yang akan diadakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Meski sebagai organisasi yang menghimpun para pendakwah, AMMIN juga bergerak dalam bidang perekonomian. “Kami merintis usaha perkulakan”, ungkapnya. Apa yang dilakukan itu sebagai upaya untuk memberdayakan perekonomian mubaligh, mubalighah, dan umat Islam. Sulaeman juga mengungkapkan, AMMIN hendak membuat studio. Di studio itu para pendakwah, seperti ustad, ulama, mubaligh, dan kiai bisa melakukan rekaman dakwahnya, dan selanjutnya didistribusikan ke stasiun-stasiun televisi yang membutuhkan.

HNW merasa bahagia atas kedatangan AMMIN. Dia mendukung apa yang dilakukan organisasi itu. Menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

perjuangan dalam berdakwah itu sangat luas bidangnya. “Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara”, tuturnya, seraya menyatakan, bisa lewat ekonomi, politik, dan bidang lainnya.

Sebagai wakil rakyat, HNW menyatakan, apa yang dilakukan selama ini merupakan bentuk dakwah. “Kita berdakwah lewat pembuatan undang-undang, pengawasan, dan budgeting”, ujarnya. Dari sinilah, tambah pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu bahwa dakwah tak bisa berjeda. “Tak mungkin dakwah dilakukan sekali dalam lima tahun,

apalagi dilakukan menjelang pemilu”, tuturnya.

Meski dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun untuk berjuang di jalan Allah ini juga mempunyai tantangan. Paling penting bagi para pendakwah adalah melakukan amanah dakwahnya sehingga membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik.

Dia merasa senang ketika AMMIN bergerak dalam bidang ekonomi keumatan. Bila para pedakwah mempunyai kehidupan perekonomian yang sukses maka akan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

memudahkan dirinya dalam berdakwah di masyarakat. Lebih lanjut, HNW menyatakan, sekarang ulama menjadi rujukan masyarakat

dalam kehidupan keseharian. HNW yakin, AMMIN juga menjadi rujukan umat. "Untuk itu, AMMIN harus menjadi pencerah dan

pembawa umat menuju kehidupan yang lebih baik", harapnya.

AMMIN juga didorong menjadi organisasi yang mempunyai nilai lebih. "Pemberi solusi pada umat", tuturnya. Hal ini disampaikan sebab organisasi yang ada masyarakat juga menjadi rujukan. Dia berharap, agar program kerja yang ada dimatangkan. "Serta perlu keseriusan para pengurus", paparnya.

HNW mengatakan, pendakwah dalam menjalankan amanahnya kadang tak mengenal waktu. "Ada yang berdakwah dari pagi hingga subuh", ungkapnya. Hal demikian kadang membuat para pendakwah mengabaikan kesehatannya. Ia berharap, AMMIN bisa melakukan kerja sama dengan dokter, rumah sakit, atau apotek untuk memberi asuransi kesehatan pada para pendakwah. □

AWG

Jakarta Concert Hall INews Tower

MPR Terima Indonesia Award 2018

MPR mendapat penghargaan dalam kategori apresiasi sebagai lembaga perekat nasionalisme kebangsaan.



MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima anugerah Indonesia Award 2018 dari INews TV dalam kategori apresiasi sebagai lembaga perekat nasionalisme kebangsaan. Award diserahkan kepada Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mewakili Ketua MPR dalam acara Malam Anugerah Indonesia Award 2018 di INews

Tower, Jakarta, Kamis malam (15/11/2018).

Malam anugerah Indonesia Award di Jakarta Concert Hall INews Tower dihadiri sejumlah tokoh, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan lainnya. Acara yang disiarkan secara langsung oleh INews ini juga dimeriahkan sejumlah artis kondang,

seperti D'Masiv, Siti Badriah (Sibad), Abdul Idol, dan Brisia Jodie Idol.

Penghargaan Indonesia Award 2018 yang digelar saluran televisi INews adalah sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi pada individu atau lembaga terhadap bangsa. Indonesia Award 2018 memberi penghargaan pada 20 kategori. Tiga kategori



pertama adalah tokoh publik, tokoh profesional, dan tokoh olahraga. Selain tiga kategori yang melalui proses penjurian tersebut, Indonesia Award 2018 juga memberikan 17 apresiasi pada beberapa kategori. MPR mendapat penghargaan dalam kategori apresiasi sebagai lembaga perekat nasionalisme kebangsaan.

Usai menerima penghargaan, Ma'ruf Cahyono menyampaikan apresiasi terhadap INews TV yang telah memberikan Indonesia Award 2018 dengan tema "Indonesia Bangga". Menurut Ma'ruf, penghargaan yang diberikan kepada MPR sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas MPR untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila yang harus kokoh dan tumbuh menjadi ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Saya kira jati diri bangsa yang membanggakan bagi Indonesia itu harus terus dirawat dan dijaga serta dibumikan dalam setiap jiwa dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

raga manusia Indonesia," ujarnya.

Karena itulah, Ma'ruf mengajak semua pihak dan komponen bangsa untuk terus bersatu. "Mari kita terus bersatu. Dengan bersatu kita bisa merdeka dan berdaulat. Dengan merdeka dan berdaulat kita bisa demokratis. Dengan demokratis kita bisa berlaku adil. Tentu tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, serta sejahtera," paparnya.

Ma'ruf menilai, malam anugerah Indonesia Award 2018 ini merupakan acara yang inspiratif karena berkaitan dengan prestasi

dan apresiasi. Apalagi salah satunya adalah apresiasi untuk lembaga yang merekatkan nasionalisme kebangsaan menjadi bagian dalam malam penghargaan ini. Apresiasi ini sangat penting untuk menuju persatuan dan kesatuan bangsa.

"Malam anugerah ini menunjukkan pentingnya peran media untuk bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat, swasta, dan lain-lain dalam upaya kita berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya. □

BSC

Milad ke-90 Rabithan Alawiyah

Peran Habib dalam Perjuangan Bangsa

Keturunan Arab dari Handramaut Yaman, ketika di Indonesia tak hanya menyebarkan Islam dan berdagang, tapi juga menanamkan benih nasionalisme.

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengucapkan selamat milad ke-90 Rabithah Alawiyah (RA). "Organisasi ini berdiri pada 27 Desember 1928 sebagai wadah yang menghimpun para habib," kata HNW saat memberi sambutan dalam acara syukuran 90 Tahun RA, Ahad malam (16/12/2018) di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta.

Kehadiran organisasi ini telah banyak memberikan kontribusi bagi perjalanan Indo-

ibrah atau pelajaran, namun bukan sebagai paku yang membuat kita tak bisa bergerak.

Para pendatang dari Handramaut Yaman dengan berbagai kesulitan yang ada, namun setelah tiba di nusantara banyak aktivitas yang dilakukan. Sebelum ada RA sudah ada organisasi serupa, yakni Jamiatul Khair. Organisasi yang berdiri pada 1900-an ini tidak hanya mempunyai kontribusi dalam sejarah perjalanan bangsa, namun juga berperan dalam percaturan dunia.

digubahnya. "Mars Hari Merdeka dan Syukur merupakan lagu ciptaan H. Muthahar", sebut HNW. Lagu-lagu itu sering dinyanyikan, apalagi di saat memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia. "Lagu heroik yang menunjukkan cinta Indonesia", tuturnya.

HNW menceritakan, menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno sowan ke Habib Kwitang. Dalam pertemuan itu, Habib Kwitang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kabar Indonesia merdeka pun tidak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nesia. HNW menyebut, kehadiran RA dengan beragam aktivitas menunjukkan organisasi yang menghimpun keturunan Arab itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. "Dengan demikian sudah tak pantas bila mendikotomikan antara ke-Indonesia-an dan ke-Arab-an," ujar pria yang juga Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu.

Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu berharap, organisasi ini tak hanya sekadar mengenang perjalanan masa lalunya, namun juga harus melihat masa depan. "RA tak boleh berhenti di usia 90 tahun", ujarnya. "Juga harus berpikir ke depan", tambahnya. Masa lalu, menurut HNW, adalah hal yang penting untuk dijadikan

Menurut HNW, Jamiatul Khair yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi menanamkan benih nasionalisme bangsa Indonesia. Kongres Umat Islam pada 1903 menghasilkan deklarasi yang menyatakan, tak boleh membiarkan bangsa ini hidup di bawah penjajahan bangsa asing, Belanda. "Dari sini menunjukkan organisasi Islam telah menanamkan nasionalisme", paparnya.

Peran habib dan keturunan Arab, menurut HNW, tak hanya diberikan oleh organisasi yang menghimpunnya, namun juga datang dari individu mereka. Dia menyebutkan, H. Muthahar adalah sosok habib yang telah berkontribusi pada Indonesia lewat lagu yang

hanya disampaikan kepada jamaahnya yang ada di Jakarta, namun juga disampaikan kepada habib yang ada di Palu, Sulawesi.

Peran-peran kebangsaan seperti inilah, menurut HNW, perlu lebih dikedepankan apalagi dalam era global saat ini. "Banyak peran yang perlu diperbuat RA", harapnya. HNW berharap, di tahun politik, RA bersama ormas lain dapat berperan dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas, menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin berkualitas. Untuk itu, dia berharap agar organisasi ini mau berdialog dengan partai politik untuk mencapai tujuan itu. □

AWG

Audiensi Pengurus Besar PDHI

Indonesia Belum Aman dari Penularan Penyakit Hewan

Sejumlah daerah masih dihantui penyebaran penyakit yang timbulkan binatang. Dibutuhkan lembaga yang fokus memikirkan kesehatan hewan.

memasukkan binatang ternak mereka ke Indonesia, apalagi sapi yang mereka kirim itu berjenis sapi Bali”, sebut Munawaroh.

Ketua Umum PB PDHI ini merasa perlu menyampaikan kekhawatiran lembaganya terkait persoalan kesehatan hewan ini, mengingat saat ini perhatian negara terhadap masalah kesehatan hewan masih sangat minim. Padahal, ancaman yang ditimbulkan dari penyakit hewan sangat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

INDONESIA adalah negara besar, memiliki ribuan pulau yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan adat kebiasaan. Kondisi itu memudahkan menularnya berbagai penyakit, termasuk yang disebarkan oleh binatang. Seperti antrax, rabies, penyakit mulut dan kuku, serta flu burung. Bahkan, hingga kini korban akibat penyakit yang ditularkan oleh binatang itu masih terus berjatuhan.

Rabies misalnya, dari 34 provinsi di Indonesia yang dinyatakan bebas dari penyakit ini baru sembilan provinsi. Sedangkan sisanya masih terindikasi adanya serangan rabies. Demikian juga flu burung. Meski tidak mewabah seperti sebelumnya, penyakit flu burung masih kerap dijumpai di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) drh. H. Muhammad Munawaroh, MM., saat beraudiensi dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Acara tersebut berlangsung di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta,

Senin (3/12).

Kepada Ketua MPR, Munawaroh juga menyampaikan mengenai adanya ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK), yang berpotensi datang dari Malaysia. Pasalnya, saat ini Negeri Jiran Malaysia belum terbebas dari PMK. Padahal di sana terdapat banyak peternakan sapi Bali yang sewaktu-waktu bisa dikirim ke Indonesia.

“Mudah saja bagi peternak Malaysia untuk

berbahaya, dapat menular, dan memakan korban manusia.

Munawaroh menunjuk contoh ancaman penyakit flu burung dan rabies. Penyakit ini sangat berbahaya, dan sudah banyak korban meninggal akibat terkena serangan penyakit flu burung dan rabies ini. Tidak sedikit pula korban yang telah menghabiskan materi agar bisa sembuh dari penyakit akibat flu burung dan rabies. “Tetapi, perhatian



negara terhadap penyakit itu masih sangat kurang”, katanya.

Karena itu, Munawaroh meminta dukungan kepada Ketua MPR agar pemerintah segera membentuk lembaga yang khusus menangani masalah kesehatan hewan. Lembaga ini nantinya diharapkan bisa memberikan peringatan dan menetapkan kondisi darurat terhadap penyakit hewan.

“Selama ini hubungan struktural antara pusat dan daerah belum terjalin dengan baik, sebagai akibat munculnya otonomi daerah. Sehingga banyak kasus tidak bisa segera ditangani karena dokter-dokter hewan di

daerah hanya menurut kepada atasannya di daerah saja”, ungkap Munawaroh.

Sebaiknya, menurut Munawaroh, lembaga yang dimaksud langsung berada di bawah Presiden. Agar bisa menyatakan dan bertindak menghadapi kegentingan tertentu. Dan, memiliki anggaran yang cukup dalam menghadapi serangan penyakit tertentu.

Selain itu, Munawaroh juga menyampaikan pentingnya sejumlah undang-undang (UU) yang berkaitan dengan persoalan kesehatan hewan. Antara lain, UU tentang Kesejahteraan Hewan dan UU tentang

Dokter Hewan. Karena sampai sekarang, UU itu belum ada. Padahal keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan, rasa turut prihatin. Dia mendorong agar PDHI segera mengadakan seminar, menyangkut problematika kesehatan hewan di Indonesia.

“Hasil seminar itu segera dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti agar persoalan kesehatan hewan ini bisa segera mendapat perhatian”, saran Zulkifli Hasan. □

MBO

HUT ke-19 DWP

MPR RI Apresiasi Eksistensi DWP dalam Pembangunan Nasional

Suksesnya pembangunan nasional adalah buah dari peran serta serta kiprah seluruh elemen bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR RI, Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H., hadir sebagai tamu kehormatan dalam acara HUT ke-19 Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Acara yang digelar DWP Sekretariat Jenderal MPR RI itu mengambil tema: 'Optimalisasi Potensi DWP untuk Suksesnya Pembangunan Nasional.'

Acara hari ulang tahun DWP yang juga diisi dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dihadiri pula anggota MPR RI Fraksi Partai

Golkar Dr. Ir. Hetifah Sjiafudian, M.P.P., yang juga sebagai narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR. Selain itu, juga hadir Ketua Bidang Organisasi DWP Pusat Jullie L. Hakim, dan Ketua Dharma Wanita Setjen MPR, Djuwariyah, S.I.P.

Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono dalam sambutannya, mengucapkan selamat HUT ke-19 kepada DWP disertai harapan agar DWP mampu memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, dan berperan lebih besar lagi dalam pembangunan nasional. “Saya mengapresiasi kegiatan DWP serta

mendukung eksistensi juga program-program serta aktifitas dari DWP,” ujarnya.

Lebih jauh, Ma'ruf Cahyono mengingatkan kepada seluruh anggota DWP sebagai salah satu elemen bangsa dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional, perannya sangat penting. Dalam lagu Mars DWP, kata Ma'ruf, yang sering dinyanyikan itu isinya sangat luarbiasa isinya. Syairnya menyebut soal kemandirian, mulai dari ekonomi sampai sosial dan budaya, serta komitmen untuk bersatu padu wujudkan masyarakat adil dan makmur. Semua sudah lengkap. “Pesan saya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jangan hanya dihafal, tapi dilaksanakan,” katanya.

Selanjutnya, Ma’ruf menegaskan, jika elemen masyarakat, termasuk anggota DWP seluruh Indonesia, melaksanakan kiprahnya untuk bangsa dan negara dalam hal per-

ekonomian, kemandirian, sosial dan budaya, maka akan lancarlah bangsa Indonesia menuju cita-cita bersama. Hal tersebut sesuai dengan amanah TAP MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan, yakni Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dan

Indonesia yang mandiri.

“Saya yakin jika semua kiprah tersebut dilaksanakan sesuai dengan koridor Pancasila maka selesai semua masalah bangsa, Indonesia akan tenteram-tenteram saja,” tegas Ma’ruf.

Dharma wanita sebagai bagian *civil society*

DALAM kesempatan yang sama, anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengawali paparan materi Sosialisasi Empat Pilar dengan terlebih dulu menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-19 Dharma Wanita Pembangunan (DWP). Selanjutnya, Hetifah menyatakan, Dharma Wanita adalah bagian dari gerakan *civil society* yang diharapkan mampu bersinergi dengan elemen bangsa lainnya, mewujudkan situasi di Indonesia yang menjadi cita-cita kita semua, yakni keadilan dan kesetaraan.

Politisi Golkar ini mengingatkan bahwa saat ini kondisi-kondisi seperti yang dicita-citakan bersama tersebut masih belum tercapai secara maksimal, seperti praktik diskriminasi terhadap perempuan masih terasa ada dalam berbagai bentuk, walaupun secara kasat mata dan terbuka sudah tidak ada di Indonesia. Praktik seperti itu masih terasa secara terselubung, seperti diskriminasi di dunia politik, kekerasan-kekerasan yang banyak dialami di mana kaum perempuan sebagai korbannya, buta huruf masih banyak di kalangan perempuan dan lainnya.

Hal tersebut, lanjut Hetifah, perlu diperhatikan oleh DWP, juga sebagai *civil society*. Sebab peran Dharma Wanita sangat strategis dalam lingkup organisasi, juga nasional. “Dharma Wanita juga penting sebagai medan berlatih berorganisasi, serta berdemokrasi yang baik,” ucapnya.

Hetifah juga mengingatkan, perlunya seluruh elemen bangsa, termasuk DWP, untuk lebih memahami sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Dia perlu menekankan sila ketiga, karena bangsa ini akan memasuki tahun politik 2019, tahun yang sangat penting juga penuh potensi ‘panas.’ “Pada ajang demokrasi, memilih caleg dan capres, pasti beragam pilihan. Di situ ada tantangan berat dan besar yang menguji Persatuan Indonesia,” katanya.

Karena itu, Hetifah mengingatkan, jangan sampai karena perbedaan pilihan terjadi permusuhan antarsesama teman,



saudara, tetangga. Untuk itulah perlu pemahaman yang baik bahwa ikut berpartisipasi semua anak bangsa dalam Pemilu 2019 tujuan utamanya adalah untuk mengantarkan Indonesia jauh lebih baik di masa depan.

Hetifah mengajak, agar warga bangsa, termasuk anggota DWP, menjaga betul hubungan antarsesama, bertoleransi tinggi, menghargai perbedaan, berpartisipasi di tahun politik dengan bermakna dan cerdas. Semua itu bisa dilakukan saat ini juga, mulai dari level yang terkecil yakni di keluarga dan di lingkungan sekitar. “Di lingkungan keluarga peran ibulah yang sangat besar,” begitu pesan Hetifah untuk anggota DWP.

Acara HUT ke-19 DWP ini berlangsung sehari, dan diikuti sekitar 500 peserta. Mereka ini terdiri dari anggota DWP dari lingkungan Setjen MPR RI dan anggota DWP perwakilan Kementerian Negara, seperti DWP Kementerian Keuangan, DWP Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, DWP Kementerian Kesehatan, DWP Kementerian Agama dan lainnya. □

DER

Deklarasi para Netizens

Dalam kesempatan itu, Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono juga menyampaikan pesan-pesan Empat Pilar untuk para anggota DWP. Bahwa pemahaman nilai-nilai luhur bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika semestinya ada dalam diri seluruh anak bangsa, termasuk DWP, dan kemudian berupaya kuat untuk memahaminya dengan berbagai cara yang baik.

Memahami Empat Pilar dengan baik, lanjut Ma'ruf, tentu saja akan berpengaruh baik buat anggota DWP yang juga merupakan kaum ibu untuk anak-anaknya. Apalagi tantangan bangsa terbesar adalah bagaimana menjaga generasi muda milenial tidak terpengaruh dampak buruk modernisasi. "Di sinilah peran kaum ibu teruji, tentu saja dengan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang baik," ucapnya.

Tapi, Ma'ruf mengingatkan, modernisasi, kemajuan teknologi tidak mesti berdampak buruk. Banyak generasi milenial Indonesia yang

menggunakan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang baik. Dia sering bertemu anak-anak muda milenial, para netizen dan blogger, juga vlogger, di kota-kota besar Jakarta dan di daerah-daerah. Mereka, anak-anak muda milenial itu memang luar biasa.

Dengan penguasaan teknologi digital serta teknologi informasi yang baik mereka berada di dunia yang menyenangkan. Para anak muda milenial tersebut menuangkan segala kreatifitasnya, ekspresinya, segala ide dan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan-tulisan, status-status, pembuatan video yang mereka senangi. Dan, dengan kecanggihan teknologi, apa yang mereka buat pada detik itu juga tersebar secara cepat, bahkan secara global. Sebab, banyak dari mereka ini memiliki pengikut atau follower mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan.

"Ketika kami mendiskusikan soal Sosialisasi Empat Pilar, mereka tertarik untuk menyampaikannya sesuai metode dan kreatifitas

mereka, dan itu terjadi tidak ada paksaan. Itu keinginan mereka sendiri. Melalui smartphone dan gadget canggih lainnya, pesan Empat Pilar akan cepat tersebar," katanya. Menurut Ma'ruf, kiprah generasi milenial yang cerdas dan luar biasa itu akan mampu menjaga bangsa ini dari potensi negative, terutama jelang Pemilu 2019.

Para warga net atau netizens dari seluruh Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk ikut menyampai pesan Empat Pilar dengan cara masing-masing dalam sebuah deklarasi. Deklarasi dibacakan di hadapan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono, ketika berkunjung ke gedung parlemen belum lama ini, berisi empat hal. *Pertama*, tidak menyebarkan konten hoax dan SARA. *Kedua*, bijak bermedia sosial sesuai dengan Pancasila. *Ketiga*, menerapkan Empat Pilar MPR dalam literasi digital. *Keempat*, bersatu membuat keren Indonesia dengan konten yang positif. □

DER

Audiensi PP KAMMI dan PKU Unida

HNW Mengapresiasi Kiprah Positif Generasi Muda Islam Indonesia

Keterlibatan dan peran generasi muda Islam Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa sangat penting.

GENERASI muda Islam Indonesia yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berencana menjadi relawan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, niat KAMMI tersebut sudah mendapat izin dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Rencananya, seluruh anggota KAMMI dan juga para relawan mahasiswa di luar KAMMI pun ingin bergabung dan akan bergerak memantau pelaksanaan pemilu. Tujuannya, untuk membantu menjaga agar pelaksanaan pemilu tetap demokratis, dan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A., (HNW) mengapresiasi dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mendukung rencana generasi muda Islam Indonesia yang tergabung dalam KAMMI yang akan terlibat langsung menjadi relawan

untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan HNW usai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mendengar langsung rencana tersebut dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi, ketika memimpin delegasi PP KAMMI melakukan audiensi dengan HNW di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, di Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

“Saya sangat apresiasi dan dukung rencana tersebut, dan memang inilah harapan kita semua agar kiprah generasi muda mahasiswa Islam tidak hanya teori, tapi diikuti pula aksi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan bangsa,” ujar HNW.

Jadi, jika KAMMI berperan dalam mengawasi dan memantau Pemilu 2019 maka KAMMI ikut mengambil bagian dalam kesuksesan Pemilu 2019. Supaya pemilu betul-betul demokratis dan betul-betul — seperti yang dikatakan Bapak Habibie — mengarah ke demokrasi proporsional, demokrasi suara terbanyak yang tidak lagi mengenal dikotomi mayoritas minoritas.

Sekali lagi HNW menegaskan, kiprah positif generasi muda Islam Indonesia KAMMI tersebut juga untuk menjawab berbagai kesalahpahaman tentang Islam, seperti tuduhan radikal, anti NKRI, non Pancasila, dan lainnya.

Selanjutnya, HNW juga mengungkapkan kiprah positif KAMMI, sebagai generasi muda Islam Indonesia, yang dinilainya sangat luar biasa. Seperti menjadi relawan bersama elemen masyarakat dan elemen pemuda berbeda agama dan suku lainnya, langsung

terjun ke lokasi bencana tsunami yang memporakporandakan wilayah pesisir Banten, Jawa Barat. Hal-hal baik seperti itu, menurut HNW, harus diperhatikan oleh generasi muda Islam Indonesia. “Sebab jika generasi muda Islam diam saja maka kesalahpahaman tentang Islam akan terus ada,” terangnya.

HNW berharap, kiprah dan peran generasi muda Islam Indonesia saat ini untuk bangsa dan negara harus lebih baik dari kiprah dan peran generasi muda Islam di era perjuangan dahulu.

Teladanilah Para Pendiri Bangsa

Usai pertemuan dengan delegasi PP KAMMI, Hidayat Nur Wahid (HNW) kemudian bertemu dengan para kader Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam (Unida) Gontor. Acara “Temu Tokoh” itu berlangsung di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPD Senayan, Jakarta.

Pertemuan itu membahas berbagai hal seputar lembaga MPR dan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Termasuk pula membahas soal implementasi Pancasila dalam konteks kekinian. Pembahasan soal implementasi Pancasila dirasa sangat penting, sebab dalam berbagai forum diskusi sampai obrolan warung kopi, soal implementasi Pancasila selalu menjadi bahan menarik untuk dibahas.

Dalam kesempatan itu, HNW memaparkan adanya kontradiksi antara teori dan implementasi Pancasila yang terjadi di lapangan.

Menurut pandangan HNW, soal implementasi Pancasila, rakyat saat ini harus meneladani para pendiri bangsa Indonesia, terutama soal toleransi, saling menghormati perbedaan yang ada, dan saling memahami demi tercapainya tujuan utama, yakni Indonesia merdeka, bermartabat, dan memiliki visi luar biasa di masa depan.

“Sejarah telah menoreh dengan tinta emas bagaimana para pendiri bangsa kita bersama-sama merumuskan berbagai hal sangat penting bagi negara Indonesia. Seperti sejarah penghapusan beberapa kata di Piagam Jakarta, sejarah perumusan teks Pancasila, sejarah penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan lainnya sampai mosi integral,” ujarnya.

Rakyat Indonesia saat ini, lanjut HNW, harus membaca dan mempelajari sejarah-sejarah tersebut sehingga bisa memahami betapa visionernya pemikiran para pendiri bangsa Indonesia. Mereka menyampingkan ego pribadi, dan semuanya fokus tertuju pada kepentingan bersama sehingga berbagai perbedaan tidak lagi menjadi suatu masalah.

Implementasi Pancasila yang baik, apalagi jelang Pemilu 2019 yang potensi konfliknya sangat luar biasa sangat dibutuhkan. Para pendiri bangsa sebenarnya telah menunjukkan bentuk real dari Pancasila tersebut. Masyarakat Indonesia masa kini cuma harus mencontoh dan meneladani mereka dengan jauh lebih baik. □

DER

Soal Disabilitas Mental Boleh Ikut Pemilu

Bangsa Indonesia menggelar Pemilu sejak 1955, namun perdebatan soal pengidap gangguan jiwa (ODGJ) berhak atau tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu terasa dinamis. Ada yang mendukung kebijakan itu, namun ada pula yang menolak. Menyikapi hal yang demikian memang harus pelan-pelan membaca aturan yang ada. Surat keterangan dari dokter yang menyatakan seseorang ODGJ sehat atau tidak mentalnya menjadi kunci ia bisa masuk ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.

Zainut Tauhid Sa'adi Anggota MPR Fraksi PPP

ODGJ Tidak Permanen Kemungkinan Bisa Memilih

NEGARA menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara. Sikap tersebut terlihat atau nampak dari jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktik penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Hak-hak warga negara (*citizen's rights*) yang diatur negara meliputi: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Dasar KPU memberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, karena mengacu pada Putusan MK No. 135/2015 (gugatan atas UU 8/2015 Pasal 57 ayat (3) huruf a) yang menegaskan soal perlindungan hak pilih bagi WNI penyandang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

gangguan jiwa/ingatan tidak permanen.

Pertimbangan MK untuk memberikan hak kepada orang yang dalam gangguan kejiwaan (disabilitas mental) semata karena pertimbangan HAM. Soal apakah yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak, itu nanti tergantung kesadaran dia. Menurut saya hak dia sebagai warga negara untuk memilih adalah bagian hak dari konstitusional dan itu harus dihargai.

Di dalam keputusan MK tidak menyebutkan istilah orang gila, tetapi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) atau disabilitas

mental. Disabilitas mental itu macam-macam, ada yang sifatnya permanen dan ada yang tidak permanen. Nah, mereka penyandang disabilitas mental yang tidak permanen itu yang nanti kemungkinan bisa ikut memilih.

KPU harus menyamakan perlakuan antara penyandang disabilitas mental dengan penyandang disabilitas lainnya. Jadi, mereka harus mendapatkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya. Bantuan yang diberikan adalah pendampingan saat berada di dalam bilik suara. Bisa dari pihak keluarga atau petugas KPPS.

Apakah peserta pemilu harus kampanye kepada kelompok disabilitas mental? Tergantung dari caleg parpol tersebut. Tidak ada kewajiban atau larangan. Tergantung

dari kebijakan masing-masing caleg atau parpol tersebut. Yang penting diperjuangkan untuk penyandang disabilitas mental adalah perlindungan negara kepada mereka

dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dengan warga masyarakat lainnya. □

AWG

Rambe Kamarul Zaman Anggota MPR Fraksi Golkar

Saat di TPS Harus Mendapat Perhatian Lebih

BAHWA KPU memasukan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam daftar pemilih sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Aturannya tertuang dalam PKPU No. 11 Tahun 2018, pasal 4 ayat 2 poin B. Kelompok masyarakat seperti ini disebut bukan sebagai orang gila, namun sebagai kelompok disabilitas. Disabilitas itu beragam, salah satunya gangguan jiwa. Sebagai kaum disabilitas maka KPU akan mendampingi mereka sama seperti kaum disabilitas lainnya saat pemilih berada di bilik TPS. Pendamping mereka adalah dari pihak keluarga atau KPPS. Mereka masuk daftar pemilih, namun apakah dia akan menggunakan hak pilihnya atau tidak, KPU akan melihat situasi yang ada.

Saat mereka didata sebagai pemilih tidak perlu surat keterangan rumah sakit atau dokter, namun pada saat mereka memilih maka harus ada surat keterangan dari rumah sakit atau dokter. Bila ternyata tidak mampu atau tak bisa menggunakan hak pilihnya, dengan bukti dari rumah sakit atau dokter, maka ia dinyatakan tak mampu menggunakan hak pilihnya. KPU memandang selama tak mengganggu situasi, ya bisa memilih namun kalau mengganggu ya tidak bisa memilih.

Kelompok masyarakat seperti ini tetap diberi kesempatan untuk memilih, karena tidak semua ODGJ tidak bisa menentukan pilihannya. Ada mereka yang terkena ODGJ tidak terpengaruh dengan apa yang disandangnya. Gangguan yang dialami tidak berpengaruh pada kemampuan dirinya untuk menentukan pilihan. Dari sinilah KPU memandang hak pilih mereka dilindungi.

KPU akan menyosialisasikan bahwa mereka mempunyai hak pilih ke tempat para penyandang disabilitas. Sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan organisasi

terkait. Dan bekerja sama dengan orang yang sudah biasa atau pengalaman menanganinya mereka.

Jadi, masalah ODGJ yang bisa menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 tidak perlu terlalu mempermasalahkan kebijakan yang diambil oleh KPU itu. Meski demikian,

atau metode yang digunakan saat melakukan pendataan dan pencoblosan. Hal demikian penting, sebab perlunya kematangan aturan dan teknis dalam setiap proses, pelaksanaan, dan mengawal di lapangan. KPU harus mampu menjamin petugas di TPS agar siap dalam menjaga proses pencoblosan ketika



agar KPU benar-benar bisa membedakan mana orang yang termasuk ODGJ dengan kriteria gangguan jiwa ringan, sedang, dan berat. Di sinilah validitas data ODGJ perlu dimiliki oleh penyelenggara Pemilu.

Meski ada sebutan kaum disabilitas, namun dalam pengawasan dan penanganan harus dibedakan antara disabilitas mental dan kaum disabilitas fisik. Dari sinilah perlu latihan bagi anggota KPU untuk menanganinya.

Meski mendukung langkah KPU, namun dipertanyakan kesiapan lembaga yang beralamat di Jalan Imam Bonjol ini terkait cara

ODGJ menyalurkan hak pilihnya. Hal demikian harus mendapat perhatian lebih.

Pada hari-H, saat pencoblosan, kedatangan ODGJ disarankan harus membawa surat rekomendasi dari dokter rumah sakit jiwa yang membuktikan atau menyatakan ia sehat jasmani dan mental. Apabila tidak memiliki surat keterangan itu maka lebih baik tak diizinkan mencoblos, sebab dikhawatirkan bisa mengganggu pencoblosan di TPS. Untuk itulah perlu pendampingan pada ODGJ untuk mengantisipasi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. □

AWG

Balikpapan, Kalimantan Timur

MPR Evaluasi Pemberitaan Selama 2018

Pemilu serentak 2019 bisa menjadi momentum bagi MPR untuk meredam potensi kegaduhan di masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MENJELANG tutup tahun 2018, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggelar pertemuan dengan praktisi media, yaitu redaktur senior media cetak, online dan elektronik. Pertemuan yang dikemas dengan nama “Media Expert Meeting” ini membahas tema “Evaluasi Publikasi Pemberitaan MPR Tahun 2018”.

Petemuan dengan awak media ini dipimpin Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi Muhammad Jaya, dan Kepala Subag Pemberitaan Budi Muliawan. Media Expert Meeting diikuti 35 redaktur senior baik cetak, online, dan elektronik, berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (15/12/2018).

Dalam pengantarnya, Siti Fauziah memberikan apresiasi kepada media yang telah bekerjasama dengan MPR selama 2018. Kerjasama yang terjalin selama ini berjalan dengan baik. Ia mengharapkan, pada 2019 kerjasama akan semakin baik lagi. “Kita harapkan tahun depan lebih bersinergi lagi. Komunikasi yang sudah terjalin bisa ditingkatkan lagi,” harapnya.

Dalam pertemuan ini, Siti Fauziah meminta para redaktur senior untuk menyampaikan evaluasi dan masukan berkaitan dengan publikasi pemberitaan MPR. “Humas MPR dengan media adalah partner sejajar. Kita adalah mitra sejajar dan mempunyai kepentingan yang sama,” ujar wanita yang akrab disapa Bu Titi ini.

Apalagi, lanjut Siti Fauziah, tahun depan sudah memasuki persiapan Pemilu 2019, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak. “Pemberitaan MPR diharapkan tetap optimal. Kita lakukan yang terbaik untuk semuanya,” kata Siti Fauziah mengingatkan.

Peserta media expert meeting tidak memungkirinya adanya irisan antara pimpinan MPR dan kontestasi politik menjelang pemilu serentak 2019. Dalam kontestasi politik itu para peserta mengharapkan pemberitaan MPR melalui pernyataan pimpinan MPR tetap bernuansa menjaga persatuan bangsa dan mewujudkan pemilu damai.

Pemilu serentak 2019 bisa menjadi momentum bagi MPR untuk meredam potensi kegaduhan di masyarakat. “Ketika banyak

berita *hoax*, fitnah, ujaran kebencian, MPR bisa berperan untuk meredam kegaduhan itu. Ini bisa dilakukan melalui pesan dan pernyataan pimpinan MPR,” ujar Abdul Rochim dari *Koran Sindo*.

Pendapat serupa disampaikan Mega Putra Ratya dari *Detik.com*. Dia mengatakan, momentum jelang pemilu serentak 2019 ini bisa dimanfaatkan untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR, misalnya melalui pernyataan dan imbauan pimpinan MPR. “Di sini peran pimpinan MPR dan sosialisasi Empat Pilar MPR untuk melawan *hoax*, *black campaign*, fitnah dengan sosialisasi Empat Pilar MPR. Pimpinan MPR menyampaikan imbauan yang menyejukan dan mendamaikan,” ujarnya.

Beberapa masukan lain dari awak media adalah berita kegiatan MPR tidak hanya dalam bentuk tertulis, tapi juga dikemas dalam bentuk infografis, video (gambar) untuk televisi. Dan, sosialisasi Empat Pilar MPR dikaitkan dengan isu kekinian, dan lainnya. □

BSC



Terinspirasi Perjalanan Dari New York ke Washington

Rencana jalan tol sudah digagas sejak tahun 1955. Raden Soediro sebagai kepala daerah Jakarta mengusulkan dibangunnya jalan berbaya, untuk mengurangi beban pembangunan. Usulan ini muncul setelah Soediro melakukan perjalanan di Amerika Serikat. Di ruas jalan New York-Washington, di beberapa titik jalan, mobil yang ditumpangi berhenti untuk membayar. Namun, usulan Soediro kepada DPRDS itu ditolak. Baru di era Soeharto, tol mulai dibangun. Jagorawi merupakan tol pertama di Indonesia. Awalnya hanya sebagai jalan biasa, namun selanjutnya dikembangkan menjadi tol. Dari waktu ke waktu, dari pemerintahan ke pemerintahan, tol di Indonesia semakin panjang. Pembangunan jalan ini selalu menuai pro dan kontra.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DALAM status akun *facebook* yang dimiliki, Ika menulis, ‘Alhamdulillah sampai Maospati Magetan (Jawa Timur). Tol Jakarta-Ngawi sangat membantu, mempercepat 6 jam’. Ibu satu anak yang berprofesi sebagai guru di salah satu SMA di Jakarta Barat itu merupakan pengguna kendaraan roda empat di antara ribuan pengguna lain, yang telah atau bisa menikmati Tol Trans Jawa yang baru dibuka pada Desember 2018 dan masih digratiskan.

Dengan melintas di atas jalan aspal mulus itu tidak hanya membuat Ika lebih cepat tiba untuk liburan sekolah di asal-usulnya, namun juga merasakan kenyamanan dalam berkendara tanpa harus dijepit oleh kendaraan roda empat yang lain, atau terganggu oleh sepeda motor seperti saat melintas di jalan biasa di Pantura.

Pengguna kendaraan roda empat menjelang tahun baru 2019, tepatnya Desember 2018, bisa *lenggang kangkung* di Tol Trans Jawa setelah pemerintah meresmikan penggalan-penggalan tol yang menghubungkan satu kota dengan kota yang lain, satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Sehingga mulai dari Merak, Banten, bisa tersambung hingga Pasuruan, Jawa Timur.

Pada 20 Desember 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 ruas jalan tol yang membujur di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketujuh ruas itu adalah Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo segmen



Presiden Joko Widodo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Salatiga-Kartasura, Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono, Jombang-Mojokerto seksi Bandar-kertosono, Gempol-Pasuruan seksi Pasuruan-Grati, dan Surabaya-Gempol seksi Relokasi Porong-Gempol.

Dalam peresmian tersebut, pria yang akrab disapa Jokowi itu tak sekadar ‘gunting pita’ namun juga menjajal lintasan Surabaya, Jawa Timur, hingga Semarang, Jawa Tengah, dengan menggunakan Bus Damri. Ketika upacara peresmian di Jembatan Kalikuto, jembatan yang selanjutnya menjadi *landmark* tol Kendal-Batang, Jawa Tengah, didampingi menteri terkait, anggota DPR, dan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ia mengatakan, dengan dibangunnya tol akan meningkatkan mobilitas logistik dan orang dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Dengan tersambungnyanya jalan tol yang baru diresmikan akan mengintegrasikan kawasan industri, ekonomi khusus, dan wisata.

Terkait dengan tempat wisata, menurut pria yang pernah menjadi Gubernur Jakarta itu, tempat wisata yang dilalui diharapkan bisa dikembangkan sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan, dan tentunya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tujuan dan daerah yang dilalui.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bahkan dengan tegas Jokowi menginginkan *rest area* yang ada di seluruh tol berfungsi tidak hanya seperti yang kita lihat saat ini. Di tempat istirahat bagi para pengguna tol itu diharap juga diisi pelaku usaha ekonomi dalam skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk itu, sebagai Presiden, dia memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk merealisasikan keinginannya itu. "Saya sudah sampaikan ke Bu Rini dan Bapak Hadi Muljono agar *rest area* digunakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah", ujarnya seperti termuat dalam sebuah berita online. Sektor itu, menurut mantan Walikota Solo itu, penting sebab merupakan unggulan kabupaten atau daerah. Dengan masuknya sektor usaha skala itu ke tempat persinggahan yang berada di pinggir tol diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

Terlepas dari dampak positif pembangunan tol, peresmian 7 ruas yang dilakukan oleh alumni Fakultas Kehutanan UGM itu menambah panjang tol di Indonesia. Proses pembangunan yang dilakukan selama 4 tahun itu mampu menambah panjang tol yang mencapai 423,17 km. Itu baru separuh dari target pembangunan selama 5 tahun yang ingin mencapai, yaitu 1.150 km. Di antara target yang ada adalah menghubungkan Merak hingga ujung timur Pulau Jawa,

Banyuwangi, Jawa Timur.

Harus diakui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Harian *Kompas*, 20 Desember 2018, menulis, apa yang dilakukan oleh Jokowi sama seperti kejadian dua abad yang lalu. Saat Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Herman Willem Daendels, memulai pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Cepat tersambungnyanya jalan antarkota, antarprovinsi, via tol membuat warga Semarang, Kurnianto, terheran-heran dan terkagum-kagum. Kepada *Kompas*, Kurnianto berkata: "Saya selalu berpikir baru cucu saya nanti yang akan menikmati tol Jakarta-Semarang. Tak disangka minggu depan saya sudah bisa



Raden Soediro

melewatinnya".

Meski apa yang dilakukan oleh Joko Widodo sebuah prestasi, namun pembangunan tol di Indonesia tidak dilakukan secara merta, *sim salabim*, atau semalam jadi. Rencana pembangunan tol di negeri sudah digagas oleh Raden Soediro ketika menjabat Walikota Jakarta (sebelum menjadi daerah khusus ibukota) pada periode 1953-1960. Raden Soediro menyatakan, perlunya Jakarta mempunyai jalan bebas hambatan berbayar. Dia punya alasan, kenapa harus berbayar. Kerena sang Walikota punya pengalaman saat membangun Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan MH. Thamrin, di mana dana yang dimiliki untuk menyelesaikan proyek itu semakin menipis. Untuk itu, dia mengusulkan untuk mencari dana tambahan lewat jalan berbayar. Jalan berbayar, menurut Soediro, sudah ada di beberapa Negara, seperti Amerika Serikat. Untuk memungut tarif maka di ujung Jalan Thamrin didirikan pintu gerbang (*gate*) untuk menarik biaya bagi kendaraan yang hendak melintas.

Bersama Badan Pemerintah Harian Kotapraja Jakarta, pada 1955, dia mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Jakarta, untuk pembangunan jalan berbayar. Sayang gagasan yang dilontarkan itu ditolak oleh mayoritas wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat daerah itu. Mereka menolak dengan alasan, pintu gerbang yang ada akan menghambat laju lalu lintas yang lain. Selain itu, kutipan uang merupakan bentuk pungutan pada masa kolonialisme. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial menyewakan gerbang pemungutan tol kepada kalangan Tionghoa.

Soediro heran dengan alasan penolakan itu, sebab bila sistem berbayar dianggap ketinggalan zaman atau bentuk era kolonialisme, mengapa sistem itu masih ada di Amerika Serikat. Dia mempunyai pengalaman saat berkunjung ke negeri Paman Sam itu pada 1951. Dalam perjalanan dari New York ke Washington, di beberapa titik perjalanan, mobil yang ditumpanginya membayar jalan tol. Dia pun bergumam, "Apakah dengan demikian di Amerika hingga



Presiden Soeharto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

saat ini tol itu juga dianggap sebagai pajak kuno?”

Gagasan Soediro pada masanya bisa saja ditolak, namun di era Presiden Soeharto, gagasan itu direalisasikan. Pada 1973, dibangunlah jalan yang menghubungkan Jakarta-Bogor. Jalan itu dirancang sebagai jalan biasa, bukan tol, namun ketika jalan yang mempunyai panjang 50 km — dan, ada yang menyebut 59 km — itu rampung pada 1978, ada keinginan pengoperasian, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan dilakukan tanpa membebani anggaran pemerintah. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum yang saat itu dijabat Ir. Soetami mengusulkan kepada Presiden agar status jalan yang ada diubah, dari jalan biasa menjadi tol.

Keinginan tersebut diiyakan oleh Soeharto. Buktinya, 2 minggu sebelum jalan

itu diresmikan, ditandatangani PP. No. 4 Tahun 1978 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero yang mengurus dan mengelola infrastruktur jalan raya. Satu minggu sebelum peresmian, tepatnya 1 Maret 1978, berdirilah badan usaha persero PT Jasa Marga (Persero).

Tepat 9 Maret 1978, Soeharto meresmikan jalan yang biaya pembangunannya Rp 350.000.000,00 perkilomernya itu. Pada saat peresmian, yang ada baru Jakarta-Citeureup. Dalam sambutan peresmian yang berlangsung di pintu gerbang Pondok Gede, Soeharto mengatakan, tol ini merupakan jalan terbaik yang kita miliki. Pria asal Kemusuk, Bantul, Jogjakarta, itu amat bangga dengan jalan yang dirintis sejak 1973 itu akhirnya rampung dan diresmikan. “Ini merupakan jalan bebas hambatan pertama di Indonesia”,

ucapnya.

Dibandingkan dengan negara lain, Soeharto menjamin bahwa mutu tol yang diresmikan itu tidak kalah dengan jalan serupa di negara maju. Pembangunan yang selanjutnya dikenal dengan Tol Jagorawi itu dilandasi untuk mengimbangi semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian, dan cepatnya pembangunan di Jakarta. Di samping untuk pemerataan pembangunan agar tak hanya terpusat di Jakarta.

Pada masa itu penggarapan diserahkan kepada kontraktor asal Korea Selatan. Terlibatnya kontraktor asal Negeri Ginseng dalam proses pembangunan membuat beberapa kalangan, termasuk Menteri Pekerjaan Umum di Era Soekarno, Roosseno Soerjohadikoesoemo, protes. Mereka protes karena menyerahkan pembangunan pada kontraktor asing, dan itu akan membuat orang Indonesia menjadi pekerja kasar atau kuli. “Terus terang saja, beginilah keadaan dalam negeri kita. Apa kita mau menjadi kuli? Insinyur Indonesia pun bisa menjadi kuli”, ujar Roosseno geram. Roosseno menyatakan keyakinannya, bangsa Indonesia sanggup menggarap proyek besar, termasuk infrastruktur jalan tol.

Menanggapi ketidaksukaan pada kontraktor asing yang terlibat dalam pembangunan, Soeharto dengan gaya khasnya, kalem, menuturkan: “... walaupun kontraktor dari asing, namun tidak sedikit pikiran dan tenaga kita yang ikut serta menyelesaikan jalan yang istimewa itu”. □

AWG/dari berbagai sumber





Tol di Atas Laut, Impian Jadi Kenyataan

Jalan tol dibangun susul-menyusul sehingga banyak ruas yang tersambung dan bisa dinikmati masyarakat. Di era SBY, tol dibangun di atas laut. Faktor penghormatan kepada budaya membuat Bali Mandara menjadi monumental.



Tol Bali Mandara (Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera)

SETELAH sukses pembangunan jalan tol Jagorawi tidak membuat Presiden Soeharto berpuas diri. Pembangunan tol yang mengarah ke dan dari Jakarta terus digenjut. Untuk menyambungkan Tangerang, Merak, Serang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, agar lebih lancar dan bebas hambatan, tol pun dibangun. Pada 1980, pemerintah membangun tol Jakarta-Merak. Jalan yang menghubungkan kawasan Tomang dengan Pelabuhan Merak se-

panjang 98 kilometer itu terbagi dua bagian, yakni: Jakarta-Tangerang, dan Tangerang-Merak. Pembangunan selesai pada 1984 dan bisa dilintasi pada tahun itu juga.

Setelah pembangunan Jakarta-Merak, selanjutnya pemerintah pada 1985 membangun jalan Jakarta-Cikampek. Jalan sepanjang 73 km ini menghubungkan Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Tol ini mulai digunakan pada 1988.

Selanjutnya, susul menyusul pembangunan

jalan tol dilakukan. Menurut catatan yang bertebaran di *online*, di era Soeharto, tol yang dibangun sepanjang 490 km. Pada masa Presiden BJ. Habibie, dibangun sepanjang 7,2 km; Era Gus Dur 55 km; selanjutnya di era Megawati 34 km, dan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tol yang dibangun sepanjang 212 km.

Ada yang monumental pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal pembangunan jalan tol. Pada era ini dibangun tol di atas laut, yakni tol Bali Mandara (Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera). Tol yang berada di atas perairan Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali, itu menghubungkan kawasan Nusa Dua, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, dan Benoa. Istimewanya, selain dibangun di atas laut, lintasan ini juga menyediakan jalur buat sepeda motor sehingga pengguna roda dua ini bisa menikmati leganya jalan.

Dengan adanya tol sepanjang 12,7 km itu membuat perjalanan dari arah utara, Denpasar dan Sanur, untuk menuju ke Nusa Dua, Benoa di wilayah selatan, menjadi lebih ringkas dan cepat. Selain memotong jarak, juga tak terjebak pada kemacetan di kawasan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang dari hari ke hari semakin meningkat volume kendaraannya.

Dengan adanya Bali Mandara membuat Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di dunia yang memiliki tol di atas laut. Negara lain yang memiliki jalan serupa adalah China dengan *Jiaozhou Bay* dengan panjang 42 km; Amerika Serikat punya *Lake Pontchartrain Causeway* panjang 38,4 kilometer; dan *Chesapeake Bay* panjang 24,140 km; serta Malaysia dengan *Tol Penang* sepanjang 13,5 km.

proyek yang ada digarap oleh PT. Jasamarga Bali Tol, yang merupakan konsorsium Jasa Marga, Angkasa Pura I, Pelindo III, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Hutama Karya.

Bali Mandara, menurut Sumaryoto, dibangun untuk mengatasi jumlah kendaraan di kawasan pertemuan (Nusa Dua, Jimbaran, Tuban Badung, Sanur, dan Denpasar, *red*) yang semakin melonjak, apalagi di saat hari libur di mana wisatawan dalam negeri dan wisatawan mancanegara berdatangan. Jalan yang

dilakukan.

Sebagai bangunan yang berdiri kokoh di atas laut, maka bahan bangunan atau material yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan awet. Ini penting, sebab bangunan di atas laut memiliki ancaman korosi yang tinggi. Sebagai tol di pulau yang penuh budaya maka Bali Mandara tak boleh lepas dari budaya yang ada. Karena itu, karya arsitektur yang ada tetap mengangkat identitas Bali. Ini terlihat dari tiga pintu tol, yakni Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dalam *finance.detik.com*, 27 Juli 2012, diceritakan, kenapa tol itu dibangun di atas laut. Di situ dikisahkan, awalnya tidak dibangun di atas laut. Kepala Humas PT. Jasa Marga, Wasta Gunadi, mengungkapkan, rencana awal proyek itu dibangun melayang di darat, namun karena budaya di Bali tidak mengizinkan ada bangunan memiliki ketinggian melebihi pura, membuat rencana membangun tol melayang di darat diganti membentang di atas laut.

Wasta Gunadi mengungkapkan, Sumaryanto, seorang Deputy Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menggagas ide untuk membuat tol di atas laut di Bali. Dari sinilah akhirnya melibatkan Pemda dan

ada sebelumnya, *bypass Ngurah Rai*, sudah tidak mampu menampung kendaraan.

Untuk menjaga kelestarian alam, pembangunan tol itu tetap memerhatikan lingkungan yang ada. Untuk itu, konsep *green, strong, dan beauty* diusung dalam pembangunan. Ini menjadi komitmen agar ketika pengguna jalan melintas, mereka tidak hanya menikmati suasana yang lega dan lapang, namun juga suasana hijau dan ramah lingkungan. Untuk itu, selepas pembangunan, sebanyak 16.000 mangrove ditanam. Ribuan pohon yang habitatnya di pinggir laut itu difungsikan untuk menggantikan pohon-pohon sebelumnya yang mungkin tergerus saat pembangunan tol

semuanya bernuansa Bali.

Proyek yang memakan biaya sebesar Rp 2.4 triliun, dengan waktu penggarapan selama 14 bulan, diresmikan oleh Presiden SBY pada 23 September 2013. Saat meresmikan, pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu memberi nama Bali Mandara untuk tol itu. Maknanya, Bali yang agung, maju aman, damai, dan sejahtera. SBY menjelaskan, pembangunan Bali Mandara tanpa menggunakan dana APBN. "Pembangunan Bali Mandara dibangun oleh konsorsium BUMN", ujarnya seperti termuat dalam berita *online*. Bali Mandara termasuk karya monumental bangsa, karena dibangun di atas laut. "Setelah Indonesia merdeka, impian mem-



Presiden SBY

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bangun jalan di atas laut menjadi kenyataan”, tuturnya. Pembangunan Bali Mandara merupakan tonggak sejarah baru pembangunan konstruksi prasarana perhubungan di Tanah Air kita. “Mahakarya anak

bangsa dalam pembangunan infrastruktur yang membanggakan,” ujar dalam sambutan peresmian.

Selanjut SBY mengatakan, pembangunan infrastruktur mampu memacu dan mem-

percepat pertumbuhan ekonomi, industri, perdagangan, dan memperluas lapangan kerja. Maka, dalam kesempatan itu, dia mengundang pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah dalam pembangunan yang memiliki nilai komersial.

Sebelum jalan itu diresmikan, masyarakat diberi waktu untuk menikmati Bali Mandara dalam berbagai aktivitas, seperti jalan-jalan, bersepeda, dan berhenti di ruas tol untuk menikmati kokohnya struktur jalan, melihat keindahan alam perairan Teluk Benoa, dan Bukit Jimbaran.

Saat KTTAPEC, Oktober 2013, para kepala pemerintahan dari negara yang terhimpun dalam organisasi itu melintasi jalan tol itu untuk menuju ke tempat acara, di Nusa Dua. Bagian protokol memang mengarahkan mereka melintasi Bali Mandara. □

AWG/dari berbagai sumber

Tol Balikpapan-Samarinda Dibiayai APBD

Membangun jalan tol tak perlu menunggu kemauan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memulai pembangunan tol dengan biaya APBD. Jalan bebas hambatan menghubungkan Balikpapan-Samarinda dapat memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju ke Samarinda, atau sebaliknya.



BILA ke Kota Samarinda dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, atau sebaliknya, mobil yang kita tumpangi melaju, dan dalam hitungan jam tiba di Bukit Soeharto — sebuah bukit yang berada di

Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, atau daerah yang memisahkan Balikpapan dan Samarinda. Bukit yang memiliki luas sekitar 61, 850 hektar itu punya daya tarik tersendiri.

Berada di pertengahan antara Balikpapan-Samarinda, di sini menjadi tempat istirahat bagi kendaraan beserta penumpangnya setelah menempuh perjalanan jauh, baik dari Balikpapan atau Samarinda. Di sini pun terdapat sebuah restoran yang menyediakan macam menu, termasuk tahu Sumedang.

Namun, pengalaman di Bukit Soeharto itu akan menjadi kenangan apabila ruas tol Samarinda-Balikpapan rampung dan dibuka untuk umum. Rencananya, April 2019, tol sepanjang 99,35 km itu bisa dilalui masyarakat. Tol yang menghubungkan dua kota besar di Kalimantan Timur itu digagas dan diprakarsai oleh gubernur mereka sendiri, Awang Faroek Ishak. Pria yang pernah menjabat Bupati Kutai itu melakukan *groundbreaking* pembangunan pada 12 Januari 2011 dengan ditandai pemancangan batu pertama di Manggar, Balikpapan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tujuan pembangunan tol itu pastinya sama dengan pembangunan jalan tol lainnya, yakni memperlancar mobilitas penduduk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor lain. Soalnya, meningkatnya volume kendaraan di Kalimantan Timur tak mampu ditampung oleh jalan yang ada saat ini. Untuk itu, tol Balikpapan-Samarinda menjadi jawabannya.

Tol Balikpapan-Samarinda merupakan jangkar untuk menghubungkan kabupaten yang lain, seperti Penajam Pasir Utara, Bontang, hingga Kutai Timur. Tol itu sebagai solusi untuk menghubungkan kawasan industri di Kalimantan Timur. Itu merupakan gagasan dan rencana besar Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Bila sudah berfungsi maka tol itu merupakan tol pertama terpanjang di luar Jawa. Tak hanya itu, tol ini memiliki kelebihan, yakni dibangun atas pembiayaan dari APBD

Kalimantan Timur. Pembangunan jalan tol ini terdiri dari V seksi, yakni: Seksi I Balikpapan-Samboja 21,95 km; Seksi II Samboja-Muara Jawa 30,05 km; Seksi III Muara Jawa-Palaran 18,20 km; Seksi IV Palaran-Samarinda 17,15 km; dan Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan 11,09 km. Tahap I (2011-20113) dibiaya APBD Kalimantan Timur. Lalu, Tahap II (2015-2018) selain dibiayai APBD juga didukung oleh APBN, dan bantuan Cina.

Untuk merampungkan jalan itu, banyak kontraktor yang terlibat, seperti PT. Waskita Karya, PT. Bangun Cipta, PT. Wika, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, dan kontraktor lainnya.

Dalam *kompas.com* (16/08/2018) dikabarkan, pelaksanaan pembangunan tol ini tidak semulus diperkirakan. Direktur Utama PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda (JSB), STH. Saragi mengungkapkan, pembebasan lahan merupakan masalah utama yang

membuat pembangunan menjadi tersendat. Itu terjadi pada Seksi IV. Tak hanya itu, yang juga menjadi masalah adalah tanah lunak sepanjang 2 km dan kedalaman 40 meter. Juga menjadi problem, kepemilikan lahan tak luas, namun dimiliki orang yang berbeda-beda. "Masalah pelebaran jalan, tanah lunak, dan lahan yang harus kecil-kecil yang harus dibebaskan membuat pembangunan menjadi tersendat," ujar Saragi seperti yang dikabarkan sebuah media *online*.

Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Refly Ruddy Tangkere, dalam media online yang sama (7/9/2018) mengungkapkan bahwa jalan bebas hambatan yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda seharusnya bisa beroperasi akhir 2018. Namun mengalami keterlambatan akibat adanya kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis, terdapat lahan lunak di titik tertentu, terutama Seksi I dan Seksi II, sehingga harus memotong Taman Hutan Rakyat (Tahura). Dari sini membutuhkan konsolidasi lahan selama 6 bulan.

Sedang kendala non teknis, terkait masalah pembebasan dan adanya tambahan lahan yang perlu dibebaskan untuk memenuhi kebutuhan, seperti simpang susun dan gerbang utama.

Saragi menyebutkan, perbandingan jarak Balikpapan-Samarinda, antara tol dan jalan biasa adalah 99,35 km dan 154 km. "Tak berbeda jauh", ujar Saragi. Meski demikian, menurut Saragih, dengan hadirnya tol membuat waktu tempuh kedua kota akan menjadi lebih singkat dan cepat. "Kalau jalan biasa ditempuh selama tiga hingga empat jam, sedangkan lewat tol bisa satu jam dengan kecepatan 80 km/jam", ujarnya.

Tersambungnya Balikpapan-Samarinda lewat tol membuat arus logistik antara kedua kota menjadi lebih terbantu. Dia memperkirakan tol itu akan dilalui oleh sekitar 10.000 kendaraan per hari. Dari sinilah biaya, waktu, dan peluang bisnis akan lebih banyak diraih, dengan *shortcut* yang lebih cepat itu. □

AWG/dari berbagai sumber



Prof. Bujang Rahman

Rektor Universitas Lampung

Generasi Muda Indonesia Harus Bangkit



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMILU 2019 tinggal sedikit hari lagi, namun hingar bingarnya sudah sangat terasa saat ini, terutama untuk Pilpres 2019 yang mengusung dua pasangan calon Presiden, yakni Joko Widodo – Ma'ruf Amien dan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno.

Saya merasa hingar bingar yang selama ini terkesan berpotensi konflik, karena perbedaan pilihan yang sangat tajam, terutama di dunia maya. Masing-masing pendukung bukan hanya menggembarkan-gembarkan prestasi calon pilihannya, tapi juga menjelek-jelekkkan calon lainnya. Bahkan menjelek-jelekkkan pendukung calon lain.

Hal ini sangat disayangkan. Semestinya perbedaan pilihan tidak lantas membuat konflik atau permusuhan antarsesama anak bangsa. Tapi, saya sedikit agak lega karena banyak sekali elemen bangsa berupaya agar potensi konflik jelang Pemilu 2019 hilang. Saya rasa pemerintah dan negara mesti mendukung upaya-upaya tersebut.

Namun, masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda mahasiswa, mesti secara sadar diri turut berkiprah berupaya agar Pemilu 2019 berlangsung damai dan sukses tanpa konflik. Banyak cara yang diupayakan mahasiswa, seperti dari diri sendiri atau kelompok untuk memahami bahwa Pemilu 2019 itu harus damai karena melibatkan semua untuk bangsa.

Setelah itu, mulailah untuk melakukan edukasi di lingkungannya masing-masing, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan di,manapun saja bahwa Pemilu 2019 adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk memecah belah. □

DER

Vincente Matiano

Pejuang Disabilitas

Negara Mesti Mendukung Prestasi Disabilitas

RAKYAT Indonesia hidup dalam keberagaman yang sangat luar biasa, mulai dari suku, agama dan lainnya, dan juga keberagaman kondisi seperti para disabilitas. Para disabilitas adalah juga warga negara yang memiliki hak serta kewajiban yang sama di Indonesia.

Prestasi warga disabilitas dalam berbagai bidang, termasuk olahraga yang juga terbilang sangat baik dan banyak. Namun, masuk bisa dinikmati oleh warga disabilitas, terutama fasilitas publik masih terkendala. Saya harap negara, dalam hal ini pemerintah, lebih memerhatikan lagi soal itu.

Soal prestasi para disabilitas, terutama atlet olahraga yang sudah berprestasi di tingkat dunia, saya berharap agar diperhatikan lagi untuk masa depannya. Setidaknya akses fasilitas dan infrastruktur olahraga para atlet mesti terus ditambah, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, agar para atlet disabilitas bisa maksimal dalam berlatih dan mampu menorehkan prestasi lebih baik lagi untuk Indonesia. □



DER

Kepulauan Sangihe

MPR Tinjau Pembangunan di Perbatasan Indonesia-Filipina



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PAGI itu, 6 Desember 2018, di tengah guyuran hujan deras, rombongan MPR yang dipimpin Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan mengunjungi Rumah Sakit Pratama. Fasilitas kesehatan untuk umum yang berada di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, itu tengah dalam tahap penyelesaian akhir. Diperkirakan Januari 2019, satu dari 64 Rumah Sakit Pratama yang ada di Indonesia itu siap melayani masyarakat.

Kedatangannya bersama anggota MPR seperti Guntur Sasono dan Libert Kristo Ibo dari Fraksi Demokrat, Marhany Pua dari Kelompok DPD, Fadholy dari Fraksi Nasdem, dan Jendry Alting Keintjem dari Fraksi PDI Perjuangan disambut langsung oleh Bupati Sangihe, Jabes E. Gaghana.

Di rumah sakit yang tak jauh dari Bandar Udara Naha itu, rombongan MPR meninjau fasilitas yang ada di sana, termasuk lorong dan kamar yang ada di rumah sakit tersebut. Jabes menjelaskan bahwa rumah sakit ini dibangun pada 2017. Meski sudah siap dibuka untuk umum, namun rumah sakit ini belum memiliki dokter spesialis dan dokter gigi. "Kita membuka lamaran, namun tidak ada yang

daftar", ungkapnya.

Selepas mengunjungi Rumah Sakit Pratama, rombongan selanjutnya menuju ke Puskesmas Enemawira. Di Puskesmas yang berada di ibukota Tabukan Utara, rombongan disambut oleh para perawat dan dokter. Puskesmas ini sudah lama ada sehingga fasilitas terlihat lebih lengkap. Sama seperti di Pratama, di tempat ini para wakil rakyat meninjau bagian perbagian yang ada.

Setelah meninjau Puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap, rombongan MPR selanjutnya menuju Pelabuhan Petta. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 12 pelabuhan yang ada di Sangihe. Di tempat ini rombongan berbincang dengan aparaturnya Kementerian Perhubungan.

Tak lama kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju ke ibu kota Sangihe, Tahuna. Di Tahuna, delegasi MPR juga memantau perkembangan fasilitas kesehatan yang ada di sana. Di pinggiran Tahuna, rombongan melihat pengembangan Rumah Sakit Daerah Liun Kedange. Di kawasan ini ada bekas *groundbreaking* untuk pengembangan rumah sakit. Yaitu, perluasan fasilitas sebagai upaya untuk meningkatkan rumah sakit menjadi Tipe B.



Usai meninjau beberapa fasilitas kesehatan, selanjutnya rombongan melakukan tatap muka dengan masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, aparat sipil negara, dan camat se-Sangihe di Pendopo Kabupaten. Dalam kesempatan itu, Mangindaan menyebutkan, banyak masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini. "Dari banyak masalah itu, ada sudah ada yang teratasi dan ada pula yang belum", ungkapnya.

Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyebutkan, kawasan perbatasan merupakan wilayah yang penting dan strategis. Untuk itu, perlu dikunjungi dan ditinjau agar apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diketahui. "Jangan sampai masyarakat perbatasan tak sejahtera", ujarnya. MPR, menurut Mangindaan, sangat serius dalam

melihat perbatasan Indonesia dengan negara lain, baik di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, maupun di Sumatera. Mangindaan menyatakan, semua daerah perbatasan pernah dikunjungi oleh MPR. Dan, "Ternyata butuh perhatian pada banyak hal", ungkapnya.

Kunjungan ke wilayah perbatasan itu, kata Mangindaan, juga merupakan program yang telah dibahas dalam pertemuan yang dipimpinannya di Manado, Sulawesi Utara, pada November 2015. "Setelah 2 tahun kita cek apa yang sudah direalisasikan oleh instansi dan kementerian terkait", ujarnya.

Terkait masalah kesehatan, dia berharap agar segera diperhatikan. Rumah sakit yang dibangun dengan dana konsentrasi mampu mencukupi pembangunan gedung dan isinya. Namun, fasilitas rumah dinas untuk dokter

belum dibangun. Untuk itu, menurut Maningaan, perlu anggaran tambahan dari kementerian untuk membangun rumah dinas dokter.

Sedang untuk mencukupi tenaga dokter, dia berharap agar anak-anak SMA di Sangihe didorong kuliah di Fakultas Kedokteran. Setelah lulus kembali ke kampung halaman dan mengabdikan menjadi dokter. Sambil menunggu anak-anak Sangihe kuliah di Fakultas Kedokteran, pemerintah kabupaten hendaknya merekrut dokter dengan system, semisal pegawai tidak tetap (PTT) dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Selanjutnya Mangindaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati yang telah memprioritaskan pembangunan kesehatan. "Apa jadinya kalau masyarakat tak sehat", tambah Mangindaan.

Ia juga memuji Sangihe telah mentas dari



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

daerah kemiskinan. Oleh karenanya, kabupaten ini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pedesaan, namun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, Mangindaan berharap, tunjangan yang selama ini dianggarkan tetap diberikan kepada Sangihe. “Untuk itu, saya akan bicara dengan Menteri Pedesaan”, ungkapnya. Dia mengibaratkan, meski bayi dinyatakan sehat bukan berarti susu tak diberikan. “Susu tetap diberikan agar bayi tetap sehat”, tuturnya.

Selepas berdialog dengan masyarakat, delegasi MPR mengunjungi Pelabuhan Tahuna. Di sini, Mangindaan menyaksikan kapal feri Mercy Teratai berangkat menuju ke Manado. Ia memberi lambaian tangan kepada penumpang yang sudah berada di kapal besar tersebut. “Semoga Tuhan memberkati”, spanya ramah.

Di pelabuhan ini Mangindaan juga meng-

adakan sambung rasa dengan masyarakat. Mantan Menteri Perhubungan itu ingin agar transportasi, khususnya angkutan laut, bersinergi antarpulau. Kabupaten kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, hendaknya berada dalam satu sinergi, satu jalur, satu alur. Transportasi yang bersinergi itu tidak hanya untuk menunjang proses perdagangan, namun juga untuk melayani kesehatan.

Agar transportasi berjalan efisien dan efektif, dia mengusulkan agar kapal yang ada tidak hanya mengangkut penumpang atau cargo saja, namun mengangkut cargo. “Dwi fungsi”, ujarnya. Dengan cara ini, menurut Mangindaan, tidak membuat jasa pelayaran rugi. “Hal demikian juga saya lihat di Australia”, ungkapnya.

Menjelang Natal dan Tahun baru, masyarakat Sulawesi Utara sangat membutuhkan

banyak keperluan. Ia berharap, agar Kementerian Perhubungan mampu menyediakan kapal sehingga di saat Natal dan Tahun Baru, masyarakat bisa merayakan dengan gembira.

Kepada masyarakat, aparat sipil negara dan pihak terkait, Mangindaan mengatakan, MPR merupakan representasi dari anggota DPR dan DPD. Untuk itu, masalah yang ada akan dibawa ke komisi-komisi terkait. “Sebagai mitra pemerintah maka masalah yang ada akan diselesaikan”, ujarnya.

Tugas pokok MPR, menurut Mangindaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dan menyosialisasikan Empat Pilar. “Nilai-nilai kebangsaan masyarakat Sangihe tak perlu dirisaukan, karena mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai benteng terdepan penjaga bangsa”, ujarnya. □

AWG

Sosialisasi untuk Hipakad

Manfaatkan Ponsel untuk Persatuan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

TUJUH RATUS orang dari Himpunan Putera-Puteri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad), putera-puteri Polisi, dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, memenuhi Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 3 Desember 2018. Mereka berkumpul di gedung yang biasa digunakan Sidang Paripurna DPD itu untuk mengikuti Empat Pilar MPR. Acara

ini diinisiasi oleh Hipakad.

Ketua umum Hipakad, Hariara Tambunan, mengucapkan terima kasih bisa bekerja sama dengan MPR untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan kebangsaan kepada para peserta. Meski Indonesia sebagai rumah bersama, di mana beragam suku, bahasa, dan agama hidup tersebar di ribuan pulau di bawah naungan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, namun bangsa ini tidak lepas dari berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. “Ancaman ini khususnya menyasar generasi muda”, papar Hariara. Untuk itulah, menurut Hariara, Sosialisasi Empat Pilar perlu dilakukan.

Hariara mengharapkan nilai-nilai yang didapat harus diimplementasikan dalam keseharian. “Jangan diingat dan dipahami





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hanya di dalam gedung ini saja”, ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Hariara juga mengajak para peserta acara ini untuk memerangi hoax.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta member apresiasi kepada peserta, sebab mereka mempunyai pandangan dan komitmen untuk menjaga ideologi bangsa dan negara. “Ini yang harus diperkuat”, ujarnya. Apalagi di era ini berbagai ideologi mudah tersebar ke seluruh anak bangsa melalui telepon seluler (ponsel).

Pria yang juga menjabat Ketua DPD itu

menyebut, ponsel merupakan sarana yang dapat memudahkan pekerjaan, namun sekaligus juga bisa menjerumuskan. Dengan ponsel pengguna dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Pengguna dapat membaca berita dari mana saja, bahkan berbarengan dengan saat kejadian. Pengguna tidak hanya bisa membaca berita kiriman, namun juga mampu menyebar berita atau informasi, entah itu fakta ataupun ilusi.

Dari sinilah dua sisi manfaat ponsel terjadi. “Bisa menjadi penyebar kebaikan sekaligus berpotensi penebar kebohongan”, ungkap-

nya. Pria asal Kalimantan Barat menegaskan, agar ponsel dapat memperkuat persatuan melalui jejaring media sosial. Contohnya? “Melalui dunia maya anggota Hipakad memposting status benderaku Merah Putih”, tuturnya. Status yang diunggah oleh Hipakad bisa menjadi viral. Status itu akan menyadarkan bangsa ini bahwa Merah Putih harus terus berkibar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara tantangan negatif penggunaan ponsel itulah, menurut Oesman Sapta, membuat MPR semakin yakin penguatan nilai-nilai kebangsaan mutlak dilakukan. “Kami tidak ingin generasi penerus tidak mengenal dan mengerti ideologi bangsa dan negara”, paparnya. Tidak ada satupun negara yang kuat tanpa ideologi. Negara juga tidak dapat berdiri jika rakyatnya tidak memahami dan mengimplementasikan ideologinya.

Keberadaan Indonesia yang terdiri beragam suku, budaya, dan adat istiadat merupakan kekayaan. Namun dia mengingatkan, keberagaman itu apabila tidak dikelola dengan persatuan justru bisa menjadi pemecah bangsa. “Tanpa persatuan mustahil ada kesejahteraan dan pembangunan”, tegasnya.

AWG



Deklarasi Warganet se-Indonesia

Bijak Bermedia Sosial Sesuai Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SESJEN MPR Ma'ruf Cahyono menyebutkan, netizens dan penggiat media sosial (warganet) adalah komunitas masyarakat yang strategis. "Untuk itu kita ajak menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika", ujar Ma'ruf Cahyono di hadapan 44 *bloger*, *netizen*, dan penggiat media sosial (warganet) yang datang dari 11 provinsi yang berkumpul di Jakarta, 9 Desember 2018.

Acara yang disebut sebagai forum silaturahmi untuk mengusung visi yang sama bagi warganet setelah sebelumnya mereka dibekali mengenai Empat Pilar. Dalam kegiatan yang dilaksanakan 7 hingga 9 Desember 2018 ini mereka mendiskusikan dan membahas mengenai implementasi Empat Pilar dalam dunia maya dan nyata. Selepas acara, Ma'ruf Cahyono yakin, warganet paham nilai-nilai luhur bangsa dan konstitusi negara. Selanjutnya, setelah paham, Ma'ruf berharap, warganet dapat meyisipkan pemahaman tentang Empat Pilar itu saat menulis atau membikin status dalam *online*.

Tulisan atau status yang mereka unggah, diharap mampu menjadi penyejuk suasana

di masyarakat. "Masyarakat sekarang sangat dinamis", tuturnya. Seperti diketahui, sejak Pilkada Jakarta 2017 dan menjelang Pemilu Presiden 2019, media sosial menjadi ajang saling dukung kepada salah satu calon. Dia menyangkan status yang ada cenderung kasar, membully, menghina, melecehkan satu dengan yang lain. Hal inilah yang dikhawatirkan membuat terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat.

Menghadapi yang demikian maka MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar dengan melibatkan warganet. Buah dari kegiatan itu, warganet membuat deklarasi yang tujuannya menggunakan media sosial dan online sebagai informasi yang sehat. Deklarasi itu dibacakan oleh Dila dan Surya, selaku perwakilan warganet, di hadapan Ma'ruf Cahyono, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, dan warganet lainnya.

Deklarasi itu berisi empat poin, yaitu: *Pertama*, tidak menyebarkan konten hoax dan SARA. *Kedua*, bijak bermedia sosial sesuai dengan Pancasila. *Ketiga*, menerapkan Empat Pilar MPR dalam literasi digital. Dan, *keempat*, bersatu membuat keren Indonesia dengan konten yang positif.

Komitmen yang dibuat oleh mereka ini dinilai sangat luar biasa. Keempat poin pada intinya sebagai instrumen untuk menjembatani segala pihak yang ada. "Mengajak masyarakat dan pihak lain untuk menciptakan suasana menyejukan di tahun politik", paparnya.

Deklarasi warganet adalah sebagai upaya meminimalisir pelecehan dan penghinaan berbau SARA dan hoax. "Penggunaan teknologi informasi harus diorientasikan pada Empat Pilar", ucap Ma'ruf Cahyono. Dia menyebut, deklarasi itu juga menuju sasaran langsung bagi warganet, yakni menjadikan Empat Pilar sebagai literasi.

Pria asal Banyumas, Jawa Tengah itu menyebutkan, deklarasi yang disepakati itu lebih luar biasa lagi apabila deklarasi itu diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Sasaran dari deklarasi itu tidak hanya warganet, tapi lebih luas lagi yakni masyarakat umum.

Harus diakui teknologi informasi saat ini tidak hanya disukai oleh anak muda, tapi orangtua pun mulai menggandrungi media sosial. "Orangtua pun mulai beradaptasi dengan teknologi yang ada", ungkapnya.



Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Cahyono mengajak warganet bersama MPR untuk ikut memperkuat, merawat, dan menjaga Indonesia. "Bila warganet ikut menyosialisasikan Empat Pilar maka kedudukannya sama dengan anggota MPR", paparnya. "Mari menyosialisasikan Empat Pilar dengan maksimal", harapnya.

MPR, menurut Ma'ruf Cahyono, adalah rumah kebangsaan. Sebagai rumah bersama, kata Ma'ruf Cahyono, siapapun berhak menyampaikan aspirasi untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dengan ideologi yang bisa mendinamisasikan masyarakat. Pancasila adalah ideologi yang dinamis dan ideologi yang hidup. Untuk itulah Pancasila perlu diimplementasikan dalam keseharian. "Perlu membumikan Pancasila", tuturnya.

Rumah kebangsaan harus didekati dengan semangat untuk mewujudkan cita-

cita bangsa dan Negara, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Selain sebagai rumah kebangsaan, MPR juga pengawal Pancasila. "Tak ada bangsa besar yang tak punya ideologi", ujarnya. Untuk itu, Ma'ruf Cahyono berharap kepada warganet dengan kecerdasan yang ada untuk mempublikasikan nilai-nilai Pancasila dalam tulisan atau status di online.

MPR juga menjadi pengawal kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi harus dipastikan bahwa yang mempunyai kedaulatan mendapat kekuasaan. "Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat", ucapnya.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, bangsa ini selalu mengedepankan cara ini untuk mengambil keputusan. Dari sinilah semua akan merasa

memiliki dari apa yang diputuskan. "Musyawarah akan memunculkan keadilan", paparnya.

Selama mengawal Pancasila, bangsa ini tak lepas dari pengaruh dan tekanan yang sangat luar biasa, datang dari dalam atau luar negeri. "Saya khawatir kalau Pancasila tak dijaga", ucapnya. Untuk itu, Ma'ruf Cahyono berharap, warganet perlu menyampaikan pesan yang kuat untuk menjaga ideologi dan persatuan bangsa.

Ma'ruf Cahyono menyebut, Indonesia adalah negara yang besar yang perlu dijaga dan dirawat. Merawat Indonesia dengan cara memiliki ketahanan bangsa agar mampu mengatasi dan menghadapi perubahan zaman. Perubahan zaman harus diikuti dengan ideologi yang dinamis, meski demikian tak boleh membuat kita keluar dari jati diri bangsa.

Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah yang juga hadir dalam kegiatan itu menuturkan, kegiatan MPR yang melibatkan warganet telah dilakukan di berbagai kota. Selain Jakarta, juga di Solo, Jogja, Bogor, Bandung, Lampung, Makassar, Manado, Medan, Surabaya, Malang, dan kota lainnya.

"Di akhir tahun ini kita kumpulkan *leader* warganet dari berbagai daerah", ujarnya. Dia berharap, setelah dibekali dengan pengetahuan Empat Pilar, mereka dapat menularkan apa yang didapat tidak hanya kepada warganet di daerah, namun juga kepada masyarakat lewat tulisan atau status. "Mereka kita ajak untuk ikut menyosialisasikan Empat Pilar", ujarnya. "Kita sudah bersama mereka selama 3 tahun", tambahnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AWG

Guru PPKN se- Jakarta Selatan

Melani Berharap, Wakil Rakyat Kalangan Perempuan Makin Banyak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MUDAH-MUDAHAN wakil rakyat dari kalangan perempuan di tahun 2019 semakin banyak”, harap anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli. Di hadapan ratusan Guru PPKN se-Jakarta Selatan, dalam Sosialisasi Empat Pilar, Gedung GBHN Lt. 3, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 13 November 2018, Melani menekankan, agar dalam proses pembuatan undang-undang di DPR, kaum perempuan lebih bisa mengkritisi dan mewarnai. “Agar undang-undang kita berbasis gender dan tak merugikan kaum perempuan”, paparnya.

Puteri Pahlawan Nasional J. Leimena itu mengakui jumlah anggota DPR dari kalangan perempuan dari waktu ke waktu semakin menurun. Untuk mencegah hal yang demikian dibuatlah aturan yang mengharuskan quota 30% bagi kaum perempuan untuk menjadi caleg. Aturan ini harus dijalankan oleh partai politik. “Nomer urut satu sampai tiga dalam daftar calon anggota DPR, satu di antaranya harus perempuan”, ungkapnya.

Kepada para guru yang datang dari berbagai sekolah, Melani mengatakan, tugas wakil rakyat merupakan tugas mulia, bila mereka benar-benar melaksanakan fungsi-

nya. Selanjutnya, Melani menjelaskan tugas wakil rakyat, yakni: membuat undang-undang, budgeting, dan melakukan pengawasan. Sebagai wakil rakyat mereka bekerja hingga malam bahkan subuh. “Ini yang tak disorot oleh media”, ungkapnya. Sembari tersenyum, dia mengungkapkan bahwa yang disorot oleh media malah yang tidur saat rapat atau yang kena OTT. “Mungkin ini yang menarik buat media”, paparnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR Periode 2009-2014 ini menyebut, bahwa Sosialisasi Empat Pilar dilakukan oleh MPR dalam periode kepemimpinannya. Metode untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dilakukan dengan berbagai cara, seperti lomba cerdas cermat, diskusi, focus group discussion, training of trainer. “Di zaman saya bahkan ada lomba menggambar Empat Pilar dengan peserta anak PAUD dan SD”, ungkapnya. Dalam melakukan sosialisasi, jelas Melani, MPR melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

Empat Pilar bagi Melani perlu diimplementasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Kita harus bangga dengan Empat Pilar”, tuturnya. Bagaimana tidak bangga, orang luar pun memuji Pancasila. Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat



berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu memuji Indonesia, karena sangat beruntung mempunyai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Melani, Empat Pilar penting diimplementasikan dalam keseharian, apalagi menjelang Pemilu 2019. “Jangan gara-gara

beda pilihan membuat kita pecah. Kalau bangsa ini pecah, itu akibat sikap tidak menghormati jasa para pahlawan,” katanya.

Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, yang memandu acara sosialisasi itu menyebutkan, bahwa MPR juga melakukan sosialisasi melalui seni dan budaya

masyarakat. Ini salah satu cara MPR untuk menjaga dan merawat agar seni dan budaya yang ada di masyarakat jangan sampai punah. “Generasi muda jangan hanya senang K-Pop, kesenian daerah pun juga harus dicintai”, paparnya. □

AWG

PSB Labuhanbatu Selatan

Lewat Wayang Warga Pujakesuma Dibekali Nilai-nilai Empat Pilar



PUJAKESUMA (Putra Jawa Kelahiran Sumatera), sebutan untuk masyarakat keturunan Jawa yang bermukim di Sumatera, tak luput dari sasaran sosialisasi Empat Pilar MPR. Kali ini ditujukan untuk Pujakesuma yang bermukim di Kotapinang dan sekitarnya. Sabtu malam (24/11/2018), di lapangan Pinang Awan Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), berlangsung pagelaran wayang kulit.

Malam itu warga masyarakat setempat beramai-ramai mendatangi lapangan Pinang Awan yang berada di Jalan Lintas Sumut-Riau atau terletak sekitar 345 km dari Kota Medan tersebut. Bagi masyarakat suku Jawa, kesenian wayang kulit termasuk salah satu kesenian yang sangat mereka gemari. Apalagi, malam itu, MPR sebagai penyelenggara menampilkan



dalang Ki Giman Guno Prenggo Stoto dari Kisaran yang membawakan lokan “Wahyu Satrio Piningit.”

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, mewakili Pimpinan MPR RI

membuka secara resmi pagelaran seni budaya wayang kulit ini. Dalam sambutannya, Rambe mengatakan, MPR melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR di seluruh Tanah Air dengan berbagai metode. Salah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

satunya melalui seni budaya. Bukan hanya dengan wayang kulit, tapi juga melalui kesenian tradisional lainnya, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

MPR menyelenggarakan pagelaran seni budaya ini, menurut Rambe, bukan hanya sekedar memberikan hiburan atau tontonan, melainkan juga ikut melestarikan seni budaya Indonesia. Seni budaya yang kita miliki, menurut Rambe, dapat memperkuat Empat Pilar MPR RI. Karena merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Sehingga pada akhirnya kesemua itu menjadi modal besar untuk menjaga persatuan," katanya.

Atas dasar itulah, lanjut Rambe, MPR melaksanakan sosialisasi Empat Pilar di mana pun di Indonesia ini. Meskipun letaknya jauh, harus menempuh perjalanan darat sekitar 8 jam dari ibukota provinsi, tidak menyurutkan langkah MPR untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar. Bahkan, Rambe mengaku senang melihat masyarakat Labuhanbatu begitu antusias menyaksikan pertunjukan wayang kulit sambil mendengar pesan-pesan Empat Pilar. "Ini menandakan bahwa masyarakat di sini menyukai wayang kulit", ujar Rambe.

Dengan adanya acara ini, Rambe berharap agar masyarakat terhibur dan mengikuti serta meneladani pesan-pesan yang disampaikan dalam Ki Giman Guno Prenggo Stoto dalam lakon "Wahyu Satrio Piningit." "Semoga dapat menjaga serta menguatkan keutuhan NKRI," harap Rambe, seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Desa Aek Batu yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran wayang kulit ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) Biro Humas MPR, Andrianto, selaku panitia pelaksana pagelaran seni budaya di Labuhanbatu Selatan ini menyatakan, acara yang diselenggarakan MPR RI ini adalah dalam rangka reaktualisasi dan internalisasi pemahaman Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat. Dengan pemahaman akan esensi Empat Pilar ini, Andrianto berharap, dapat menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut Andrianto menyampaikan bahwa MPR sudah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar ini dengan berbagai metode,

seperti ToT, LCC, diskusi, dan seminar, dihampir seluruh daerah di Indonesia. Metode sosialisasi melalui pentas seni budaya daerah ini, kata Andrianto, adalah salah satu bentuk apresiasi MPR RI dalam upaya melestarikan warisan budaya tradisional, khususnya seni wayang kulit yang telah menjadi kekayaan intelektual bangsa Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Khairul Harahap, dalam sambutannya menyatakan, masyarakat Labuhanbatu Selatan sangat antusias menyaksikan acara ini. Karena, kata Khairul Harahap, wayang kulit adalah seni budaya etnis Jawa ini diadakan di tanah Batak Mandailing. Untuk itu, Khairul Harahap mengucapkan terima kasih kepada MPR yang bersedia mengadakan pagelaran wayang kulit di Labuhanbatu Selatan ini.

Ikut hadir dalam acara pagelaran seni budaya di Labuhanbatu Selatan ini, antara lain: Ketua Pujakesuma Labuhanbatu Selatan, Salamun; Camat Torgamba; Kapolsek dan para kepala desa; serta disaksikan oleh tokoh budaya, dan ratusan masyarakat Pujakesuma Labusel. □

JAZ

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

MPR Ajak Dokter Hewan Jadi Pelopor Pemilu Damai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI), Senin (17/12/2018), mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Ketua MPR Zulkifli Hasan, dalam kesempatan itu, mengajak para peserta untuk peduli Pemilu 2019. “Dokter hewan dan istrinya harus menjadi pelopor damai pada pemilu di tahun depan”, ujar Zulkifli Hasan.

Menurut mantan Menteri Kehutanan itu, pemilu merupakan hal biasa, dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun sekali. Untuk itu, diharapkan semua saling menghormati dan menghargai dalam soal pilihan. “Bila pemimpin

yang ada sudah bagus, silahkan pilih kembali, namun bila ada yang ingin pemimpin baru, juga silahkan memilih pemimpin yang diinginkan. Semua diselesaikan secara sederhana di bilik TPS pada 17 April 2019”, ujarnya.

Bagi Zulkifli Hasan, kita tak perlu gaduh dalam soal pilihan presiden, sebab calon yang ada sama-sama orang Indonesia, dan merupakan kader terbaik dari partai pengusung. Dalam Pemilu 2019, kata Zulkifli Hasan, yang diinginkan terciptanya suasana yang penuh kegembiraan dan menjauhkan dari rasa permusuhan.

Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi yang sudah disepakati sejak tanggal 17 Agustus

1945 seharusnya menghasilkan kedamaian, kesetaraan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua. Dia mengakui, dalam proses perjalanan demokrasi, ada kemajuan yang sudah dicapai, namun ada pula yang perlu untuk diperjuangkan. “Ada catatan-catatan pada demokrasi yang berkembang untuk dievaluasi”, ungkapnya.

Lanjut Zulkifli, saat ini ada penyimpangan demokrasi. Seperti kedaulatan tidak digunakan semestinya. Penyimpangan itu seperti *money politic*, pembagian sembako, dan yang lainnya terjadi saat pemilu. Hal demikianlah yang membuat pemilu menjadi mahal dan berbiaya tinggi. Akibatnya, calon kepala daerah mencari sponsor saat maju Pilkada. Bila mereka terpilih, kali pertama yang dipikirkan oleh mereka adalah





bagai-mana mengembalikan modal kepada para penyandang dana. “Akhirnya kekuasaan yang ada digunakan untuk mencari ke-kayaan”, ucapnya. “Untuk itu perlu ada perbaikan dalam sistem demokrasi yang ada”, ungkapnya.

Zulkifli Hasan ingin demokrasi yang ada disempurnakan, sehingga mampu mencapai

tujuan yang ideal, yakni sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. “Indonesia yang adil dan makmur”, tuturnya. Kita ingin merdeka karena ingin bersatu. Dalam persatuan, bangsa ini bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan. Untuk itu semua elemen masyarakat harus bisa menjadi perilaku yang

disinari cahaya ketuhanan, mempersatukan bukan yang memecah belah, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. “Perilaku seperti inilah yang akan menciptakan keadilan bagi semua dalam wadah NKRI”, ucapnya. □

AWG

PSB Kepulauan Banyak, Aceh

Empat Pilar Bergema di Pulau Panjang

ANGGOTA MPR Fraksi PAN asal Aceh, Muslim Ayub, hadir pada acara Pagelaran Seni Budaya Lokal di Pulau Panjang Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Ahad (16/12/2018). Pulau Panjang adalah sebuah desa di Kepulauan Banyak, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil adalah kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Aceh Selatan. Kepulauan Banyak adalah bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, sedangkan wilayah daratannya mencakup kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Kehadiran Muslim Ayub yang juga Anggota Badan Penganggaran MPR di Pulau Panjang itu adalah dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang yang dibebankan kepada anggota MPR, yaitu melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Dan, sosialisasi Empat Pilar di Desa Pulau Panjang ini dikemas dalam bentuk Pagelaran Seni Budaya. Beberapa jenis kesenian ditampilkan,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kan, yaitu Tarian Randey, Serampang 12, Langser, Leleusen, Bercerai Kasih, Berempat, dan Maena.

Pagelaran seni budaya di Pulau Panjang ini dibuka oleh anggota MPR Muslim Ayub atas nama Pimpinan MPR. Hadir dalam

kesempatan itu Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal MPR, Maifrizal; Camat Kepulauan Banyak, Mukhlis; serta tamu undangan lain, dan disaksikan oleh ratusan warga Desa Pulau Panjang dan desa lainnya di Kepulauan Banyak.

Kepala Biro Keuangan Setjen MPR, Maifrizal, selaku panitia pelaksana pagelaran seni budaya, dalam laporannya menyatakan, kegiatan yang dikemas dalam bentuk Pagelaran Seni Budaya ini merupakan salah satu dari berbagai metode sosialisasi Empat Pilar MPR. "Kita bersyukur Aceh Singkil, khususnya Pulau Panjang, memiliki kesenian yang sangat membanggakan," ungkap Maifrizal yang biasa disapa Datuk ini.

Sosialisasi Empat Pilar MPR, menurut Maifrizal, sangat penting. Tujuannya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat memahami nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki. Keempat nilai kebangsaan itu adalah: *Pertama*, sebagai bangsa, Indonesia memiliki ideologi, dan dasar Negara, yaitu Pancasila. *Kedua*, UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur

hak dan kewajiban setiap warga negara, dan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahaminya.

Ketiga, kita negara besar, berada pada urutan ke-empat terbesar di dunia. "Kita tidak ingin negara kita menjadi negara gagal, negara yang terpecah-pecah. Karenanya bagi kita NKRI adalah harga mati," ujar Datuk. Dan, *keempat*, kita punya suku berbeda, agama berbeda, tapi karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara maka negara kita selalu menjadi negara yang aman, terteram. "Maknanya, biarpun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu," katanya.

Sementara itu, Camat Kepulauan Banyak, Mukhlis, yang mewakili Bupati Aceh Singkil dalam sambutannya menyatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran seni budaya ini kiranya dapat menggali potensi

yang terkandung dalam kesenian Aceh Singkil yang multi etnis ini untuk dapat menjaga keutuhan NKRI.

Mukhlis mengucapkan terimakasih kepada MPR, meskipun menempuh perjalanan yang tidak mudah, melalui laut serta memacu adrenalin, berkenan hadir dan melaksanakan "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran Pagelaran Seni Budaya Lokal di Pulau Panjang. "Kegiatan ini mengajak hadirin dan masyarakat Kepulauan Banyak untuk berpartisipasi, dengan harapan bisa melestarikan seni budaya yang kita banggakan ini," katanya. Dan, dia berharap, kegiatan dapat dilaksanakan rutin dan berkesinambungan untuk mengangkat seni budaya Aceh Singkil agar tetap terpelihara untuk menjadi pemersatu bangsa. □

JAZ



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PSB Lampung Tengah

Sosialisasi Lewat Kisah Pandawa di Patera Buyut

LAPANGAN Pasopati, Kelurahan Putera Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu malam (19/12/2018), tak seperti biasanya. Bila sehari-hari lapangan itu sepi dan gelap, namun malam itu terlihat keramaian. Di tepi lapangan berbagai berjejer tenda pedagang makanan, minuman, dan mainan anak-anak. Sedang di tengah lapangan berdiri panggung dan tenda besar dengan ratusan kursi tersedia di bawahnya.

Keramaian di lapangan yang tumbuh subur rumput itu karena ada acara

Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau dikenal Empat Pilar MPR.

Acara yang diselenggarakan MPR ini dihadiri oleh anggota MPR Fraksi PAN, Alimin Abdullah; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Biro Humas MPR, Muhamad Jaya; Kasubag Hubungan Antar Lembaga, Euis Karmila; dan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PAN Abdullah Surajaya. Selain itu, juga tampak hadir Kepala Kampung Putera Buyut, Mariadi, dan warga

masyarakat yang datang dari berbagai desa di Gunung Sugih.

Alimin dalam sambutannya mengatakan, kehadirannya pada malam yang cerah itu untuk menyosialisasikan Empat Pilar lewat pagelaran wayang kulit. Seni budaya asal Jawa ini, menurut Alimin, dianggap paling tokcer alias mantap untuk kegiatan sosialisasi Empat Pilar. Karena, sosialisasi lewat pertunjukan wayang kulit ini dinilai aman, tenang, bisa ditonton mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, serta mampu mendatangkan berbagai pedagang ke tempat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

acara. Dan, dapat dilakukan di lapangan terbuka.

Kepada para penonton yang malam itu memenuhi lapangan yang biasa digunakan para pemuda setempat untuk sepakbola, putera asli Lampung itu mengungkapkan, bangsa Indonesia bisa tegak berdiri karena memiliki Empat Pilar. Keempat Pilar inilah yang menjadi landasan, pilar, dan pegangan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan keragaman lainnya. “Meski beragam, namun kita bersatu”, tuturnya.

Alimin mengaku, bisa menyaksikan sendiri wujud keragaman yang ada, saat berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Persatuan bisa terwujud salah satunya karena ada bahasa Indonesia. Di Kecamatan

Gunung Sugih, khususnya Kampung Putera Buyut, selain suku Jawa, juga ada Sunda serta suku lainnya. “Beragam suku ada di sini, namun saya bisa nyambung karena menggunakan bahasa Indonesia”, ucapnya.

Kepada dalang Ki Haryo Purbo Kusumo, Alimin berpesan agar menyelipkan pesan-pesan Empat Pilar dalam lakon yang digelar. “Selain sosialisasinya tercapai, masyarakat juga terhibur”, paparnya.

Menurut Alimin, sosialisasi penting dilakukan, sebab selepas reformasi pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan di sekolah-sekolah, menyusul dibubarkannya BP7. “Akibat yang demikian ada yang tidak tahu tujuan Indonesia merdeka”, ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Alimin juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa pada

17 April 2019 bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu Legislatif, Pemilu memilih anggota DPD, dan Pemilu Presiden. Dia berharap, masyarakat menggunakan hak pilihnya secara benar. “Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih”, tegasnya.

Muhamad Jaya dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa dia merasa gembira melihat masyarakat antusias mengikuti acara itu. Pagelaran wayang kulit, tutur Muhamad Jaya merupakan salah satu metode sosialisasi Empat Pilar, selain metode seperti ToT, outbound, seminar, FGD, lomba cerdas cermat. Dia berharap, sosialisasi Empat Pilar ini dapat membuat masyarakat menjadi paham dan selanjutnya mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Muhamad Jaya, pertunjukan seni budaya tak sekadar menyosialisasikan Empat Pilar, namun juga sebagai upaya menjaga dan melestarikan budaya bangsa. “Lewat pentas seni, Empat Pilar bisa teraktualisasikan”, paparnya. “Mari kita nikmati pertunjukan ini”, tambahnya.

Kepala Kampung Putera Buyut, Mariadi, merasa senang masyarakat dihibur oleh pagelaran wayang. “Apalagi gratis”, ucapnya. Dia mengakui, tak mudah menggelar pertunjukan semacam ini di kampungnya. Dan, acara ini dapat terselenggara, kata Mariadi, berkat kerja sama antara Putera Buyut dengan MPR. “Pertunjukan ini tak terduga. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih pada MPR”, ungkapnya.

Sebelum pertunjukan dimulai, Alimin didampingi Muhamad Jaya, Abdullah Surajaya, dan Mariadi menyerahkan sosok wayang Puntadewa kepada Ki Haryo Purbo Kusumo. Malam itu lakonnya adalah “Pandawa Prawirayudha.” Ini merupakan kisah klasik Mahabarata yang menceritakan dinamika di Kerajaan Astina.

Begini kisahnya. Antara Pandawa sebagai simbol kebaikan bertarung dengan Kurawa sebagai simbol keburukan. Peran yang dimainkan Puntadewa itulah yang membuat kebaikan selalu menang atas kejahatan. Puntadewa adalah seorang raja yang memerintah kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Astina. Yudhistira nama lain dari Puntadewa merupakan anak tertua dari Pandawa. □

AWG



Mahyudin di Palangkaraya

Perempuan Adalah Guru Bagi Anak-Anaknya



MENJELANG berakhirnya tahun 2018, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin ST, MM menyambangi Kota Palangkaraya, yang tak lain adalah Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Di tempat ini mantan Bupati Kutai Timur itu menghadiri kegiatan Temu Tokoh Nasional, yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Dharmawanita Provinsi Kalteng, Rabu (12/12). Tema yang dibahas dalam acara tersebut adalah: "Peranan Umat Islam Dalam Menjaga Persatuan dan Nilai Nilai Kebangsaan." Ikut hadir pada acara tersebut, anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar Hj. Agati Sulie, SE., dan Ketua BMKT Kalteng, Hj. Ubudiyah Husein Ali.

Di hadapan anggota dan pengurus BKMT Provinsi Kalteng, Wakil Ketua MPR RI H. Mahyudin antara lain mengingatkan, kaum wanita adalah penentu masa depan bangsa. Karena sebagai seorang ibu, perempuan memiliki peran penting untuk mendidik dan mengurus anaknya. Makanya, tidak salah jika dikatakan bahwa kaum perempuan adalah guru bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai istri tugasnya adalah selalu mendampingi suami, baik dalam keadaan senang maupun susah.

Karena itu, menurut Mahyudin, tidak salah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jika dikatakan di balik sukses seorang laki-laki, selalu ada perempuan yang hebat. Dia senantiasa mendukung dan menyertai suaminya menuju keberhasilan. Mengingat peran tersebut, Mahyudin berharap, setiap perempuan tak pernah berhenti belajar. Dan, selalu meningkatkan pemahaman tentang agamanya. Ini penting, agar tidak gampang disusupi pemahaman agama yang sempit. Sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita sudah sering mendengar ada terorisme, itu terjadi karena pemahaman agama yang sempit soal makna jihad. Akibatnya, banyak orang yang mati sia-sia, dan itu merugikan kita semua", kata Mahyudin

mengingat.

Mahyudin mengaku, dirinya selalu mendukung kegiatan ibu-ibu yang tergabung dalam BKMT. Karena, organisasi ini mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, santun, dan tidak saling pukul. Seperti yang diajarkan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam.

"Para Wali menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan cara-cara yang damai. Tidak ada gesekan apalagi pertikaian. Buktinya, masyarakat waktu itu mau memeluk agama Islam dengan sukarela, tidak ada peperangan dan paksaan", tutur Mahyudin.

Menghadapi tahun politik 2019, Wakil



Ketua MPR mengingatkan agar kaum perempuan tidak terlibat dalam praktik *money politic*. Karena praktik politik uang terbukti akan menyusahkan bangsa dan negara. Banyak di antara mereka yang memakai politik uang dalam berpolitik berakhir di penjara, setelah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, Agati Sulie, mengakui, sukses dirinya sebagai anggota MPR tak lepas dari pengorbanan dan kesetiiaannya, baik sebagai istri maupun ibu dari anak-anaknya. Bahkan, selama ini, menurut Agati, dia lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibanding kariernya sebagai politisi.

“Perempuan itu harus mengutamakan keluarga, bukan karier. Buat apa karier maju jika keluarga berantakan. Makanya, ada istilah di balik sukses seorang lelaki ada wanita hebat di baliknya. Bisa istri ataupun ibunya, yang pasti seorang perempuan”, ujar Agati. □

MBO

PSB Jepara

Menanamkan Nilai-nilai Empat Pilar Lewat Kolaborasi Wayang Kulit dan Wayang Orang

KEGIATAN sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode pagelaran seni budaya, Senin malam (10/12/2018), berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pagelaran seni budaya ini dikemas dalam bentuk lain dari biasanya. Mengolaborasi dua kesenian tradisional Jawa, yakni wayang kulit dan wayang wong, dalam satu panggung, satu lakon cerita, dan satu dalang. Hasilnya, sebuah tontonan cukup memikat.

Ide ini datang dari anggota MPR RI Kelompok DPD RI Dr. Bambang Sadono, SH., MH. Sebagai penggemar wayang, Bambang Sadono berkehendak menghadirkan sesuatu yang beda dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Jepara ini. Perlu diketahui, dia pernah menghadirkan pertunjukan wayang kulit dengan dua dalang dalam satu lakon cerita. Kali ini kolaborasi wayang kulit dan wayang orang. Dan, kolaborasi dua jenis kesenian



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ini bermain dalam lakon ‘Sumpah Setyaki.’ Bekerjasama dengan Persatuan Wreda-tama Republik Indonesia (PWRI), dan atas masukan dari Bambang Sadono, Setjen MPR

selaku pelaksana kegiatan ini menghadirkan grup wayang kulit dari Rembang dengan dalang Ki Sigit Ariyanto. Sementara untuk para pemain wayang orang dipilih maha-

PSB Gorontalo

Sosialisasi Empat Pilar Melalui Festival Budaya Gorontalo



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI ERA reformasi Pancasila seakan tak lagi bersarang dalam pikiran warga bangsa Indonesia, dan lidah warga bangsa pun jarang mengucapkannya. Maka, wajar kalau ada yang lupa atau salah dalam mengucapkan teks Pancasila. Anggota MPR Fraksi Gerindra Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si., punya cerita menarik mengenai hal itu. Dia mendapat cerita dari temannya, seorang kepala sekolah, waktu menjadi pembina upacara pernah salah ketika membacakan teks Pancasila. Semestinya lima sila, tanpa disadari menjadi enam sila. Itu terjadi karena dia menyebut sila pertamanya adalah kata Pancasila.

Elnino menceritakan hal itu ketika menyampaikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR di lantai dasar Atrium Mal Gorontalo, Kota Gorontalo, Sabtu malam (1/12/2018). Sebuah kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR yang dikemas dalam bentuk Festival Seni Budaya Gorontalo. Berbagai jenis kesenian Gorontalo ditampilkan malam itu, seperti: Tarian tradisional Gorontalo dibawakan penari dari sanggar Meca

Dancer, pembacaan puisi dalam bahasa Gorontalo (Tanggomo), band, dan Stand Up Comedy.

Festival Seni Budaya Gorontalo yang diselenggarakan dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR itu dibuka oleh Asisten II Bidang Pembangunan Pemprov Gorontalo, Drs. Sultan Rusdi, Ak., MM., QIA. Ratusan peserta hadir dan berbaur dengan para

pengunjung mal, dan mereka tampak antusias menyaksikan festival Seni Budaya Gorontalo yang memang pertama kali diselenggarakan MPR di Bumi Limboto tersebut. Dan, Elnino hadir sebagai anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Kembali ke cerita kesalahan dalam menyebut sila-bila dari Pancasila. Elnino sengaja mengungkapkan hal itu untuk





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menjelaskan bahwa sesuatu yang jarang disebut membuat orang menjadi lupa tentang hal itu. “Begitu pula Pancasila,” ungkap Elnoni. Karena begitu Orde Baru tak lagi berkuasa dan masuk ke era reformasi, Pancasila pun jarang diucapkan. “Pancasila sudah lama tidak ada di pikirannya, dan Pancasila sudah lama pula tidak ada di lidahnya. Maka, wajar bisa terjadi kesalahan,” kata Elnino.

Oleh karena itulah, lanjut Elnino, MPR menyelenggarakan Sosialisasi Empat. Agar Pancasila tidak hanya sekedar menjadi *hashtag*: *Saya Pancasila*, tapi Pancasila betul-betul harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga? Elnino menegaskan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang ber-Ketuhanan Maha Esa, kita orang yang berperikemanusiaan, dan harus bersatu. “Kita tidak boleh saling mem-bully,” katanya. Kemudian, kita harus selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah dalam

khikmah dan kebijaksanaan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar yang dikemas dalam bentuk Festival Seni Budaya Gorontalo diselingi pula dengan acara *Talkshow*. Narasumber untuk acara ini adalah Elnino M. Husein Mohi, Sultan Rusdi, dan Mohamad Jaya. Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta menanyakan tentang masih banyaknya fakir miskin dan anak-anak terlantar di kota-kota besar. Menjawab pertanyaan itu, Elnino menyatakan, anak-anak terlantar harus di pelihara negara. Negara yang dimaksudkan adalah lembaga-lembaga negara, tapi yang melaksanakan (90%) Presiden.

Meski acara ini diselenggarakan di tengah keramaian pengunjung mal, ternyata cukup menarik perhatian dan dinilai sukses. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Biro

Humas MPR, Mohamad Jaya, dalam laporannya menyebutkan, acara ini luar biasa. Selain sosialisasi dengan metode pageralan seni budaya ini pertamakali diselenggarakan di Provinsi Gorontalo, acara ini juga pertama kali diselenggarakan di mal.

Selanjutnya, Mohamad Jaya menjelaskan bahwa anggota MPR, termasuk Elnino, punya kewajiban untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode, seperti *Training of Trainers* (ToT), Lomba Cerdas Cermat (LCC), Outbound, Kemah Empat Pilar, dan sebagainya. “Malam ini, di Gorontalo, sosialisasi Empat Pilar dikemas dalam bentuk Festival Budaya,” ungkap Mohamad Jaya.

Bukan tanpa alasan MPR memilih seni budaya sebagai salah satu metode sosialisasi Empat Pilar. “Agar generasi muda mencintai budayanya, dan dapat mengangkat budaya tersebut di dunia global,” harap Mohamad Jaya. Lebih dari itu, menurut Mohamad Jaya, melalui budaya kita merawat kebhinnekaan. Artinya, “Merawat kebhinnekaan harus dimulai dari merawat budaya,” katanya.

Sementara Asiten II Bidang Pembangunan Pemrov Gorontalo, Sultan Rusdi, yang hadir mewakili Gubernur Gorontalo yang berhalangan hadir, menyatakan, Empat Pilar yang disosialisasikan ini harus dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, lanjut Sultan Rusdi, Empat Pilar ini erat kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Artinya, dengan memahami Empat Pilar, kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. □

SCH



Yayasan Ibnu Hisyam

HNW: Pahami Sejarah Perjuangan Pendiri Bangsa

DI INDONESIA saat ini, apalagi jelang tahun politik 2019, satu pihak mudah sekali mencap pihak lain dengan ucapan radikal, non NKRI, dan non Pancasila. Hal tersebut membuktikan lemahnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan para pendiri bangsa.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan hal itu ketika berbicara di hadapan sekitar 500 masyarakat umum seputar Jakarta Selatan yang menjadi peserta acara Temu Tokoh/Kebangsaan di Ballroom RM Raden Bahari, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018). Acara ini diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Yayasan Ibnu Hisyam Pasar Minggu.

Jika anak bangsa ini meluangkan waktu memahami sejarah perjuangan bangsa, kata HNW lebih lanjut, maka akan terlihat betapa pentingnya peran mereka terhadap eksistensi NKRI hingga kini. "Ambil contoh bagaimana peran besar tokoh Islam Mohammad Natsir dengan mosi integralnya yang kemudian mengembalikan Indonesia menjadi NKRI," ujarnya.

Mosi integral, jelas HNW, adalah sebuah hasil keputusan parlemen (Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat/RIS) mengenai bersatunya kembalinya sistem pemerintahan Indonesia ke dalam sebuah negara kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir.

Jika tidak ada peran beliau (Mohammad Natsir, seorang tokoh Partai Masyumi) yang mampu meyakinkan pemerintahan RIS dan seluruh tokoh bangsa akan pentingnya kembali ke NKRI, mungkin sampai sekarang negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan ini jauh dari cita-cita dibentuknya negara Indonesia.

"Jadi sekali lagi saya berharap jangan seenaknya mencap salah satu elemen bangsa, misalnya Islam, dengan segala kegiatannya seperti kegiatan Reuni 212 yang lalu sebagai radikal, non NKRI, dan non Pancasila hanya karena tidaksukaan,"



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ungkap HNW lagi, "Padahal, faktanya, Reuni 212 terbukti berlangsung damai, aman, tanpa kekacauan."

Untuk itu, HNW menekankan pentingnya seluruh rakyat Indonesia menjaga warisan perjuangan para pendiri bangsa. Mereka terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, budaya tapi memiliki satu visi misi serta cita-

cita mulia membentuk negara Indonesia menuju kesejahteraan bersama.

"Jika kita mampu memahami dan menjaga warisan tersebut maka tidak akan ada segala macam sangkaan negatif antarsesama anak bangsa yang berujung konflik," tandasnya. □

DER



PSB Bogor

Cepot Ikut Mensosialisasikan Empat Pilar



LAPANGAN Pasar Ciampea, Desa Benteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (8/12/2018), tampak ramai dan meriah. Ratusan warga masyarakat Desa Benteng dan sekitarnya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, memenuhi lapangan yang sore itu diguyur hujan.

Warga masyarakat agaknya ingin menghabiskan malam Minggu mereka dengan menikmati pagelaran wayang golek atau

wayang sunda. Wayang golek yang populer dengan tokoh Cepot, malam itu menampilkan kisah 'Sasrajingga Ngadeg Raja'.

Pagelaran seni budaya dalam rangka Empat Pilar MPR—yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—ini dihadiri anggota MPR dari Fraksi Demokrat, Anton S. Suratto; Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Biro

Humas, Muhammad Jaya. Serta hadir pula Kapolsek Gunung Putri, Danramil Ciampea, Camat Ciampea, dan Kepala Desa Benteng.

Mewakili pimpinan MPR, Anton S. Suratto dalam sambutannya menyatakan, kehadirannya di Ciampea ini adalah untuk menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi Empat Pilar, menurut Anton, dilakukan dengan beragam metode, salah satunya lewat pagelaran seni budaya tradisional wayang golek ini.

Khusus untuk pagelaran seni budaya, jelas Anton, tidak hanya seni budaya Sunda (wayang golek), melainkan juga dengan beragam seni budaya daerah lain di Indonesia. Seperti pagelaran seni wayang kulit, ludruk, reog, dan sebagainya. Karena, MPR melaksanakan kegiatan ini, selain untuk menyosialisasikan Empat Pilar, juga untuk ikut memberdayakan dan melestarikan seni budaya tradisional agar terhindar dari ancaman kepunahan.

Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, selaku ketua penyelenggara, dalam laporannya mengatakan, pagelaran seni budaya wayang golek ini diharapkan dapat menghibur masyarakat. Wayang golek sengaja dipilih, karena MPR tahu bahwa di Ciampea ini masih banyak warga masyarakat yang menggemari wayang golek.

Menurut perempuan yang akrab dipanggil Bu Titik, pentas wayang golek digelar dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR. Bukan hanya wayang golek, MPR juga melukan Sosialisasi Empat Pilar dengan menampilkan beragam kesenian daerah lainnya. Pokoknya, sesuai dengan jenis seni budaya lokal, masing-masing daerah. Di Riau atau daerah Sumatera lainnya MPR menyuguhkan kesenian khas daerah sana, seperti puisi, pantun, gurindam, dan lainnya.

MPR menggunakan seni budaya sebagai media sosialisasi Empat Pilar bukan tanpa alasan. Seni budaya daerah, kata Siti Fauziah, selain sebagai tontonan memang digemari masyarakat, juga banyak berisi tuntunan yang mengandung nilai-nilai filosofis, pesan-pesan, dan ajakan kebaikan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



Pagelaran wayang golek itu terasa istimewa, karena dimainkan oleh dua dalang, yakni: Ujang Bukhari bersama anaknya, Ogi S Permana. Kedua dalang ini mementaskan penggalan cerita Babad Mahabarata.

Begini kisahnya. Terjadi gonjang-ganjing di Kerajaan Astina, akibat perseteruan Pandawa dengan Kurawa. Di tengah serunya jalan cerita, sang dalang lalu menyelipkan adegan dialog antara Cepot

dan Anton. Dalam dialog itu, Cepot bertanya, apa yang dimaksud Sosialisasi Empat Pilar?

Menjawab pertanyaan dari ikon wayang golek itu, Anton menjelaskan, sosialisasi Empat Pilar merupakan amanat UU MD3 yang menugaskan MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya lewat pagelaran seni

budaya wayang golek ini.

Selanjut, Anton menjelaskan sejarah perjalanan bangsa, yang dimulai dari berdirinya Boedi Oetomo pada 1908 yang kemudian dijadikan sebagai hari Kebangkitan Nasional. Lalu, Sumpah Pemuda pada 1928, hingga Indonesia merdeka pada 1945. “Jadi, kita merdeka untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Anton. □

EFP

PSB Pacitan

Wayang Kulit Empat Pilar MPR Hibur Warga Pacitan

SEKITAR seribu lebih warga dari sembilan desa di seputar Kecamatan Nawangan, dan daerah lain di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat malam (14/12/2018) antusias memadati lapangan Pakis Baru, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan. Mereka berbondong-bondong ke lapangan Pakis Baru itu untuk menyaksikan pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk.

Meski lapangan rumput dalam kondisi ‘becek’ usai diguyur hujan sejak sore harinya, namun tak menyurutkan langkah warga masyarakat kesenian tradisional Jawa, wayang kulit, yang diselenggarakan dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR. Apalagi yang tampil malam itu dalang kondang, Ki Anom Suroto, yang membawakan lakon ‘Bima Sakti’.

Selain pesona dalang Ki Anom Suroto, suasana tambah semarak dengan kehadiran anggota MPR RI Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang memang tak asing lagi bagi warga Pacitan. Hadir pula Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, didampingi Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi Biro Humas Muhamad Jaya; serta Forkompimda Kabupaten Pacitan, perwakilan Bupati Pacitan, Camat Nawangan, para Kepala Desa Kecamatan Nawangan, dan tokoh masyarakat Nawangan.

Antusiasme masyarakat memang luar-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

biasa. Mereka sudah berdatangan ke lokasi acara sejak habis Isya, sementara acara baru dimulai pukul 21.00 WIB. Walau pun gerimis kecil terus menerpa tak menyurutkan niat mereka untuk menonton pagelaran seni budaya ini. Bahkan, pihak panitia justru sangat sibuk kursi untuk menampung warga masyarakat yang terus berdatangan.

Harsono, seorang warga Desa Pakis Baru, adalah salah satu dari sekian banyak penonton itu. Dia datang dengan membawa serta istri dan dua anaknya. Dia ditemui oleh wartawan *Majelis* ketika sedang sibuk mengibaskan air yang membasahi rumput,

untuk kemudian di atasnya digelar tikar plastik yang memang sengaja dibawa dari rumah.

“Saya memang pencinta wayang kulit, apalagi dalangnya bagus,” ungkap Harsono. Sambil menunjukkan tokoh wayang berukuran yang baru saja dibelinya di pintu masuk lapangan, Harsono mengaku, baru tahu kalau pagelaran seni budaya wayang kulit ini merupakan bagian dari kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Ya, memang kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR memang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya Pagelaran Seni Budaya. “Pagelaran seni budaya wayang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kulit merupakan salah satu metode penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR, dan merupakan metode penyampaian yang paling efektif," kata Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah, dalam laporannya selaku ketua panitia pelaksana pagelaran seni budaya tersebut.

Dipilihnya seni dan budaya daerah, seperti wayang kulit yang merupakan budaya Jawa, lanjut Siti Fauziah, selain karena sudah sangat dikenal dan melekat sejak lama, juga sangat kental kisah-kisahannya dan sarat tuntunan. Dan, ini sangat pas dengan Empat

Pilar MPR," terangnya.

Selain itu, lanjut Siti Fauziah, MPR memilih seni budaya sebagai salah metode Sosialisasi Empat Pilar juga dimaksudkan untuk menjaga serta melestarikan budaya daerah agar tidak punah.

"Pelestarian budaya daerah sangat penting terutama untuk generasi muda bangsa saat ini dan masa depan," tegasnya. Karena itu, Siti Fauziah berharap, semua nilai dan tuntunan yang keluar dari kisah wayang kulit yang dibawakan Ki Anom Suroto tersebut, tak sekedar jadi tontonan tapi juga

menjadi tuntunan, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Edhie Baskoro Yudhoyono yang biasa disapa Ibas, atas nama pimpinan MPR, membuka secara resmi pagelaran seni budaya wayang kulit ini. Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa nilai-nilai Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, harus terus dibumikan kembali oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Empat Pilar MPR harus tetap ada dan harus tetap terjaga. Karena Empat Pilar itulah negara kita tetap berdiri. Untuk saat ini serta ke depan kita harus yakin bahwa dengan Empat Pilar bangsa kita akan semakin kokoh dan menjadi bangsa yang besar, maju, dan sejahtera," paparnya.

Menghadapi tahun politik, Ibas mengajak agar rakyat Indonesia mendukung pemimpin nasional yang terpilih nanti. Sebab, setiap pemimpin Indonesia mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Soesilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi saat ini adalah pilihan rakyat. Dan, siapapun nanti yang terpilih akan memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan Empat Pilar menuju Indonesia maju dan sejahtera. □

DER

Hormati Pahlawan dan Pendiri Bangsa

SETELAH menerima secara simbolik tokoh wayang (Bima) dari Ibas, dalang Ki Anom Suroto pun mulai beraksi. Lakon dimaikan malam itu adalah Bima Sakti. Lakon ini berkisah tentang perjalanan kesatria Pandawa Lima, Bima, dalam menunaikan tugas dari gurunya dalam mencari tirta perwita guna mencapai kesempurnaan hidup.

Kisahanya. Dalam perjalanan, Bima bertemu Dewa Ruci yang memberikannya wejangan suci yang menerangkan bahwa tirta perwita tidak ada dimana pun, kecuali ada dalam diri manusia itu sendiri. Bima memahami wejangan Dewa Ruci itu. Itu sesungguhnya adalah representasi dirinya sendiri, yang muncul dan memberi pengajaran kepadanya, karena dia telah mematuhi segenap perintah gurunya dengan sepenuh hati.

Setelah Bima mendapat wejangan dari Dewa Ruci, ilmu itu diajarkan atau diturunkannya pada anak-anak muda untuk mengayomi para kawulanya, dan untuk menjaga kelestarian negara Amarta serta untuk memperbaiki akhlak raja Astina dan para Kurawanya yang terlanjur rusak parah, sehingga dikhawatirkan membuat ambruknya negara Astina.

Hal tersebut merupakan cita-cita Pandawa Lima agar anak



muda Amarta bisa meneruskan atau melanjutkan perjuangan para pendahulunya, yakni para Pandawa untuk negara dan bangsa. Dan, kisah itu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa, yakni menghormati para pahlawan dan pendiri bangsa, serta melanjutkan perjuangan dan cita-cita mereka untuk menuju Indonesia sejahtera. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rakornis Setjen MPR RI Akhir Tahun 2018

DIAKHIR 2018 dan di awal 2019, Setjen MPR menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis). Kegiatan yang diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga perbantuan itu digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 31 Desember 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono melakukan evaluasi dan motivasi kepada kinerja ASN dan tenaga perbantuan selama setahun ini. Ma'ruf menyatakan bersyukur, karena Setjen MPR sudah berulang kali mendapat penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan. "Kita sudah lima kali mendapat WTP", ujarnya.

Mendapat predikat dan penghargaan seperti ini, menurut Ma'ruf Cahyono, sangat membanggakan dan perlu ditingkatkan. Untuk itu,

dia mengajak semua karyawan untuk menjaga kinerja sesuai dengan masing-masing tupoksinya secara serius, inisiatif, dan kreatif. "Meningkatkan kerja sesuai dengan tugas masing-masing", tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Cahyono menyampaikan nawa di 2019, khususnya bulan Agustus, MPR akan memiliki banyak agenda besar kenegaraan. Seperti Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014-2019, Sidang Awal Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, dan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2019.

Untuk menghadapi agenda-agenda besar MPR itu, Ma'ruf Cahyono mengajak semua untuk kerja keras di tahun yang disebutnya tahun politik itu. "Jangan lemah motivasi dan dedikasi dalam melakukan kinerja di tahun depan", tuturnya. □

AWG/DER



MPR Terima Atlet Disabilitas

MENYAMBUT Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember, MPR RI menerima kunjungan 5 atlet disabilitas peserta kejuaraan Pekan Paralympic Games Daerah (Peparda) V Jawa Barat. Mereka didampingi dua orang perwakilan Yayasan Cheshire Indonesia.

Di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018), rombongan atlet disambut hangat oleh anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli didampingi Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah.

Para atlet disabilitas yang hadir adalah atlet berprestasi, terdiri dari: Wiwin Andri, peraih medali emas cabang olahraga bulutangkis; Nursad Ibrahim, peraih medali perak cabang olahraga tenis meja; Hijrayanti, peraih medali perak cabang olahraga bulutangkis; Rinto Djaelani, peraih medali perunggu cabang olahraga tenis meja; dan John Vaili, peraih medali perunggu cabang olahraga panahan.

Melani Leimena Suharli menyatakan, sangat mengapresiasi

prestasi luarbiasa yang diraih para atlet disabilitas tersebut. "Saya kagum, prestasi luar biasa. Dengan segala keterbatasan fisik, mereka mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Prestasi seperti ini belum tentu bisa didapat oleh orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik," katanya.

Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah, mengungkapkan rasa bangganya terhadap prestasi para atlet disabilitas tersebut. Kepada para atlet disabilitas, Siti Fauziah berpesan, walau terbentur kendala fisik, para disabilitas jangan sampai rendah diri. Sebab, prestasi baik dan luarbiasa bisa diraih oleh siapapun asal dibarengi dengan keinginan, motivasi, serta kerja keras.

"Kami sangat menyambut baik kehadiran kalian di MPR RI. Karena MPR adalah rumah rakyat maka siapa saja kami sambut dengan tangan terbuka. Pintu MPR terbuka untuk segenap warga masyarakat Indonesia, termasuk para disabilitas. Mudah-mudahan kunjungan dan penerimaan kami di MPR memberi kesan dan pengalaman tersendiri," ucapnya. □

DER



Muhammad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR

Utang Bukanlah Hal Tabu dan Haram

BERDASARKAN data, perkembangan utang pemerintah meningkat setiap tahunnya. Bila pada 2014 utang pemerintah mencapai Rp 2.608,8 triliun, pada 2015 telah menjadi Rp 3.165,1 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 3.515,5 triliun (2016), Rp 3.995,1 triliun (2017), dan per Juni 2018 mencapai Rp 4.227,8 triliun. Dalam kurun tiga tahun terakhir, utang pemerintah meningkat sebesar Rp 1.619 triliun. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2018 sebesar US\$ 360,7 miliar atau setara Rp 5.410,50 triliun (kurs Rp15.000). Rasio utang pemerintah kita saat ini sudah menembus level 30% atau tepatnya 30,42% terhadap PDB, tertinggi sejak 2012.

Apakah posisi utang Indonesia sudah lampu kuning? Apakah Indonesia masuk dalam perangkap jebakan utang (debt trap)? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis mewawancarai anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar Misbakhun. Berikut petikan wawancara dengan Misbakhun yang juga anggota Badan Sosialisasi MPR RI.

Posisi utang Indonesia sudah melampaui Rp 5.410 triliun. Bagaimana

Bapak melihat posisi utang luar negeri Indonesia itu?

Saya tidak setuju bila dikatakan posisi utang Indonesia memberatkan APBN. Tidak ada istilah memberatkan dalam posisi utang Indonesia dalam APBN. Kita memerlukan utang untuk pembiayaan. Utang Indonesia saat ini adalah utang yang risikonya masih bisa dikelola secara fiskal. Rasio utang Indonesia masih sangat aman. Rasio utang Indonesia adalah 30% terhadap PDB. Ini masih cukup aman. UU membatasi rasio utang Indonesia sampai 60% dari PDB. Pemerintah mengelola dengan baik utang Indonesia, baik dari sisi perencanaan, pengelolaan, maupun sistem pembayaran utang tersebut.

Defisit balancing primer atau keseimbangan primer kita semakin lama makin mengecil dan menuju ke arah positif. Artinya, pemerintah telah mengelola utang dengan baik. Pemerintah bisa mengurangi istilah gali lubang tutup lubang. Pemerintah bisa menerbitkan surat utang yang kredibel dan membangun sistem pembayaran utang. Sehingga utang tidak menjadi beban yang berlebihan dan menimbulkan kontraksi terhadap pembiayaan infrastruktur yang

sedang berjalan.

Jadi, utang tidak menjadi beban APBN. Asumsi defisit APBN 2019 kita cuma 1,18%. Pemerintah sudah menyiapkan skenario terburuk dari faktor ketidakpastian ekonomi, baik ketidakpastian global maupun ketidakpastian di dalam negeri, karena faktor penyelenggaraan Pemilu serentak. Pemerintah telah menyiapkan cadangan untuk menutupi defisit ini sehingga tidak melanggar ketentuan dalam UU APBN maupun UU Keuangan Negara. Sepanjang utang bisa dikelola dengan baik maka utang bukan sesuatu yang memberatkan dalam APBN kita.

Faktanya, pemerintahan saat ini banyak berutang. Misalnya, dalam tiga tahun terakhir utang Indonesia sudah bertambah Rp 1.619 triliun. Utang pada saat pemerintahan Jokowi lebih besar dibanding pemerintahan sebelumnya. Apa komentar Bapak?

Memang, saya akui utang pemerintahan saat ini mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi jumlah utang itu harus dibandingkan dengan jumlah total aset pemerintah yang dihasilkan oleh utang tersebut. Aset itu, misalnya, ratusan kilometer jalan tol yang dibangun pemerintah,

bendungan, saluran irigasi, bandara, pelabuhan. Jika per-tambahan utang itu ekuivalen dengan pertambahan aset baru yang dimiliki pemerintah maka utang yang dilakukan pemerintah adalah untuk kepentingan produktif.

Utang yang digunakan untuk hal-hal produktif dan utang untuk hal-hal konsumtif atau untuk subsidi BBM adalah dua hal yang berbeda. Karena itu kita harus melihat utang secara komprehensif dan filosofis, yaitu seberapa besar utang dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Kita memerlukan utang untuk membangun infrastruktur yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas.

dengan proses penyusunan APBN setiap tahun, di mana dalam proses di DPR semua partai bisa mengikuti dan menyaksikan pengelolaan utang pemerintah. Ini terlihat dalam pembahasan APBN. Istilah gali lubang tutup lubang adalah retorika di luar pembahasan APBN.

Penggunaan utang luar negeri juga terserap untuk membangun infrastruktur. Sehingga ada ide dan gagasan membangun infrastruktur tanpa utang. Bisakah membangun infrastruktur tanpa utang? Apa tanggapan Bapak?

Membangun infrastruktur dengan utang

utang bisa dikelola dengan baik maka utang bukan sesuatu yang haram. Utang membuat industri perbankan dan lembaga pembiayaan bisa bertumbuh.

Itulah yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Jika kita membangun infrastruktur satu per satu yang memerlukan waktu lama maka Indonesia bisa menjadi negara tertinggal. Membangun infrastruktur tanpa utang hanya bisa dilakukan satu per satu, tidak sekaligus. Pemerintah mengambil langkah berutang untuk pembangunan infrastruktur. Jadi, utang bukan hal yang tabu dan jangan dipersepsikan negatif.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Indonesia pun bisa keluar dari *middle income trap country* atau perangkap negara berpendapatan menengah.

Pemerintah berutang cukup besar, antara lain juga untuk membayar utang yang jatuh tempo. Istilahnya gali lubang tutup lubang, apakah benar?

Struktur utang Indonesia yang paling besar adalah surat berharga negara. Surat berharga negara itu diterbitkan di pasar uang baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi tidak benar bahwa kita berutang adalah untuk menutup utang yang lama. Defisit balancing primer kita tidak membuat pemerintah berutang untuk menutup utang lama. Kita masih punya net positif. Pemerintah menerbitkan surat utang memang sebagian untuk membayar utang lama, tapi dengan skema reprofiling.

Manajemen utang dilakukan dengan transparan, yaitu melalui DPR, badan anggaran DPR, dan sebagainya. Pertanyaan seperti tutup lubang gali lubang bisa dijawab

tidak ada salahnya. Negara-negara seperti Amerika, Jepang, Prancis, Korea Selatan, Inggris, Jerman, semua negara-negara itu membangun infrastruktur dengan berutang pada saat selesai perang dunia kedua. Mereka perlu berutang karena adanya keterbatasan keuangan negara. Indonesia pun mengalami hal yang sama. Sebab, total penerimaan negara tidak memadai jika ingin membangun infrastruktur secara masif. Jika membangun infrastruktur satu per satu maka baru beberapa puluh tahun bisa selesai. Kita memilih apakah ingin semakin tertinggal atau berutang untuk infrastruktur dengan mengelola utang dengan baik?

Utang bukanlah hal yang tabu. Utang adalah hal yang umum dan sangat wajar dalam proses pembangunan. Karena ada keterbatasan uang untuk pembiayaan, apalagi di sektor swasta, maka ada istilah perbankan, lembaga pembiayaan. Utang ini untuk menutupi kesenjangan antara modal sendiri dan biaya yang diperlukan. Sepanjang

Ada kekhawatiran Indonesia masuk dalam jebakan utang dan bisa menjadi negara gagal seperti pernah dialami Yunani? Apa komentar Bapak?

Indonesia masih jauh dalam pengertian sebagai negara gagal. Indonesia masih bisa manage utang dengan baik. Indonesia tidak boleh masuk dalam negara gagal. Kita harus gagalkan upaya membangun opini bahwa Indonesia sebagai negara gagal. Membangun Indonesia sebagai sebuah negara besar harus dengan optimisme.

Indonesia adalah negara kaya dengan segala sumber daya alam dan manusia. Kita bangun sumber daya manusia yang berdaya saing dengan negara-negara lain. Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita bisa menjadi negara besar. McKinsey meramalkan Indonesia akan menjadi negara besar nomor tujuh dunia pada 2030. Artinya, Indonesia berpotensi menjadi negara besar, bukan sebagai negara gagal. □

Kolaborasi Wayang Kulit dan Wayang Orang



Dewi Wulandari dan Devi Yulastri

DEWI WULANDARI namanya. Usianya 28 tahun. Lulusan S-2 Institut Seni Seni Indonesia (ISI) Solo ini adalah pengajar seni tari di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (UNES). Sebagai seorang penari, Dewi Wulandari kerap bergabung dengan grup kesenian Wayang Orang Ngesti Taruna Budaya Bangsa. Di grup inilah dia menimba pengalaman sebagai pemain Wayang Orang.

Keahliannya dalam bermain Wayang Orang ditunjukkan oleh Dewi Wulandari dalam pagelaran seni budaya di Jepara, Jawa Tengah, Senin malam (10/12/2018). Acara yang digelar oleh MPR dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR itu menampilkan kolaborasi Wayang Kulit dengan Wayang Orang. Lakonnya adalah "Sumpah Setyaki" dengan dalang Ki Sigit Ariyanto dari Rembang.

Dewi Wulandari yang berperan sebagai *Gendari* bersama **Devi Yulastri** (22) yang berperan sebagai *Banowati* memainkan salah satu adegan dari potongan cerita wayang kulit *Sumpah Setyaki*. "Untuk pagelaran ini kami menyiapkan diri selama empat hari tanpa diiringi ki dalang, dan sekali diiringi ki dalang yang dilakukan sesaat menjelang pertunjukan dimulai," ungkap Dewi Wulandari.

Pertunjukan yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, itu menjadi sebuah pentas yang lain dari biasanya. Kolaborasi dua jenis seni tradisional Jawa, antara Wayang Kulit dan Wayang Orang. Jadinya, sebuah pertunjukan yang cukup memikat. □

SCH

Petanggomo dari Gorontalo Utara

DI ARENA Festival Budaya Gorontalo di Atrium Mal Gorontalo, Sabtu malam (1/12/2018), tampil seorang pria setengah baya berpenampilan sederhana. Dia termasuk salah seorang pengisi acara. Ketika tampil di atas pentas lelaki 56 tahun pun beraksi, dari mulutnya keluar bait-bait puisi yang dilantunan dengan irama. Mirip seni bertutur. Temanya malam itu Empat Pilar, disampaikan dalam bahasa Gorontalo.

Seni budaya asli Gorontalo ini dikenal dengan sebutan *Tanggomo* atau sejenis puisi atau pantun. Penyampainya adalah **Anies Husein**. Sebagai petanggomo – sebutan untuk si penyampai – nama Anies Husein cukup dikenal di Gorontalo. Dia termasuk langka dalam tradisi Tanggomo. “Tapi, saya punya anak didik untuk meneruskan tradisi Tanggomo ini,” ungkap Anies kepada *Majelis* di Gorontalo.

Anies mulai terjun dalam seni sastra Tanggomo ini sejak 1980. Dia sering diminta mengisi acara hajatan dan kegiatan lainnya, serta pernah tampil di televisi. Dia juga sering diminta oleh kandidat kepala daerah, baik calon gubernur atau pun bupati dan walikota, termasuk calon anggota legislatif, untuk berkampanye melalui Tanggomo. “Sudah banyak kepala daerah yang saya bantu terpilih,” kata Anies. □

SCH



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Anies Husein



Vino Bastian

Jangan Remehkan Film Indonesia

WIRO SABLENG adalah salah satu judul film Indonesia yang bersetting atau berlatar belakang era jadul. Dirilis Agustus 2018, film ini terinspirasi dari sebuah novel dengan cerita dan tokoh yang sama karya Bastian Tito yakni ‘Wiro Sableng.’

Pemeran utama karakter Wiro Sableng dalam film adalah **Vino Bastian**. Dia ternyata anak dari si penulis novel Wiro Sableng, Bastian Tito. Ini bukan termasuk KKN, tapi Vino memang aktor film yang sudah malang melintang di dunia akting, dan dia memang dianggap cocok memerankan karakter Wiro Sableng.

Dan, Vino menganggap ini adalah sebuah tantangan. Pokoknya, “Jangan remehin dah film-film Indonesia, bagus-bagus, makanya harus didukung penuh,” begitu Vino memberi alasan. Apalagi film yang berlatar belakang zaman kerajaan di Indonesia ini termasuk amat disukai oleh masyarakat penonton.

“Saya rasa nanti akan banyak film yang berlatar Indonesia zaman dulu dengan kemasan yang sangat apik, serta modern,” ujar Vino. Apalagi, dia melihat, saat ini jagad perfilman Indonesia sedang memasuki tren bagus. □

DER



FOTO-FOTO: BSC

Indahnya Alam di Kawasan Mangrove Center Balikpapan

NAIK perahu bermotor menyusuri muara sungai Somber sungguh menyenangkan. Selama satu jam pulang pergi berlayar di air sungai nan tenang itu banyak panorama bisa dinikmati. Pepohonan mangrove nan rimbun memagari kanan kiri tepian sungai memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi yang memandangnya. Di sepanjang perjalanan berjumpa penduduk yang sedang memancing ikan. Mereka ada yang menggunakan

perahu, dan ada pula yang mengambil tempat di pinggir sungai.

Kalau beruntung, selama perjalanan itu, kita bisa menyaksikan hewan khas Kalimantan, yaitu bekantan. Hewan primata ini mencari makan di pucuk pohon mangrove. Biasanya bekantan (*Natalis larvatus* atau *proboscis monkey*) — yang dikenal kera berhidung mancung dan berbulu oranye — keluar mencari makan menjelang sore hari. Menurut catatan, jumlah hewan primata ini



Margi

berkisar 400 ekor, menjadikan hutan bakau (mangrove) seluas 150 hektar sebagai habitatnya.

Hutan bakau yang tumbuh subur di sepanjang garis pantai di Teluk Somber, Balikpapan Utara, itu kini diberi julukan: Mangrove Center. Letaknya, berhadapan langsung dengan kompleks perumahan Graha Indah Balikpapan, Kalimantan Timur. Mangrove Center kini menjadi salah satu obyek wisata di Kota “Minyak” Balikpapan. Cukup ramai dikunjungi wisatawan, domestik dan mancanegara, terutama di hari libur. Pada hal, dari semula kawasan ini tak dirancang menjadi obyek wisata.

“Kami tidak pernah mempromosikan Mangrove Center Balikpapan ini sebagai obyek





wisata,” kata Margi, 65 tahun, seorang relawan yang bertugas melayani tamu di Mangrove Center. Tujuan semula membudayakan tanaman mangrove di kawasan Teluk Somber ini untuk memperbaiki lingkungan. Soalnya, pada tahun 2000 hutan Mangrove di Teluk Somber ini rusak parah. Para petani tambak memabat habis hutan-hutan mangrove yang ada untuk dijadikan tambak ikan.

“Mereka mengkapling tanah di kawasan hutan Mangrove ini dan diklaim sebagai miliknya,” cerita Margi menggambarkan situasi saat itu. Akibat rusak parahnya hutan bakau, perumahan yang di kawasan pantai Balikpapan Utara, termasuk Graha Indah, selalu berada dalam ancaman bencana alam. Kalau bukan ancaman angin puting beliung yang setiap saat datang, juga ancaman banjir yang diakibatkan air laut pasang. Dan, suhu udara di kawasan perumahan pun menjadi panas.

Untunglah pemerintah, dalam hal ini Kantor Konservasi Daya Alam dan Ekosistem, cepat bertindak. Kawasan hutan bakau seluas 150 hektar yang rusak parah itu diambil alih, dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam. Namun, waktu itu, belum ada kebijakan untuk menghijaukan kembali kawasan itu. Dan, saat itulah, muncul seorang relawan bernama Agus Bei. Warga perumahan Graha Indah ini dengan inisiatif sendiri menanam kembali lahan hutan bakau yang rusak itu.

Pada 2001 Agus Bei yang saat itu lagi



nganggur, karena perusahaan *spare part* tempat dia bekerja bangkrut, tanpa hiraukan cemahaan orang, terus menanam bibit bakau. Tidak mudah, memang, karena lelaki tamatan SMA di Banyuangi ini belum punya pengetahuan tentang menanam bakau. Tapi, dia terus mencoba, akhirnya tahu teknik menanam bibit bakau. Namun, yang menjadi masalah berikutnya, dia kesulitan memperoleh bibit bakau yang bagus untuk lahan berkadar garam tinggi.

Nah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Suatu ketika datanglah mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Balikpapan Utara. Kepada Agus Bei, peserta KKN menjanjikan 1.000 bibit mangrove. Dan, singkat cerita, berkat perjuangan Agus kawasan itu kini menjadi indah dan menyegarkan. Sekitar 150 hektar hutan bakau telah hijau royo-royo. Dan, wajar kalau pada 2017, Agus Bei mendapat penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan.

Dampaknya, hutan itu kini telah menjadi

ekosistem yang memberikan manfaat kepada semua makhluk hidup, baik manusia maupun fauna, yang ada di sana. Dengan terpeliharanya hutan bakau ini maka hewan khas Kalimantan, seperti bekantan, bisa berkembang dengan baik. Kalau sebelumnya di kawasan ini hanya ada sekitar 80 ekor bekantan, sekarang telah berkembang menjadi 400 ekor. Begitu juga di sungai, segala jenis ikan (udang, kepiting, kerapu, dan sebagainya) berkembang baik.

Dan, tak kalah pentingnya, kawasan ini telah menjadi obyek wisata yang menarik. Para pemilik perahu menopang hidupnya dari menjual jasa pada pengunjung. Ada enam perahu bermotor siap melayani wisatawan. Sekali jalan, maksimal 10 penumpang, dikenakan biaya Rp 300 ribu. Rombongan peserta Media Expert Meeting Biro Humas Setjen MPR di Balikpapan, medio Desember lalu, telah menjajal segarnya alam dan indahnya pemandangan di Mangrove Center. □

SCH

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM.

Meski Incumbent Tetap Harus *Kerja Keras*



PELAKSANAAN pemilihan umum lima kotak tahun 2019 tinggal sekitar tiga bulan lagi. Para kandidat, mulai dari calon presiden dan wakilnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), DPR RI, DPRD Provinsi serta Kabupaten Kota berkejaran dengan waktu. Dengan berbagai cara, mereka berusaha mengambil hati warga masyarakat untuk mendapatkan mandat dan dukungan suara.

Upaya memenangi kontestasi pada pemilu serentak, April 2019, ini juga dilakukan oleh Bendahara Fraksi PKS MPR RI, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM. Sejak beberapa bulan terakhir, Andi Akmal makin sering berada di tengah konsituennya, dapil Sulawesi Selatan II meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Parepare, Barru, Pangkep, dan Maros. Dia harus keluar masuk

daerah pelosok dan desa-desa yang jauh dari hiruk pikuk, serta keramaian. Di sana Andi Akmal berdiskusi, menawarkan program dan menampung aspirasi konsituennya.

“Intinya, saya harus tetap bekerja keras, meskipun Incumbent. Tidak ada jaminan Incumbent akan terpilih lagi dengan mudahnya,” kata Andi Akmal. Dia lalu menunjuk bukti, berapa banyak petahana yang tidak terpilih dan gagal kembali ke Senayan pada Pemilu 2014. Karena itu, kata Andi Akmal, dia harus waspada dan bersiaga. “Pokoknya, tidak boleh lengah, merasa pasti menang, meskipun selama ini sudah banyak bertemu masyarakat untuk menampung aspirasi dan berdiskusi”, kata putera bungsu dari lima bersaudara pasangan Andi Pasluddin dan Andi Dawa.

Dugaan adanya praktik politik uang membuat suami dari Hj. Maya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Damayanti SP., ini harus makin waspada. Kenyataannya, masih banyak pemilih yang suka melalui jalan pendek, menetapkan pilihan lantaran mendapat sesuatu dari kandidat tertentu. Ini berbeda dengan pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Mereka tidak gampang menentukan pilihan hanya karena iming-iming mendapat pemberian.

Karena itu, Andi Akmal merasa tidak boleh terlena. Sekalipun memiliki modal sosial yang cukup besar. Karena, selama kurun waktu hampir lima tahun sebagai anggota DPR RI, dia sudah banyak bertemu dengan masyarakat dari berbagai lapisan. Bukan hanya konstituen, baik kader maupun simpatisan, tapi semua kalangan, termasuk masyarakat yang tidak memberikan pilihan pada dirinya,

pada Pileg 2014 silam.

“Banyak pemilih, khususnya berpendidikan rendah, lebih menyukai jalan praktis. Mereka memilih calon yang mau dan bisa memberi materi”, katanya.

Menghadapi pemilih yang menyukai jalan pintas, Andi Akmal berusaha untuk tidak mau larut dalam praktik politik uang. Andi Akmal justru berusaha mengingatkan bahwa praktik *money politic* hanya akan merugikan bangsa dan negara Indonesia. Buktinya, banyak di antara mereka yang melakukan praktik politik uang, di belakang hari malah berurusan dengan lembaga anti rasuah, karena terlibat korupsi.

Karena itu, Andi Akmal berharap, masyarakat bisa menentukan pilihannya dengan bijak. Tidak memilih seorang calon karena pemberiannya berupa sesuatu yang berbentuk material semata. Tetapi seharusnya pemilih dalam menetapkan pilihannya harus melihat asal usul, kemampuan, dan pergaulan dari si calon.

Kalau masyarakat bisa memberikan pilihannya dengan baik, Andi Akmal optimistis, kemungkinan dia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk periode kedua terbuka lebar. Apalagi, secara internal, Partai Keadilan Sejahtera terbilang tidak memiliki persoalan berarti. Karena itu, di sisa waktu yang ada, Andi Akmal terus berupaya menggalang kekuatan agar cita-citanya untuk kembali menjadi anggota DPR RI bisa terwujud.

Berdarah Biru

Bagi Andi Akmal, menjadi anggota legislatif di DPR RI adalah kesempatan untuk memperbanyak berbuat baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Bukan semata-mata untuk mencari kekayaan dan kesenangan diri pribadinya. Karena, saat menjadi anggota DPRD selama dua periode ia merasa banyak kelemahan yang ditemui, dan belum bisa membantu masyarakat secara maksimal.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Karena itu, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 30 Desember 1974, ini berharap, niatnya menjadi anggota DPR RI untuk kali kedua bisa berjalan lancar. Itu penting, karena ia ingin bisa terus berkontribusi dalam pembangunan. Terutama bagi masyarakat Sulawesi yang diwakili, sekaligus memberi mandat sebagai anggota legislatif di DPR RI.

Tekad tersebut bukan sekarang saja ia rasakan. Bahkan jauh sebelum menjadi anggota legislatif, kebiasaan membantu orang lain, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan seorang Andi Akmal. Saat masih kecil misalnya, dia terbiasa menyaksikan kakek dan neneknya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Ia juga sering menyaksikan sendiri bagaimana leluhurnya itu membagi-





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bagikan tanah kepada masyarakat.

Maklum, Andi Akmal merupakan sosok generasi berdarah biru. Keluarganya dikenal sebagai tokoh dan pimpinan masyarakat adat Bone. Karena itu, sejak kecil, ia sering menyaksikan banyak warga masyarakat yang berdatangan ke rumahnya untuk meminta bantuan ataupun menyelesaikan berbagai persoalan.

Kebiasaan itu berlanjut ketika dia duduk di bangku sekolah. Bakatnya sebagai pemimpin yang mau melindungi, melayani, dan mengayomi terlihat dari kemampuannya memegang jabatan sebagai ketua kelas, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (SMA). Bahkan, waktu kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), ia ringan tangan membantu umat muslim menjalankan ibadah.



“Saya aktif di masjid kampus. Melayani jamaah menjadi kegiatan yang saya laksanakan selama masa kuliah. Membantu orang lain melaksanakan salat, berbuka puasa, hingga salat taraweh selalu saya laksanakan secara rutin”, cerita Andi Akmal mengenang masa di IPB.

Kesenangannya membantu sesama itu, menurut Akmal, makin terasah saat ia mengenal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui kegiatan Tarbiyah yang diikuti, ia makin terbiasa dan sering terlibat di berbagai kegiatan sosial keagamaan. Sejak itu, perkenalannya dengan PKS makin erat.

Sebagai simpatisan partai kader, Akmal terlibat di berbagai pelatihan yang dilaksanakan partainya. Hubungan Andi Akmal dengan PKS pun semakin kuat, tatkala ia terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2004, atau saat usianya baru 30 tahun. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari keberaniannya mundur dari tempat dia bekerja, PT. Permodalan Nasional Madani (2002).

Pada periode kedua sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya 2012, Andi Akmal didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Sulawesi Selatan. Dua tahun berselang, tepatnya 2014, ia terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Dan, pada Pemilu 2019, Andi Akmal berjuang untuk terpilih kembali menjadi wakil rakyat dari dapil Sulawesi Selatan II. Semoga berhasil. □

MBO

Oleh:
Hidayat Nur Wahid
 Wakil Ketua MPR RI



Generasi Muda Tangguh Memiliki Kesadaran Nasional

BANGSA yang kuat ditopang oleh generasi muda tangguh, yakni elemen bangsa yang produktif dan siap menghadapi segala tantangan di masa kini dan masa akan datang. Generasi muda yang tangguh tidak hanya memiliki ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman, melainkan harus pula memperkuat kesadaran kebangsaan dalam dirinya. Tanpa spirit kebangsaan, generasi muda hanya menjadi buih di tengah pergaulan antarbangsa yang penuh kompetisi dan gejolak.

Bangsa Indonesia sangat beruntung karena saat ini hingga beberapa dekade mendatang jumlah warga berusia produktif (20-55 tahun) lebih besar dari warga berusia non-produktif (60 tahun ke atas). Fenomena itu sering disebut sebagai bonus demografi. Tapi, itu hanya dari segi kuantitas. Bagaimana dengan kualitas generasi muda dari sisi pendidikan, kesehatan, kepribadian dan kepedulian sosialnya? Bonus demografi bisa berubah menjadi bencana apabila generasi muda lemah pendidikannya dan tidak memiliki keterampilan, terganggu kesehatannya, labil kepribadiannya, serta tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Itulah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama, tidak hanya mensyukuri datangnya bonus demografi, tetapi bekerja keras agar bonus itu benar-benar memberikan keuntungan bagi penguatan hidup berbangsa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita harus mendidik generasi yang lebih cerdas dalam memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informatika dan komunikasi. Kita juga harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani generasi muda agar terhindar dari bahaya miras (minuman keras) dan narkoba (narkotika dan obat terlarang). Generasi cerdas dan sehat inilah yang mampu menghadapi tekanan dan persaingan global.

Di samping itu, kita perlu membentuk kepribadian generasi muda yang matang, tidak mudah terbawa arus budaya asing yang gencar menyerbu negeri ini. Seperti, misalnya, kontroversi terhadap maraknya *girl band* yang berasal dari Korea (Blackpink) yang dipandang tidak sesuai dengan adat kesopanan Indonesia. Mengapa generasi muda begitu mudah mengonsumsi budaya populer (musik, film, komik atau game) dari Korea atau Jepang, tetapi lupa mencermati etos kerja: disiplin dan kreativitas yang tinggi dari bangsa lain?

Jika mau, generasi muda Indonesia juga bisa lebih kreatif, semisal Nisa Sabyan bersama kawan-kawannya telah menggubah shalawatan dan musik gambus menjadi lebih populer. Terbukti, jutaan orang di seluruh Indonesia dan mancanegara yang menikmati senandung religi di era milenial. Banyak lagi hasil karya kaum muda Indonesia dalam berbagai bidang yang telah mendunia.

Aspek lain yang harus dikembangkan dalam diri kaum muda adalah kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan. Indonesia adalah negeri yang subur dan kaya sumberdaya, namun kita sadar berada di kawasan bencana (*ring of fire*). Bencana tsunami yang menimpa wilayah Banten dan Lampung Selatan menggerakkan solidaritas nasional. Sebelumnya, juga terjadi bencana Lombok dan Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), serta di Palu dan Donggala (Sulawesi Tengah). Generasi muda terlibat aktif dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Solidaritas sosial itu merupakan salah satu ekspresi dari kesadaran nasional yang terus digalakkan MPR RI melalui sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika). Keempat isu kebangsaan itu berhubungan erat dengan generasi muda dan gerakan mahasiswa, karena berawal dari perjuangan fenomenal mahasiswa Indonesia pada 1998 yang membuka era reformasi. Indonesia memasuki era perubahan dan pembaruan yang luar biasa, termasuk perubahan elemen penting negara Indonesia, yakni UUD 1945.

Era reformasi juga memunculkan pembaruan bentuk pemahaman dan implementasi terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak lagi berupa indoktrinasi, tapi proses penyadaran akan pentingnya empat hal tersebut bagi negara dan rakyat Indonesia.

Untuk itu, menjadi sangat penting generasi muda mahasiswa Indonesia era kekinian agar bersemangat dan serius berupaya memahami dan mengimplementasikan Empat Pilar tersebut. Salah satunya melalui Sosialisasi Empat Pilar yang digencarkan MPR RI sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2014.

Generasi muda dan mahasiswa Indonesia era milenial saat ini harus memahami betul-betul bahwa Empat Pilar merupakan hasil perjuangan mahasiswa juga. Kini perjuangan tersebut bukannya berhenti, tapi berlanjut terus di sisi pemahaman dan implementasi.

Penyelenggara negara sendiri melihat betapa pentingnya rakyat memahami kembali nilai-nilai yang ada dalam Empat Pilar tersebut. Sehingga melalui UU MD3 mengamanatkan kepada lembaga MPR RI untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Dan, sosialisasi itu dilaksanakan dengan berbagai metode ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pemahaman dan implementasi Empat Pilar yang baik oleh generasi muda akan menjadi benteng dari dampak negatif zaman modern, serta perkembangan teknologi yang sangat maju. Generasi muda yang tangguh juga memiliki filter dalam menghadapi tahun politik, yakni tidak terpengaruh provokasi untuk saling berkonflik hanya karena beda pilihan. Sesuai dengan semboyan "Bhinneka tunggal ika". □